

**Prosiding Seminar Nasional
Peran STISIP Widuri dalam Pemberdayaan Masyarakat:
Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Ekologi
dan Kesejahteraan Sosial
Sabtu, 1 November 2014**



**Keynote Speaker:
Prof. Dr. Bambang Shergi Laksmono, M.Sc.**

**Pembicara:
Prof. Dr. Robert MZ. Lawang, Dr. Ir. Prudensius Maring, MA,
Dr. Edy Siswoyo, M.Si., Erna Dinata, P.hD., Dra. MS Dwiyantari, M.Si., Flores
Mayaut, S.Sos., Hastin Trustisari, M.Si.**

Editor: Dr. Retor AW Kaligis, M.Si.



**Diselenggarakan Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Widuri
bekerjasama dengan:
Yayasan Pendidikan Pekerja Sosial (YPPS) Dian Agape, Yayasan Satyabhakti Widya,
Litabmas Ditjen Dikti Kemendikbud, dan Tempo Media Group**

Kampus adalah institusi yang sangat strategis dan menentukan, bukan saja sebagai pencipta tenaga kerja terdidik, tetapi sebagai pusat penyadaran dan transformasi sosial. Kampus berperan dalam pembangunan, peradaban dan hidup matinya sebuah bangsa. Kemajuan kampus dapat dilihat dari pencapaian tiga unsur: *service excellence-layanan bermutu*, reputasi dan pengaruh. Layanan mutu dan reputasi belum cukup karena sebuah lembaga akademik harus membuktikan bahwa dirinya 'berpengaruh'. Perguruan tinggi yang berpengaruh adalah perguruan tinggi yang mampu menjadi tumpuan bagi kebijakan, referensi opini akademik dan sandaran pada kepentingan strategis. Para ilmuwan (sosial) harus mampu memberikan jawaban, formula dan kerangka kerja jangka pendek, menengah, dan panjang bagi pemecahan masalah kemiskinan, keterbelakangan, ketidakadilan dan ketimpangan sosial yang menjadi persoalan mendasar bagi Indonesia.

ISBN 978-602-70283-1-9



9 786027 028319 9

**Prosiding Seminar Nasional
Peran STISIP Widuri dalam Pemberdayaan Masyarakat:
Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Ekologi
dan Kesejahteraan Sosial**

Sabtu, 1 November 2014

Keynote Speaker:

Prof. Dr. Bambang Shergi Laksmono, M.Sc.

Pembicara:

**Prof. Dr. Robert MZ. Lawang, Dr. Ir. Prudensius Maring, MA,
Dr. Edy Siswoyo, M.Si., Erna Dinata, P.hD., Dra. MS Dwiyantari, M.Si., Flores Mayaut,
S.Sos., Hastin Trustisari, M.Si.**



**Diselenggarakan Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Widuri
bekerjasama dengan:
Yayasan Pendidikan Pekerja Sosial (YPPS) Dian Agape, Yayasan Satyabhakti Widya,
Litabmas Ditjen Dikti Kemendikbud, dan Tempo Media Group**

Dilarang keras memperbanyak, memfotokopi sebagian atau seluruh isi buku ini serta memperjualbelikannya tanpa mendapatkan izin tertulis dari Penerbit
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Editor : Dr. Retor AW Kaligis, M.Si.

Judul Buku : Prosiding Seminar Nasional “Peran STISIP Widuri dalam Pemberdayaan Masyarakat:
Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Ekologi dan Kesejahteraan Sosial”

Cetakan : Pertama, Februari 2015

Halaman : vi + 104 halaman

Penerbit : Pusat Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat (PPPM)
Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Widuri,
Jakarta

Alamat : Jl. Palmerah Barat No. 353, Jakarta Selatan-12210

Telp : 021-5366445, 021-5480552, 021-5306447

Faks : 021-53330977

Email : info@stisipwiduri.ac.id

Website : www.stisipwiduri.ac.id

Notulen : Maykel Ifan dan Taufik Syaera

ISBN : 978-602-70283-1-9

Foto sampul: Merdeka.com

KATA PENGANTAR

Saya menyambut baik penerbitan prosiding ini sebagai bentuk pendokumentasi akademik untuk memasyarakatkan hasil Seminar Nasional *“Peran STISIP Widuri dalam Pemberdayaan Masyarakat: Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Ekologi dan Kesejahteraan Sosial”* yang diselenggarakan STISIP Widuri pada 1 November 2014 di Kampus Widuri, Jl.Palmerah Barat 353, Jakarta Selatan.

Seminar tersebut merupakan salah satu kegiatan ilmiah yang dilakukan STISIP Widuri yang bercita-cita menjadi *school of thought*, aliran pemikiran untuk perubahan pada tingkat mikro, meso dan makro di perkotaan dan perdesaan, yang memberi lebih banyak lagi ruang partisipasi dari mereka yang terpinggirkan dalam suatu proses pembangunan.

Guru Besar Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP Universitas Indonesia, Prof. Dr. Bambang Shergi Laksmono, M.Sc. mengawali seminar melalui Keynote Speech berjudul *“Kompleksitas, Nilai, dan Masa Depan: Dimensi Pokok Riset dan Peran Perguruan Tinggi”*.

Selanjutnya, Sesi I diisi Dr. Prudensius Maring, MA yang menyajikan makalah *“Involusi Perkotaan dan Strategi Sosial-Ekonomi Masyarakat Terkena Banjir Secara Berulang di Bantaran Sungai Ciliwung.”*, Dr. Edy Siswoyo dengan makalah *“Pentingnya Kepeloporan dan Pelopor Lokal Untuk Pengembangan Komunitas”*, serta Prof. Dr. Robert MZ. Lawang dengan makalah *“Pengabdian Kepada Masyarakat Desa: Sebuah Refleksi Sosiologik”*

Kemudian, Sesi II berisi presentasi dari Dra. MS Dwiyantari, M.Si. berjudul *“Pemberdayaan Keluarga Melalui Pemanfaatan Potensi Lingkungan Keluarga”*, Flores Mayaut, S.Sos. yang menyajikan makalah

“Praktik Pekerjaan Sosial dalam Penanganan Masalah Psikososial Keluarga di LK3 STISIP Widuri”,

Hastin Trustisari dengan makalah *“Intervensi Pekerja Sosial Terhadap Anak-Anak Jalan Kategori Rentan yang Putus Sekolah di Wilayah Pusat Grosir Cililitan (PGC)”*, dan Erna Dinata, P.hD. yang menyajikan makalah *“Peran Praktikum dalam Pengembangan Ilmu Kesejahteraan Sosial di Indonesia”*

Berbagai pemikiran dari para pemakalah dan diskusi-diskusi yang mengemuka dalam seminar ini diharapkan menjadi bahan yang bermanfaat secara akademis dan praktis untuk pemberdayaan masyarakat.

Untuk itulah, prosiding ini diterbitkan. Kiranya, karya ilmiah ini dapat memperoleh tanggapan atau komentar kritis dari kalangan akademis serta dapat memberi kontribusi bagi para pengambil kebijakan dan masyarakat luas.

Akhir kata, saya ucapkan selamat membaca.




Prof. Dr. Robert MZ Lawang
Ketua STISIP Widuri

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	v
Pendahuluan	1
Tujuan	1
Manfaat.....	2
Waktu dan Tempat.....	2
Peserta.....	2
Susunan Acara	3
Makalah-Makalah:	
Keynote Speaker: Prof. Dr. Bambang Shergi Laksmo, M.Sc. <i>Kompleksitas, Nilai, dan Masa Depan: Dimensi Pokok Riset dan Peran Perguruan Tinggi</i>	4
Dr. Prudensius Maring, MA. <i>Perilaku Kompetitif dan Aksi Ambil Untung Di Balik Tata Kelola Bantaran Sungai Ciliwung</i>	10
Dr. Edy Siswoyo, MA. <i>Pentingnya Kepeloporan dan Pelopor Lokal Untuk Pengembangan Komunitas</i>	21
Prof. Dr. Robert MZ Lawang. <i>Pengabdian Kepada Masyarakat Desa: Sebuah Refleksi Sosiologik</i>	34
Dra. MS Dwiyantari, M.Si. <i>Pemberdayaan Keluarga Melalui Pemanfaatan Potensi Lingkungan Keluarga</i>	42
Flores Mayaut, S.Sos. <i>Praktik Pekerjaan Sosial dalam Penanganan Masalah Psikososial Keluarga di LK3 STISIP Widuri</i>	54
Hastin Trustisari. <i>Intervensi Pekerja Sosial Terhadap Anak-Anak Jalan Kategori Rentan yang Putus Sekolah di Wilayah Pusat Grosir Cililitan (PGC)</i>	63
Notulensi	77
Kesimpulan dan Saran	97
Susunan Panitia Seminar	101
Foto-Foto Kegiatan	102

PENDAHULUAN

Pembangunan berkaitan dengan perbaikan kualitas hidup rakyat, memperluas kemampuan untuk membentuk masa depan mereka sendiri. Sasaran yang ingin dicapai dalam pembangunan tidak hanya dilihat dengan ukuran-ukuran ekonomi, tapi juga aspek peningkatan kualitas hidup manusia.

Pada hakekatnya ada tiga domain dalam pembangunan, yaitu: domain ekonomi, domain sosial, dan domain ekologi. Integrasi ketiga domain disebut paradigma pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Jadi, pembangunan berkelanjutan tidak saja berkonsentrasi pada isu-isu lingkungan. Lebih luas daripada itu, pembangunan berkelanjutan mencakup tiga lingkup kebijakan: pembangunan ekonomi, perlindungan pembangunan sosial dan perlindungan lingkungan.

Pembangunan berkelanjutan dapat disebut pro kesejahteraan, yakni pertumbuhan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat seluruhnya. Pembangunan juga pro keadilan sosial, yakni keadilan dan kesetaraan akses terhadap sumber daya alam dan pelayanan publik, serta menghormati kebhinekaan masyarakat. Kemudian, pembangunan berkelanjutan disebut pro lingkungan hidup yang mengutamakan keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup. Dengan pembangunan berkelanjutan diharapkan terjamin secara baik kehidupan masa kini dan generasi yang akan datang. Namun, pada praktiknya, pembangunan yang lebih mengejar pertumbuhan ekonomi menyebabkan berbagai masalah ekologi dan kesejahteraan sosial. Modernisasi kota semacam itu menyebabkan arus perpindahan tenaga kerja ke perkotaan yang melahirkan kaum marginal perkotaan yang bekerja di sektor informal dan pekerja rendahan dengan berbagai pemukiman kumuh. Di sisi lain, pembangunan desa memerlukan usaha pemberdayaan dan partisipasi masyarakat dengan memperhatikan aspek ekologi.

STISIP Widuri bermaksud menjadi Sekolah yang menunjuk pada *school of thought*, aliran pemikiran yang terkait perubahan pada tingkat mikro, meso dan makro yang menginginkan suatu proses emansipasi kelas sosial paling bawah, baik yang ada di perkotaan maupun perdesaan. STISIP Widuri menginginkan penataan kembali struktur sosial, ekonomi, dan politik berbasis ekologi dan kesejahteraan sosial yang memberi lebih banyak lagi ruang partisipasi dari mereka yang terpinggirkan dalam suatu proses pembangunan.

Berangkat dari paradigma tersebut, dalam rangka mengoptimalkan Tridarma Perguruan Tinggi, STISIP Widuri bermaksud mengadakan Seminar Nasional dengan tema: **“Peran STISIP Widuri dalam Pemberdayaan Masyarakat: Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Ekologi dan Kesejahteraan Sosial”**. Diharapkan dari seminar ini diperoleh berbagai gagasan inovatif untuk pemberdayaan masyarakat agar bermanfaat secara akademis dan praktis.

TUJUAN

- ✓ Diseminasi hasil-hasil penelitian dan pengabdian masyarakat menyangkut pemberdayaan masyarakat berbasis ekologi dan kesejahteraan sosial kepada civitas akademika, para pengambil kebijakan, dan masyarakat umum.
- ✓ Mencari model pemberdayaan masyarakat berbasis ekologi dan kesejahteraan sosial bagi kaum marginal.

MANFAAT

MANFAAT PRAKTIS

- ✓ Masukan bagi para stakeholders, baik pemerintah maupun swasta, yang bergerak dalam bidang pembangunan masyarakat dan lingkungan.
- ✓ Sebagai strategi untuk penelitian dan pengembangan masyarakat lebih lanjut.

MANFAAT AKADEMIS

- ✓ Pembelajaran bagi para civitas akademik.
- ✓ Pengembangan teori dan metodologi pembangunan sosial.

WAKTU DAN TEMPAT

Hari/ Tanggal : Sabtu, 1 November 2014

Waktu : Pukul 09.00-16.30

Tempat : Kampus Widuri

Jalan Palmerah Barat No 353, Jakarta Selatan-12210

(Telp: 021-548-0552, 5330970)

PESERTA

Peserta seminar ini adalah:

- Civitas akademika STISIP dan STMIK Widuri (Dosen, Mahasiswa S2 dan S1)
- Yayasan Dian Agape.
- Kementerian Sosial
- IPPSI (Ikatan Pendidikan Pekerjaan Sosial Indonesia)
- IPSPI (Ikatan Pekerja Sosial Profesional Indonesia)

SUSUNAN ACARA

Waktu	Sesi	Moderator
09.00-09.30	Registrasi dan Coffee Break	-
09.30-10.00	Sambutan-sambutan: - Laporan Kepala P3M STISIP Widuri, Dr. Edy Siswoyo. - Sambutan oleh Ketua STISIP Widuri, Prof. Dr. Robert MZ Lawang, sekaligus membuka Seminar.	
10.00-11.00	KEYNOTE SPEECH: Prof. Dr. Bambang Shergi Laksmono, M.Sc. <i>Kompleksitas, Nilai, dan Masa Depan: Dimensi Pokok Riset dan Peran Perguruan Tinggi</i>	
11.00-13.00	Sholat/ Rehat/ Makan Siang	-
13.00-14.30	Sesi I: 1. Dr. Prudensius Maring, MA <i>"Perilaku Kompetitif dan Aksi Ambil Untung Di Balik Tata Kelola Bantaran Sungai Ciliwung"</i> 2. Dr. Edy Siswoyo, MA <i>"Pentingnya Kepeloporan dan Pelopor Lokal Untuk Pengembangan Komunitas"</i> 3. Prof. Dr. Robert MZ. Lawang <i>"Pengabdian Kepada Masyarakat Desa: Sebuah Refleksi Sosiologik"</i>	Drs. Nelson Parapat, M.Si.
14.30-14.45	Coffee Break	
14.45-16.15	Sesi II: 1. Dra. MS Dwiyantari, M.Si. <i>"Pemberdayaan Keluarga Melalui Pemanfaatan Potensi Lingkungan Keluarga"</i> 2. Flores Mayaut, S.Sos. <i>Praktik Pekerjaan Sosial dalam Penanganan Masalah Psikososial Keluarga di LK3 STISIP Widuri"</i> 3. Hastin Trustisari <i>"Intervensi Pekerja Sosial Terhadap Anak-Anak Jalan Kategori Rentan yang Putus Sekolah di Wilayah Pusat Grosir Cililitan (PGC)"</i> 4. Erna Dinata, P.hD. <i>"Peran Praktikum dalam Pengembangan Ilmu Kesejahteraan Sosial di Indonesia"</i>	Drs. Fordolin Hasugian, M.Si.
16.15-16.30	Penutup	

Keynote Speech:

**Kompleksitas, Nilai dan Masa Depan:
Dimensi Pokok Riset dan Peran Perguruan Tinggi**

**Oleh Bambang Shergi Laksmono
(Guru Besar Kebijakan Sosial, Departemen Ilmu Kesejahteraan Sosial
FISIP Universitas Indonesia)**

Pertama sekali ingin saya ucapkan terima kasih atas undangan menghadiri dan menjadi seorang pembicara kunci pada Seminar Nasional di Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Widuri 2014, di Jakarta. Saya menyambut dengan bahagia diselenggarakannya Seminar Nasional STISIP Widuri, sebagai sebuah langkah uji pemikiran dan proses pengembangan ilmu pengetahuan bagi masyarakat. Riset dan pemaparan hasilnya, bukanlah sekedar aktivitas akademik, namun merupakan penerapan prinsip dan penyemaian 'gairah intelektual' bagi kita semua. Riset dan pemaparan serta publikasi adalah tradisi akademik. Riset adalah kegiatan inti, untuk menciptakan pengetahuan baru. Hasil penelitian dan publikasi adalah akuntabilitas profesional kita sebagai insan akademik. Masyarakat luas akan melihat, menilai dan memberikan opini atas karya intelektual kita. Buah pikir, pencarian tiada henti, gelut ide, intensnya interaksi, rumitnya data lapangan dan abstraksi gagasan menjadi elemen yang kita lalui serta hayati bersama. Kita lalui semua 'pergumulan ide' dalam posisi kita sebagai pengajar, peneliti dan juga pemikir. Kampus adalah kita dan kita adalah kampus. Demikian kiranya kedudukan sentral para peneliti dan pengajar pada kampus kita masing masing.

Banyak yang tidak sadar bahwa kampus adalah institusi yang sangat strategis dan menentukan, bukan saja sebagai pencipta tenaga kerja terdidik dan melaksanakan wisuda, tetapi sebagai pusat penyadaran dan transformasi sosial. Kampus berperan dalam pembangunan, peradaban dan hidup matinya sebuah bangsa. Kemajuan, lompatan pembangunan dan kesejahteraan akan ditentukan oleh tingkat pendidikan warganegaranya. Mungkin, sebuah negara yang terlenu dengan sumberdaya alamnya yang melimpah, tidak memikirkan betapa pentingnya manusia yang dimilikinya, manusia sebagai modal pencerahan, pertumbuhan dan perkembangan masyarakat. Bagi bangsa yang beranjak menyadari bahwa suatu hari sumberdaya alam akan habis, maka kesadaran akan pentingnya pendidikan akan menjadi keniscayaan. Suatu hari, kesadaran kebutuhan sumberdaya manusia yang berkualitas dan pentingnya peran kampus dalam masyarakatnya menjadi kenyataan. Kesadaran akan penting dan betapa besarnya bangsa ini memerlukan manusia (*brain capital-brain economy*) yang unggul inilah yang kita nantikan bersama.

Sebelum masuk pada substansi keilmuan, izinkan saya menggambarkan bahwa ada 3 (tiga) tahap akuntabilitas kelembagaan pendidikan yang pantas kita renungkan. Tidak disangkal bahwa semua perguruan tinggi ingin mencapai pengakuan kemajuan dan peran positifnya dalam masyarakat. Namun, kemajuan kampus dapat dilihat dari pencapaian tiga unsur: *service excellence-layanan bermutu*, reputasi dan pengaruh. Pengalaman saya mengelola kampus pada dasarnya menuntut terlaksananya penjaminan pelayanan akademik yang terbaik. Ini mendasar dan menjadi taruhan paling utama. Kriteria kelayakan dan kualitas layanan akademik

kita kenal dengan kontrol mutu akademik, misalnya lewat instrumen Akreditasi Nasional maupun penjaminan ASEAN University Network (AUN). Tercapainya *academic service excellence* adalah *output*-nya. Selanjutnya, kita ingin bahwa kampus kita dikenal mempunyai kemampuan *distinctive* (khas dan khusus), yang menjadi landasan reputasi dalam kemampuan yang tidak dimiliki kampus lain. Departemen Pekerjaan Sosial STISIP Widuri bagi kalangan pendidik ilmu kesejahteraan sosial di Indonesia misalnya, dikenal dengan penguasaan metodologi pekerjaan sosial dan studi keluarga yang kuat. Reputasi kelembagaan ini penting dan menjadi andalan bagi kita semua. Dapat dirasakan tingginya kehormatan bagi seorang mahasiswa pekerjaan sosial yang memperoleh kesempatan studi di Departemen/Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial di Widuri. Apakah reputasi cukup bagi perkembangan sebuah lembaga? Ternyata belum cukup. *Excellence* dan reputasi ternyata belum cukup. Sebuah lembaga akademik selanjutnya harus membuktikan bahwa dirinya 'berpengaruh'. Perguruan tinggi yang berpengaruh adalah perguruan tinggi yang mampu menjadi tumpuan bagi kebijakan, referensi opini akademik dan sandaran pada kepentingan *strategik*. Apa kepentingan *strategik* yang kita maksud dan relevan untuk kita? Berbicara khususnya bagi kita yang mendalami ilmu kesejahteraan sosial dan sosiologi dan juga dalam konteks keilmuan lintas disiplin, maka secara terintegrasi, kita para ilmuwan (sosial) harus mampu memberikan jawaban, formula dan kerangka kerja jangka pendek menengah dan panjang bagi pemecahan masalah kemiskinan, keterbelakangan, ketidakadilan dan ketimpangan sosial yang menjadi persoalan mendasar bagi Indonesia yang sudah 69 tahun memperoleh kemerdekaan ini.

Rekan rekan dan kolega akademik yang saya banggakan,

Setiap insan akademik saya kira perlu terus menjelajah realita masyarakat. Realita yang dimaksud mencakup tataran lokal, regional, nasional dan global. Dunia di sekitar kita sangat luas dan terus menjadi misteri. Ketidaktahuan kita akan alam semesta, dan juga semesta dari sistem sosial, berfungsinya berbagai pranata dan tindak tanduk manusia, hanya dapat dipahami dengan konsep-konsep yang kita bangun. Pilihan tema seminar nasional ini juga saya nilai sangat penting, yakni "Peran STISIP WIDURI dalam Pemberdayaan Masyarakat". Saya yakin tema yang diangkat adalah hasil dari renungan mendalam dan harapan dari civitas akademika STISIP WIDURI untuk meletakkan perguruan tinggi ini dalam kancah keilmuan nasional dan juga global. Semua perguruan tinggi diharapkan peran dan kontribusinya bagi pembangunan nasional. Kiranya, 'apa' peran perguruan tinggi dan seterusnya pertanyaan 'bagaimana' perguruan tinggi dapat berperan secara positif/konstruktif bagi lingkungannya perlu terus kita kaji. Kita tetap perlu mendalami 'pola', corak, kiprah dan formasi kerja sebuah lembaga pendidikan tinggi di masyarakat. Gunasekara¹ melalui kutipan berikut dapat membantu kita menelusuri perkembangan yang relevan dengan topik umum seminar nasional ini. Pandangannya tentang corak keterlibatan perguruan tinggi dalam masyarakat sebagai berikut :

"Theorization of the role of universities in regional innovation systems has evolved in the last 20 years, from the innovation systems approach, which highlighted the importance of knowledge spillovers from the education and research activities performed by universities in regional knowledge spaces, towards the development of a third role performed by universities in animating regional economic and social development."

¹ "Reframing the Role of Universities in the Development of Regional Innovation Systems", *Journal of Technology Transfer*, 31:101-113, 2006.

Dalam tulisannya, Gunasekara juga menyebut pola *triple-helix*, yang melibatkan kerjasama industri, pemerintah dan perguruan tinggi sebagai salah satu pola kerjasama yang ideal. Namun tulisan ini juga mengemukakan adanya pola kerjasama universitas lainnya yang dikenal dengan pendekatan *university engagement*. Penting bagi kita untuk mengenal kedua pola yang dikemukakan Gunasekara, namun kita juga harus mengerti konteks Indonesia dari tuntutan kontribusi perguruan tinggi bagi masyarakat. Kebetulan pula sebulan terakhir, kami di Departemen Ilmu Kesejahteraan Sosial Universitas Indonesia juga tengah melakukan rangkaian pertemuan dalam rangka persiapan lokakarya kurikulum pendidikan Pascasarjana ilmu kesejahteraan sosial. Seperti yang dapat di duga, merumuskan kurikulum dan kebutuhan KBK cukup rumit. Demikian pula kita sadari bahwa lingkungan kita berubah dan tantangan pembangunan di Indonesia juga semakin rumit. Daftar pekerjaan rumah kita panjang, antara lain: kesenjangan sosial meningkat dan kemiskinan masih tinggi, manusia sebagai modal, masih banyak masalah berkenaan dengan ekonomi ekstraktif serta dampak marjinalisasi, mengisi bonus demografi dan masyarakat lansia (*aging society*) perlunya penguatan bagi pendekatan berbasis hak, menuju masyarakat ASEAN dan menghadapi persaingan regional-global.

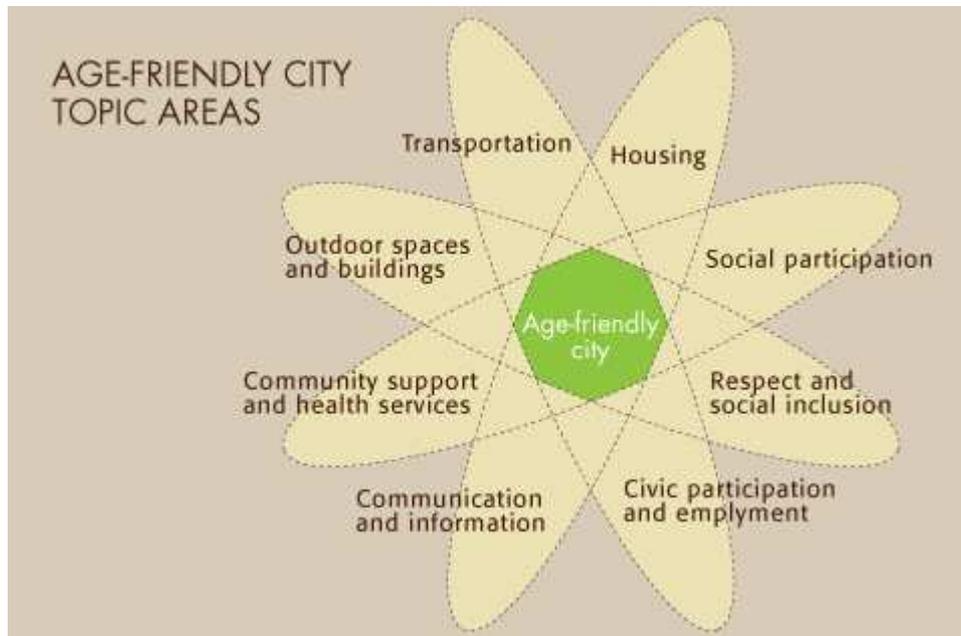
Peran ilmu kesejahteraan sosial pada dasarnya adalah sejauh kita imajinasikan. Artinya sejauh mana konsep dan wawasan kita, disitulah kita sebagai akademisi, peneliti dan lulusan ilmu kesejahteraan sosial dapat berperan. Serangkaian pertemuan internal dan masukan dari para narasumber, antara lain meneguhkan semangat bahwa ilmu kesejahteraan sosial adalah ilmu yang membekali para pelaku sistem kesejahteraan yang bekerja lintas disiplin untuk melakukan ragam perlakuan/tindakan untuk menghasilkan perubahan menuju perbaikan tingkat kesejahteraan dan kebahagiaan seseorang. Selain keberfungsian diri, kesejahteraan sosial juga berkenaan dengan keberfungsian otoritas (politik, ekonomi, kebudayaan, lingkungan, dan lain-lain) dalam menjalankan fungsi-fungsi publiknya. Bagaimana dengan konteks Indonesia? Situasi di Indonesia saat ini memang sungguh pelik. Keberfungsian sistem kesejahteraan tidak berjalan baik dan banyak sumberdaya yang terbuang percuma. Kita hidup melewati masa-masa genting, masa-masa puncak, masa-masa ketidak pastian, masa-masa. Dunia keilmuan dapat menyebutnya dengan berbagai macam label dan konsep: masa transisi, rezim otoriter, developmentalisme, reformasi, era demokrasi, sistem presidensial dan berbagai konseptualisasi ilmiah yang tujuan dasarnya adalah membingkai dan memberi makna (menyederhanakan) dari sebuah perkembangan sosial-politik yang ada.

Dalam perspektif luas dan rumit inilah maka ide-ide yang disampaikan dalam pertemuan ini berjudul "Kompleksitas, Nilai dan Masa Depan: Dimensi Pokok Riset Integrasi dalam Ilmu Kesejahteraan Sosial". Harapannya, adalah agar kita mampu menangkap sejumlah elemen esensial yang (rupanya) belum disadari dan dijadikan tujuan (*purpose*) dari keahlian kita dalam ilmu ilmu sosial. Secara singkat, kompleksitas, nilai dan masa depan adalah *cornerstones* yang dapat membantu kita mengenal medan, bertarung dan melepaskan diri dari permasalahan yang kompleks dan membelenggu kehidupan bangsa. Ketiga elemen ini (*complexity, values and the future*) adalah bagian dari bahasan luas tentang pemberdayaan masyarakat yang bertumpu pada reaksi yang inklusif dan berdimensi peluang. Istilah pokok dan populernya adalah pendekatan pemberdayaan 'ala' *co creation*. Paradigmnya dikenal dengan *presencing* yang diperkenalkan oleh Otto Scharmer (2008) dalam bukunya "*U-Theory : Leading from the Future as it Emerges*".

Ada tiga elemen dalam judul presentasi ini yang perlu dijelaskan. *Pertama*, kompleksitas. Ia adalah ruang dan tingkat pemahaman akan kehadiran, hubungan dan dampak dari interaksi berbagai elemen dalam realita perhatian kita. Imajinasi kita tentu dapat meluas dan berkembang. Bagi kita (para peneliti), tugas yang penting dalam setiap tahap awal penelitian adalah memahami *universum*, keseluruhan dan kompleksitas topik pengamatan. Pemahaman akan bentangan permasalahan penelitian menjadi suatu tantangan tersendiri. *Kedua*, berkenaan dengan nilai. Disini kita umumnya sebenarnya serba ambivalen. Nilai apa yang harus kita ambil sebagai referensi kehidupan publik. Berbagai dikotomi modern seakan (terus) mencabik pikiran kita. Diantaranya: demokrasi-otoriter, lokal-global, sekuler-religius, kolektif-individual, kota-desa, sosialis-kapitalis, global-lokal, market-state, privat-publik, cepat-lambat, nasionalis-religius, boros-hemat, dan bahkan dunia-akhirat. Dikotomi sederhana ini membuat manusia berpikir sempit, terkotak dan cenderung reduksionis. Sulit kita meneguhkan pada satu kelompok nilai yang konsisten. Dalam kesempatan ini, kiranya tepat bagi kita semua untuk tetap dan terus menjunjung tinggi prinsip-nilai-komitmen pada nilai dalam ideologi Pancasila bagi kehidupan sosial-ekonomi dan politik bangsa Indonesia. *Ketiga* adalah pandangan masa depan. Saya berpendapat, bangsa kita cenderung (semata) terikat pada nuansa krisis. Ilmu pengetahuan kita cenderung belajar memahami, tapi kurang bertumpu pada kemampuan mencari solusi. Selanjutnya ilmu pengetahuan yang berfokus pada solusi, umumnya reaktif namun tidak visioner. Padahal, visi jangka panjang adalah solusi. Sejauh ini intelektual kita bergerak sebagai respons terhadap krisis (*crisis-driven society*) dan bukan masyarakat yang bergerak atas tuntunan cita-cita (*vision driven society*). Kemana pandangan visioner bangsa Indonesia? Apa relasi dan relevansi *scenario plan, road-map, grand design, master-plan* bagi pemahaman ilmu sosial? Visi, dimensi waktu, bayangan jangka panjang menjadi penting sejalan dengan pentingnya partisipasi dan legitimasi. Sementara konsep konsep ini penting, sayangnya kita masih ragu dan belum mempercayai *futureology* sebagai bidang keilmuan integrasi yang potensial dan perlu kita kaji kepentingannya. Inilah tantangan yang harus kita bahas bersama. Sebuah bahasan yang kiranya dapat mewakili ketiga konsep diatas, yang mencakup kompleksitas, nilai dan masa depan adalah dalam isu lanjut usia.

Gambar berikut memberikan perspektif luas bagaimana kita melihat masalah lanjut usia secara holistik. Diagram di atas memberikan wawasan tentang cakupan sistem yang harus bekerja secara menyatu dan bersamaan dalam memberikan iklim, situasi dan fungsi fungsi sistem dalam masyarakat perkotaan yang ramah bagi orang tua. Inilah kompleksitas yang dimaksud, mencakup rangkaian dari berbagai unsur yang dapat saling berpengaruh dalam menciptakan kesejahteraan, Sejauh mana sistem seperti ini dapat terwujud di kota kota Indonesia ? Apakah kota kota di Indonesia ramah kepada manusianya? Sejauh mana sebuah kota dapat menjamin keleluasaan bagi penduduknya untuk bergerak, membangun produktivitas dalam keadaan keamanan yang maksimal? Tentu ini semua sangat tergantung pada kejelasan konseptual dan komitmen kebijakan terutama oleh Pemerintah (kota) dan dukungan masyarakat luas yang harus (mau) diajak berfikir untuk masa depan.

Diagram 1
Kerangka Kerja Active Aging dan Kota Ramah Lansia



Sumber : WHO (2007), *Global Age-Friendly Cities : Guideline*.

Segitiga dimensi lain yang kirannya penting disampaikan dalam forum terhormat ini adalah hubungan antara *pembangunan, hak azasi dan lingkungan hidup*. Makalah ini ingin menegaskan bahwa kita harus menyadari pentingnya kehadiran dan pergeseran dari tiga tema besar (tema pembangunan, penegakkan hak azasi dan kepentingan lingkungan hidup). Semula, pentas teknokrasi Indonesia dipenuhi dengan jargon pembangunan. Segala sesuatu dilaksanakan dengan pembangunan. Pemikiran Todaro dan sangat berpengaruh disini. Namun, dengan tumbuh dan berkembangnya demokrasi, khususnya dalam pemilihan langsung (penerapan prinsip *one –ma, one- vote*) maka tuntutan hak azasi berbasis identitas menjadi cukup sentral dan terus berkembang. *Voters* bukan semata sebuah satuan kewarganegaraan, tetapi identitas. Pemilih dalam pemilu berjuang dan membawa representasi warga yang beragam: warga disabilitas, warga adat, masyarakat daerah/kewilayahan, pekerja/buruh, gender perempuan, nelayan dan lain lain. Kelompok ini menjadi satuan dan juga kendaraan (politik) untuk mendesak, negosiasi dan mengerahkan suara. Selanjutnya, kesadaran terhadap lingkungan hidup juga tumbuh. Yang penting dikemukakan disini adalah, dimensi lingkungan bukanlah unsur yang diperhatikan oleh ilmuwan sosial. Ilmuwan sosial Indonesia, yang bertumpu pada pemikiran sosiologis Barat luput melihat lingkungan hidup sebagai komponen *universum* yang pokok bagi kehidupan dan karakter dari bangsa Indonesia. Hubungan manusia (sosial) dalam teori-teori sosial berfokus pada struktur dan hubungan kekuasaan yang ada di dalamnya. Asumsi dan implikasi bagi kita, jika hubungan dan keadilan sosial dapat dikelola, maka persoalan bangsa sudah selesai. Bagaimana dengan keadilan lingkungan? Dimana kita letakkan lingkungan dalam kesadaran kita. Bagaimana dengan kondisi yang lazim kita temui, pertumbuhan ekonomi baik tetapi lingkungan hidup habis tereksplorasi. Dalam kondisi yang kita yang lain: hubungan keadilan

dan kesejahteraan (di negara industri maju) baik tetapi lingkungan hidup (di negara berkembang seperti Indonesia) rusak parah? Jelas ada bias dalam pemikiran Barat. Jakarta maju pesat, sementara daerah lain tertinggal dan sumberdaya alam hancur berantakan. Jelas ini tidak adil.

Inti dari penjelasan pada bagian ini adalah, kita selaku peneliti kini harus melihat lebih luas inter-koneksi dari berbagai persoalan yang kita hadapi. Lebih dari itu, kita perlu sensitif pada ada tidaknya dimensi yang berimplikasi pada kebutuhan respon teknokrasi (agenda penelitian) yang dikembangkan. Berbicara soal keadilan, menjadi semakin rumit saat ini. Maksudnya dan misalnya, bisa saja terjadi pembangunan justru melanggar prinsip penghormatan bagi masyarakat adat. Pembangunan bias orang kota, tidak sensitif bagi penyandang disabilitas. Memperhatikan kaum buruh tetapi tidak memperhatikan lingkungan. Banyak contoh lain yang dapat dikemukakan untuk menjelaskan diskohistensi yang dapat muncul. Apakah ada solusi yang dapat mempertemukan pembangunan, pelestarian lingkungan hidup dan perlindungan hak kewarganegaraan berbasis identitas warga? Ini persoalan yang harus kita bahas bersama lagi.

Penutup

Kompleksitas, nilai dan masa depan memegang kunci keberhasilan bagi dua hal sekaligus. Rumusan kontemplatif akan arah dan langkah kelembagaan perguruan tinggi terkait dengan nilai dan pemahaman akan sistem dimana perguruan tinggi bergerak dan melaksanakan perannya. Visi dan misi menjadi sebuah imajinasi yang mengikat bagi kita warga kampus. Demikian pula, pemahaman kompleksitas, nilai dan pandangan masa depan sangat berpengaruh dalam keberhasilan kita merumuskan agenda dan substansi penelitian kita. Indonesia memiliki ciri kompleksitasnya tersendiri. Situasi di daerah (kabupaten-kecamatan-desa) tentu juga memiliki kompleksitasnya tersendiri. Dalam kompleksitas yang melingkupi kita semua, apa rumus-formula sukses dan keberhasilan kita? Menurut saya, dua unsur lain yang menjadi jawabannya. Pertama adalah komitmen nilai dan kapasitas organisasi dalam membangun kerangka kerja menuju masa depan, *the future*. Inilah kontribusi ilmu sosial yang dapat saya rumuskan. Kita harus dapat menjawab bagaimana peran dan kriteria keberhasilan penelitian sosial lewat semua karya akademik kita. Apakah hasil hasil penelitian cukup dan dibayangkan hanya sampai dipresentasikan dan diterbitkan? Kita semua *concern* dengan kedudukan ilmu ilmu sosial. Hanya dengan demikian karya ilmu sosial dapat disejajarkan dengan hasil karya teman teman ilmu alam.

Perilaku Kompetitif dan Aksi Ambil Untung Di Balik Kemandekan Tata Kelola Bantaran Sungai Ciliwung

Oleh Prudensius Maring^{*)}, Fordolin Hasugian^{*)}, Retor AW Kaligis^{*)}

ABSTRAK

Tulisan ini menjelaskan perilaku kompetitif yang berlangsung secara kolektif di balik kemandekan pembangunan bantaran sungai. Kemandekan terlihat melalui ketidakpastian pengaturan penguasaan sumberdaya, ketidakpastian penegakan aturan, dan tersendatnya program penataan bantaran sungai. Hal ini memperkuat karakter bantaran sungai yang berciri akses-terbuka dan penyerap kehadiran pendatang di bantaran sungai. Perilaku eksploitatif secara kolektif terlihat dalam bentuk persaingan penguasaan sumberdaya, perebutan daerah aliran sungai, aksi ambil untung, perilaku buang sampah, dan buruknya pengelolaan sampah. Kemandekan pembangunan, perilaku kompetitif, dan aksi ambil untung menghasilkan perilaku resistensi yang menghambat gagasan perubahan sosial dan ekologis. Tulisan ini menginspirasi perspektif antropologi ekologi dan antropologi perkotaan. Penelitian menggunakan metode wawancara mendalam dan pengamatan terlibat pada masyarakat bantaran sungai Ciliwung di Jakarta Timur.

Kata kunci: Ciliwung, kemandekan, perilaku kompetitif, aksi ambil untung, bantaran sungai, masyarakat kota.

ABSTRACT

This article explain competitive behavior collectively behind the stagnation of watershed development. The stagnation visible through uncertainty of regulation of watershed tenure, uncertainty of law enforcement, and stagnated of watershed normalization program. The problem above strengthen the character of watershed that open access and absorptive the urban community on watershed. The competitive behavior collectively on watershed resources visible on competition of watershed tenure, robbery the area on watershed, action of take profit, behavior of throw the rubbish to river, and bad management of rubbish. Stagnation of development, competitive behavior, and action of take profit collectively result the behavior of resistance that block the new idea for social and ecological change. This article inspire to perspective of ecological anthropology and urban anthropology. The research used method indepth-interview and participatory observation on the community of Ciliwung watershed in East Jakarta.

Keywords: Ciliwung, stagnation, competitive behavior, action of take profit, watershed, urban community.

A. PENDAHULUAN

Tulisan ini bermaksud menjelaskan fenomena persaingan dan perebutan sumberdaya alam di balik pembangunan bantaran sungai. Ketidakpastian pengaturan penguasaan sumberdaya, ketidakpastian penegakan aturan, dan tersendatnya penerapan program penataan bantaran sungai telah bersinergi dengan perilaku kompetitif dan aksi ambil untung yang dilakukan berbagai pihak. Perilaku persaingan dan aksi ambil untung terlihat melalui penguasaan sumberdaya, perampasan daerah aliran air sungai, perilaku buang sampah, dan buruknya pengelolaan sampah. Ketidakpastian pengaturan bantaran sungai memperkuat karakter bantaran sungai yang berciri akses-terbuka dan menyerap kehadiran masyarakat di bantaran sungai. Kemandekan pembangunan bantaran sungai dan perilaku kompetitif yang dijalankan secara kolektif bermuara pada munculnya perilaku resistensi yang menghambat gagasan perubahan kehidupan sosial dan ekologis.

^{*)} Ketiga penulis merupakan Dosen Tetap Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Widuri, Jakarta.

Secara fisik, luas wilayah DKI Jakarta adalah 66.152.000 Ha (atau sekitar 662 Km²). Wilayah tersebut dilalui 13 sungai/kali yang memiliki cabang dan sub cabang dengan total sekitar 29 sungai/kali/situ. Dari jumlah tersebut, sebanyak 83% di antaranya memiliki kualitas air dalam kondisi buruk dan sekitar 17% di antaranya memiliki kualitas air dalam kondisi sedang. Daerah Aliran Sungai (DAS) Ciliwung melintas di tengah kota Jakarta setelah melintasi wilayah kabupaten Bogor, Kota Bogor, dan Kota Depok. Pembangunan di wilayah hulu dan pada wilayah yang dilalui sungai Ciliwung telah merusak daerah aliran sungai dan menghilangkan daya resap lebih dari 80%. Hingga tahun 1980, daerah aliran sungai yang telah berubah fungsi mencapai 18.415,26 Ha terdiri dari kawasan perumahan (10.857,63 Ha), kawasan industri (4.960,05 Ha), dan jasa perdagangan (2.596,58 Ha). Wilayah bantaran sungai di wilayah Jakarta merupakan sumber lahan pemukiman masyarakat. Sebagian pemukiman di bantaran sungai Ciliwung termasuk kategori kumuh karena memiliki infrastruktur dasar buruk. Hal ini berarti kondisi bantaran Ciliwung menyumbang terhadap 392 RW kumuh dan 64 kampung miskin di Jakarta (lihat BPDAS Citarum-Ciliwung, 2009; Irawaty, 2012; Anonim, 2014; Maring, *et al*, 2014).

Akibat alih fungsi daerah aliran sungai, hilangnya daya resap air hujan, dan menguatnya perilaku kompetitif dan aksi ambil untung secara berlebihan dari alam adalah timbulnya banjir bandang secara rutin. Sejarah banjir Ciliwung telah berlangsung sejak masa pemerintah kolonial Belanda. Dampak banjir secara sosial ekonomi makin terasa sejalan kemajuan pembangunan berciri fisik-ekonomi yang secara langsung mengancam keberadaan bantaran sungai. Sejak tahun 2007, selain menerjang pemukiman di bantaran sungai Ciliwung, banjir mulai merambah pemukiman elit, pusat perekonomian dan jalan protokol (Kompas, 10/2/2007). Dampak banjir yang dialami masyarakat secara berulang-ulang dan konsisten memperumit strategi sosial, ekonomi, ekologi masyarakat. Situasi demikian mengonstruksi pola adaptasi berciri involutif. Sebuah strategi bertahan hidup dengan cara membuat kerumitan-kerumitan baru ke arah dalam yang berujung pada terjadinya mekanisme berlari-lari di tempat sambil membagi-bagi kemiskinan (*shared poverty*). Tindakan yang dilakukan belum menyentuh persoalan mendasar yang menyebabkan terjadinya banjir. Kita mulai bergerak ketika banjir datang. Tindakan preventif yang berdampak jangka panjang masih jarang dilakukan (Maring, 2007; Maring, *et al*, 2014).

Masalah yang dibahas dalam tulisan ini adalah melihat fenomena lahirnya perilaku kompetitif dan aksi ambil untung secara kolektif pada masyarakat bantaran sungai di balik ketidakpastian pengaturan penguasaan sumberdaya, ketidakpastian penegakan aturan, dan tersendatnya penerapan program penataan bantaran sungai. Perilaku ambil untung secara kolektif terlihat dalam bentuk persaingan penguasaan sumberdaya, perampasan daerah aliran sungai, perilaku ambil untung, perilaku buang sampah, dan buruknya pengelolaan sampah. Ketidakpastian pengaturan bantaran sungai memperkuat karakter bantaran sungai yang berciri terbuka dan menyerap kehadiran masyarakat di bantaran sungai. Involusi pembangunan dan perilaku kolektif destruktif bermuara pada munculnya perilaku resistensi yang menghambat gagasan perubahan kehidupan sosial dan ekologis. Tulisan ini bersumber dari penelitian tentang involusi perkotaan dan strategi sosial ekonomi masyarakat bantaran sungai Ciliwung. Tulisan ini adalah potret dari keseluruhan implikasi pembangunan yang terjadi pada masyarakat perkotaan di bantaran sungai Ciliwung.

Penelitian ini menginspirasi perspektif ekologi budaya (Geertz, 1963) dan antropologi perkotaan (Suparlan, 2004). Perspektif ekologi budaya menekankan inti kebudayaan (*cultural core*) meliputi pola-pola sosial, politik, dan organisasi sosial. Pandangan ini menjadi titik masuk memahami strategi sosial, budaya, dan ekonomi yang

dijalankan masyarakat perkotaan di bantaran sungai. Perspektif ekologi budaya bisa menjelaskan strategi sosial ekonomi yang dijalankan oleh masyarakat; perspektif antropologi perkotaan bisa menjelaskan *setting* realitas kehidupan masyarakat perkotaan yang dinamis, kompleks, dan cenderung bersifat rumit. Strategi sosial ekonomi yang dijalankan masyarakat tidak berlangsung di ruang kosong. Strategi tersebut selalu berhubungan dengan realitas sosial politik lebih luas yang dialami masyarakat sebagai “masyarakat perkotaan” yang dinamis, kompleks, dan rumit (involutif) (lihat Maring, *et al*, 2014).

Konsep involusi menggambarkan kebudayaan yang sudah mencapai pola mapan jika tidak mampu mendinamiskan dirinya akan mengalami kerumitan ke dalam (*involutive*) dan melahirkan kemandekan (Geertz, 1963; lihat Maring, *et al*, 2014). Konsep involusi memberi inspirasi untuk menjelaskan, apakah *setting* bantaran sungai di wilayah perkotaan yang dipenuhi ketidakpastian pengelolaan dapat melahirkan perilaku kolektif destruktif pada masyarakat. Fenomena penyempitan aliran sungai, aksi ambil untung secara sepihak atas sumberdaya sungai, aksi membuang sampah ke sungai, dan perilaku enggan pindah meski diterjang banjir secara berulang merupakan bentuk perilaku kolektif destruktif. Permasalahan perkotaan yang menjadi sasaran kajian antropologi perkotaan berpangkal pada kebudayaan perkotaan dan pranata-pranata sosial yang hidup dan berkembang di kota (Suparlan, 2004). Pandangan tersebut menegaskan bahwa kajian antropologi perkotaan tidak sekadar memosisikan kota sebagai *setting* fisik-lokasi semata. Sebaliknya, perspektif antropologi perkotaan memosisikan kota sebagai orientasi konseptual, menggali pola-pola yang berlaku secara empirik, menggunakan pendekatan holistik, dan melihat hubungan antara pola-pola kelakuan/ budaya dengan masyarakat yang lebih luas (Suparlan, 2004; lihat Maring, *et al*, 2014).

B. METODE DAN SUMBER DATA

Untuk menjelaskan masalah di atas maka penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif (Creswell, 2010). Data primer dikumpulkan melalui metode wawancara mendalam, pengamatan terlibat, dan pengambilan foto. Untuk mengumpulkan data sekunder dilakukan pengumpulan dokumen ke instansi/ lembaga yang relevan. Kegiatan penelitian berlangsung selama tahun 2014. Proses penggalian data selalu dikaitkan dengan tema yang berhubungan dengan strategi sosial-ekonomi yang dijalankan masyarakat, intervensi program pembangunan bantaran sungai yang dijalankan pemerintah, dan intervensi pemberdayaan masyarakat yang dijalankan *stakeholders* lainnya. Penggalian data dilakukan secara progresif dengan mengandalkan formulasi pertanyaan bersifat progresif kontekstual. Keterbatasan waktu turut mempengaruhi proses pengumpulan data.

Data yang digunakan dalam tulisan ini bersumber dari hasil penelitian tentang “Involusi Perkotaan dan Strategi Sosial Ekonomi Masyarakat Bantaran Sungai Ciliwung” yang berlangsung selama tahun 2014 dengan biaya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. Penelitian yang dirancang dalam waktu 3 tahun ini bermaksud mempelajari dan menjelaskan masalah atau pertanyaan penelitian berikut: (1) Bagaimana strategi sosial ekonomi yang dikembangkan masyarakat perkotaan yang terkena banjir secara berulang di bantaran sungai; (2) Bagaimana realitas involusi dalam kehidupan masyarakat perkotaan yang tinggal di bantaran sungai. Dengan demikian, tulisan ini hanya sebuah potret dari keseluruhan implikasi pembangunan yang terjadi pada masyarakat perkotaan di bantaran sungai Ciliwung.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini menjelaskan beberapa hal berikut: *Pertama*, potret komunitas dengan strategi sosial yang dijalankannya. Gambaran tersebut hanya memberi titik masuk dan tidak untuk membatasi pihak lain dalam analisis ini karena masalah yang terjadi di bantaran sungai tidak lepas dari peran banyak pihak di luarnya. *Kedua*, perilaku kompetitif dan aksi ambil untung. Perilaku tersebut terlihat dalam bentuk persaingan penguasaan sumberdaya, perampasan daerah aliran sungai, perilaku ambil untung, perilaku buang sampah, dan buruknya pengelolaan sampah. Perilaku tersebut tumbuh subur secara kolektif karena bersinergi dengan ketidakpastian pengaturan penguasaan sumberdaya, ketidakpastian penegakan aturan, dan tersendatnya penerapan program penataan bantaran sungai. *Ketiga*, penting dibangun perilaku kolektif konstruktif. Perilaku ini harus diwujudkan dalam aksi-aksi penanaman kembali atas lahan gundul, pemeliharaan bantaran sungai, normalisasi sungai/danau, pengolahan sampah, malu membuang sampah ke sungai, yang dilakukan secara kolektif untuk kepentingan bersama.

Bagian ini menjelaskan beberapa hal berikut: *Pertama*, potret komunitas dengan strategi sosial yang dijalankannya. Gambaran tersebut hanya memberi titik masuk dan tidak untuk membatasi pihak lain dalam analisis ini karena masalah yang terjadi di bantaran sungai tidak lepas dari peran banyak pihak di luarnya. *Kedua*, perilaku kompetitif dan aksi ambil untung. Perilaku tersebut terlihat dalam bentuk persaingan penguasaan sumberdaya, perampasan daerah aliran sungai, perilaku ambil untung, perilaku buang sampah, dan buruknya pengelolaan sampah. Perilaku tersebut tumbuh subur secara kolektif karena bersinergi dengan ketidakpastian pengaturan penguasaan sumberdaya, ketidakpastian penegakan aturan, dan tersendatnya penerapan program penataan bantaran sungai. *Ketiga*, penting dibangun perilaku kolektif konstruktif. Perilaku ini harus diwujudkan dalam aksi-aksi penanaman kembali atas lahan gundul, pemeliharaan bantaran sungai, normalisasi sungai/danau, pengolahan sampah, malu membuang sampah ke sungai, yang dilakukan secara kolektif untuk kepentingan bersama.

1. Potret komunitas dan strategi sosialnya

Pembangunan bantaran sungai Ciliwung dilaksanakan melalui proyek penanggulangan banjir dan normalisasi sungai. Proyek tersebut bertujuan mengatasi berbagai masalah sosial-ekologis di bantaran sungai, kali, dan situ. Melalui kedua program tersebut, masalah banjir diatasi melalui perbaikan daerah aliran air dan wilayah tangkapan air. Program tersebut juga diharapkan dapat mengatasi masalah pemukiman dan kehidupan sosial/ekonomi masyarakat di bantaran sungai/situ. Meski demikian, bagi masyarakat hingga sekarang masih simpang siur informasi tersebut. Apakah wilayah pemukiman mereka akan terkena proyek normalisasi dan pemusatan pemukiman di rumah susun. Masyarakat mengeluhkan, hingga sekarang belum ada pembicaraan langsung dengan masyarakat tentang kepastian proyek normalisasi sungai. Sebagian masyarakat yang rumahnya menjadi langganan banjir karena terletak di aliran sungai terlihat pasrah jika terkena proyek normalisasi. Perhatian utama masyarakat adalah kepastian kompensasi dan keberlanjutan mata pencaharian (Mikmah, 2010; Arifianto, 2009; Maring, *et al*, 2014).

Warga bantaran sungai Ciliwung pada lokasi penelitian berasal dari berbagai wilayah di Indonesia. Kondisi ini memungkinkan lahirnya konstruksi struktur sosial komunitas bantaran sungai yang berciri heterogen. Struktur

sosial heterogen tersebut sejalan dengan pola interaksi sosial yang dibangun, yaitu pola interaksi intrakelompok/ asal-usul dan pola interaksi interkelompok/ asal-usul. Proses interaksi intrakelompok/ asal-usul terlihat melalui aktivitas dan interaksi sosial yang dibangun dalam masing-masing kategori warga berdasarkan asal usul tersebut dan kesamaan keyakinan keagamaan. Warga yang berasal dari daerah yang sama membangun hubungan dan relasi khusus berdasarkan asal-usul tersebut melalui kegiatan arisan keluarga, kegiatan sosial, dan doa bersama (persekutuan) yang berlangsung terus-menerus. Proses ini membentuk pola relasi dan hubungan sosial bersifat khas berdasarkan kesamaan asal-usul. Proses tersebut secara ekstensif melibatkan warga seasal-usul yang tinggal di luar bantaran sungai. Proses membangun relasi dan interaksi sosial yang bersifat menyebar-keluar ini bisa menjelaskan tidak terjadinya budaya dominan (*dominant culture hypothesis*) dalam kehidupan masyarakat di bantaran sungai Ciliwung (Lubis, 2005; lihat Maring, *et al*, 2014).

Pada tingkat lebih luas, penelitian ini memperlihatkan masyarakat bantaran sungai membangun interaksi lintas kelompok asal-usul dan keyakinan keagamaan. Upaya membangun interaksi lintas kelompok dan konstruksi struktur sosial yang lebih luas tersebut berlangsung melalui proses formal dan informal. Masyarakat secara sengaja mengembangkan pola relasi-interaksi yang menjembatani dinamika kelompok-kelompok “lebih kecil” melalui kegiatan-kegiatan formal dan kegiatan sosial yang melibatkan seluruh warga di tingkat RW. Melalui peran aparat pemerintah, tokoh masyarakat, dan tokoh agama, berbagai kegiatan sosial melibatkan semua warga di bantaran sungai. Peran aparat dari tingkat RW dan RT bisa memberi kenyamanan bagi warga. Melalui peran tokoh formal dan informal pula dilaksanakan kegiatan sosial berupa arisan “Bapak-bapak” secara rutin. Melalui arisan warga ini berbagai masalah sosial dibahas dan dicarikan jalan keluar. Di tingkat RT terdapat arisan “Ibu-ibu” yang dilaksanakan secara rutin. Dinamika kehidupan masyarakat di tingkat kelompok kecil dan dalam konteks wilayah yang lebih luas mengonstruksi nilai dan norma untuk dijadikan pegangan dalam kehidupan bersama (lihat Maring, *et al*, 2014).

Gambaran di atas memperlihatkan bahwa masyarakat bantaran sungai mengonstruksi norma dalam kehidupan bersama berdasarkan nilai keagamaan, daerah/asul-usul, dan tujuan kehidupan bersama yang dikonstruksi secara formal. Pelajaran penting yang bisa ditarik dari proses membangun relasi-interaksi sosial yang dijalankan masyarakat bantaran sungai adalah lahirnya konstruksi struktur sosial yang berlapis-lapis, berulang, dan bertumpang-tindih peran sebagai respon terhadap realitas banjir berulang yang dihadapi masyarakat bantaran sungai. Terlihat bahwa struktur sosial yang dibangun selalu berorientasi pada fungsi-fungsi untuk saling membantu dan meringankan tekanan yang diakibatkan banjir. Seorang warga harus terlibat dalam berbagai struktur organisasi yang ada sebagai strategi mengamankan diri. Kondisi ini memungkinkan struktur sosial yang terbangun bersifat fleksibel dan terhindar dari ketimpangan-ketimpangan sosial. Struktur sosial yang dibangun tidak untuk memperkuat posisi elit tertentu, tetapi untuk membantu pihak-pihak yang dipandang lemah (lihat Maring, *et al*, 2014).

2. Perilaku kompetitif dan aksi ambil untung

Gambaran di atas memperlihatkan berlangsungnya proses konstruksi nilai-norma, struktur sosial, dan strategi sosial yang secara fungsional membantu masyarakat dalam mengatasi masalah banjir rutin. Meski demikian, di balik keberhasilan tersebut lahir perilaku ambil untung secara kolektif atas sumberdaya bantaran

sungai. Banjir yang terjadi secara berulang, di satu sisi mendorong masyarakat mengembangkan struktur sosial dan strategi sosialnya, tetapi pada sisi lain melahirkan cara pandang negatif atas sungai. Sungai tidak dilihat sebagai *resources* yang harus dipelihara dan dirawat, tetapi sebagai sumberdaya yang harus diperebutkan. Konsepsi *public goods* yang harus dikelola secara baik berubah menjadi *public bads* yang dijadikan sasaran pembuangan sampah, pendangkalan, dan penyempitan (lihat Tim Ekspedisi Ciliwung KOMPAS, 2009). Bantaran sungai Ciliwung menjadi arena pertarungan, persaingan, dan perebutan yang diperagakan banyak pihak.

Banjir yang melanda kehidupan warga Jakarta adalah akibat pertarungan kepentingan berbagai pihak di wilayah hulu dan hilir. Banjir berulang menunjukkan menguatnya kepentingan dan lemahnya aturan. Hal ini mengingatkan tesis *tragedy of the commons* (Hardin, 1968). Penggunaan sumber daya bersifat terbuka yang tidak terkendali, bakal menimbulkan kerusakan dan tragedi kemanusiaan. Hardin mengusulkan privatisasi kepemilikan sumber daya dengan aturan bersifat mengikat dan memaksa. Meski dikritik, tesis ini mempengaruhi sistem penguasaan sumber daya alam di banyak negara. Sumber daya alam bernilai ekonomi tinggi, yang semula merupakan milik bersama diklaim sebagai milik negara. Negara memberi hak penguasaan dan pengelolaan kepada lembaga privat seperti perusahaan swasta atau perusahaan negara. Ironisnya, pemerintah tak menaruh minat untuk mengelola 13 bantaran sungai di wilayah DKI. Bantaran sungai jadi wilayah terbuka untuk diakses warga. Sejak 40-50 tahun silam, bantaran sungai menjadi rebutan para urban yang menyerbu kota Jakarta. Hingga kini sekitar 71.000 rumah tangga atau 700.000 jiwa menghuni bantaran kali (Kompas, 2007).

Ketika penduduk kian padat, tindakan warga untuk menguasai dan melindungi lahannya dari banjir dan orang lain dilakukan dengan banyak cara. Aksi ini marak saat pemegang otoritas penataan ketertiban dan pemukiman kota belum menunjukkan aksi konkrit dan menyentuh masalah. Daerah aliran air menjadi sumber daya yang diperebutkan. Banyak cara dilakukan untuk mempertahankan lahan dan harta kekayaan dari banjir. Rumah dibangun permanen dan bertingkat. Lahan di bibir kali ditimbun lebih tinggi dan terus menjorok ke kali. Hal ini bertujuan menghindari banjir sekaligus memperluas klaim pemilikan lahan. Tindakan ini mempersempit alur sungai, sementara volume air terus meningkat. Aliran air terjepit dari kedua sisi berlawanan. Di beberapa tempat, semula lebar sungai mencapai 30 meter kini tinggal 10 meter, bahkan kurang. Di beberapa tempat, pemilik lahan melakukan aksi berlawanan dari kedua sisi kali Ciliwung. Yang satu meninggikan lahannya dengan tanah *urugan* (tanah hasil timbunan), yang lain membangun tembok pagar lebih dari 4 meter. Akibat penyempitan itu, banjir menerjang ke mana-mana. Rumah-rumah yang biasanya aman, hancur akibat bobolnya tembok. Aksi-aksi semacam ini berlangsung di mana-mana. Daerah aliran sungai menjadi arena terbuka bagi penghuni bantaran kali untuk mengklaim dan memperkuat pertahanan dari terjangkit banjir (Maring, 2007; Maring, 2006).

Mengapa terjadi aksi ambil untung untuk kepentingan sendiri? Mengikuti tesis Hardin, hal ini akibat lemahnya aturan yang bersifat mengikat dan memaksa. Tindakan cari untung ini berhubungan dengan buruknya peran pemerintah. Upaya yang dilakukan pemerintah selalu berwajah proyek dengan dana triliunan rupiah. Pasca banjir besar tahun 2002, misalnya, dana sekitar Rp 17 triliun dialokasikan untuk revitalisasi tata ruang dan normalisasi daerah aliran sungai. Ironisnya, upaya menata kembali pemukiman di bantaran kali selalu dianaktirikan. Padahal, hingga tahun 2007 sekitar 71.000 keluarga atau sekitar 700.000 jiwa mendiami bantaran sungai (Wawa, 10/2/2007). Alasannya, biaya ganti rugi yang besar karena calo ikut bermain. Lahan warga yang dibeli

calo jadi mahal. Informasi yang mencuat adalah proyek besar seperti normalisasi Banjir Kanal Timur dan Banjir Kanal Barat, namun program normalisasi sungai asing bagi warga. Warga hanya pernah dengar tapi tidak pernah paham program normalisasi sungai. Situasi ini membutuhkan tindakan konkrit dan aturan yang berwibawa, tidak hanya bersifat memaksa. Aparat penegak aturan harus bersih dari permainan uang dan sogok-menyogok. Aksi cari untung para calo, mungkin karena ada informasi dari dalam. Faktor yang sering menghambat proses pembebasan tanah adalah sogok.

Argumentasi bahwa manusia adalah pusat dan lingkungan alam sebagai pendukung, bersinergi dengan ketamakan manusia. Sinergi ini menyulut persaingan antarmanusia untuk memperebutkan sumberdaya alam. Ketamakan dan pesaingan mengonstruksi mentalitas eksploitatif. Lingkungan alam yang semula dipandang untuk memuliakan manusia berbalik menghancurkan manusia. Jiwa dan raga, harta benda sosial/ekonomi, simbol kebanggaan dan keangkuhan manusia diporakporandakan fenomena alam. Banjir di tengah ibu kota negara Indonesia adalah pentas ketamakan dan mentalitas eksploitatif yang dijalankan secara kolektif. Intervensi berupa penyempitan dan pendangkalan sungai/kali, penimbunan danau dan parit, tidak lagi untuk memelihara lingkungan alam. Semua intervensi kita bertujuan mengambil manfaat dan keuntungan sebesar-besarnya bagi kepentingan manusia. Ketamakan dan persaingan membutuhkan kita, hingga mengancam kemanusiaan kita sekalipun.

Bagaimana manusia mesti menempatkan dirinya dalam sistem alam, masih menjadi perdebatan dalam perspektif etika lingkungan. Ada kelompok yang secara tegas menempatkan posisi manusia sebagai pusat (*antroposentrisme*). Dalam hal ini manusia bisa melakukan apa saja terhadap komponen alam lainnya untuk memelihara kepentingannya. Di sisi lain, ada kelompok yang berjuang menempatkan posisi manusia sebagai bagian dari alam (*biosentrisme*). Dalam hal ini eksistensi manusia tergantung kepada komponen alam lainnya. Karenanya manusia tidak bisa berlaku sekehendak hati, harus memperhitungkan dampaknya terhadap komponen alam lain atas langkah-langkahnya. Sekalipun masih pro dan kontra, manusia terus melakukan eksploitasi berlebih terhadap alam. Hal ini bisa dilihat dengan jelas dalam aktivitas penebangan kayu, penggundulan hutan alam untuk pertambangan, pertanian, peternakan, dan pemukiman, baik secara legal maupun ilegal. Aktivitas tersebut telah menghancurkan vegetasi dan mengganggu wilayah resapan air hujan secara alamiah (Maring, 2006).

Berulang kali masyarakat mengalami ancaman banjir tetapi tetap bergeming. Ketamakan dan persaingan kolektif membuat kita terus merusak aliran sungai dan mengeksploitasi lingkungan alam. Kita enggan memelihara lingkungan karena tindakan itu dipandang tidak sejalan dengan kebiasaan umum. Kita terus membuang sampah ke sungai dan menyempitkan sungai/kali karena orang lain biasa melakukan itu. Kita takut kehilangan bagian dari sumberdaya alam. Tindakan memelihara lingkungan dipandang tidak populer. Pemerintah berkalah, banjir tahun-tahun terakhir ini lebih kecil dari banjir tahun 2007. Namun banjir tahun-tahun terakhir ini merontokkan terminologi "banjir kiriman" yang kerap menjadi pembelaan warga Jakarta dan penghakiman atas wilayah hulu. Banjir tahun-tahun terakhir ini memecah keamanan rutinitas warga Jakarta. Banjir mengacaukan jalan-jalan utama, menenggelamkan perumahan mewah, melumpuhkan pusat kegiatan ekonomi, menerobos ke istana negara, dan mengacaukan acara kenegaraan.

Akumulasi dari suburnya perilaku kompetitif, maraknya aksi ambil untung, dan lemah tata kelola membuahkan wajah bantaran Ciliwung yang kompleks, rumit, dan involutif. Bantaran Ciliwung dari hulu ke hilir bagai media/kanvas yang siap dilukis, yang diklaim sebagai sumberdaya bersama, yang menggiurkan banyak pihak untuk ambil bagian melukis sesuai selera masing-masing. Setiap pihak tidak hanya menjaga areal klaimnya dari serbuan pihak lain yang berdatangan, tetapi juga terus melukis pada bidang yang sama. Karena semua pihak menjalankan strategi dan taktik yang sama sehingga akhirnya wajah Ciliwung dipenuhi garis tumpang tindih, makin rumit, hingga akhirnya mandek, dan enggan berubah.

3. Bangun perilaku kolektif konstruktif

Ciliwung adalah panggung yang jujur mementaskan ulah kemanusiaan kita. Ia tidak kenal hukum dramaturgi, pentas belakang (*back stage*) dan pentas depan (*front stage*). Kebobrokan yang bekerja dalam pikiran terdalam dan tindakan tersembunyi pada tingkat individu, rumah tangga, dan institusi pemerintah, terpentas dalam panggung terbuka bernama "Ciliwung". Sampah yang berlimpah, air sungai yang berbau, dan luapan banjir ke mana-mana, adalah cermin pikiran, tindakan, dan wajah kemanusiaan kita. Di sini, pentingnya kita melihat ke dalam dan menata mental kita, bukan tergesa-gesa memoles dengan proyek fisik semata. Banjir yang menyisahkan lumpur tebal di permukiman adalah simbol ketamakan yang diperagakan manusia terhadap alam dan antarmanusia. Lumpur adalah anugerah bagi para petani di lereng gunung dan dataran persawahan. Lumpur adalah simbol kesuburan bagi kaum tani yang menghuni negara agraris ini. Tapi, kini ia menjadi petaka bagi manusia perkotaan yang kian menjauhkan diri dari tanah dan lumpur. Sekalipun banyak kaum urban masih mewarisi "darah" tani dari pedesaan, ia tidak mampu menghadapi dan mendayagunakan lumpur yang dikirim tiba-tiba. Lumpur memenuhi rumah dan membalut erat perabotan rumah warga (Maring, 2007).

Dalam tragedi banjir yang terjadi, paling tidak akan muncul dua pertanyaan berikut: Siapa yang paling dirugikan atau menjadi korban? Siapa yang paling bertanggung jawab atas tragedi ini? Pertanyaan ini selalu muncul sebagai reaksi atas peristiwa banjir atau longsor. Jika diperhatikan, kedua pertanyaan ini bertendensi meneropong keluar, melihat peran-peran yang berada di luar diri kita sendiri. Jawaban atas pertanyaan tersebut bisa menghasilkan daftar panjang kesalahan orang lain. Dalam konteks totalitas kesatuan komunitas ekosistem, cara pandang tersebut kurang efektif. Ia tidak membantu menyelesaikan kemerosotan lingkungan karena peristiwa seperti banjir dan longsor akan ditemukan sebagai hal yang berhubungan dengan perilaku orang lain dan terpisah dari perilaku kita sendiri (Maring, 2006).

Tragedi banjir mendorong kita melakukan refleksi untuk melihat korelasi antara berbagai bencana banjir dan longsor dengan perilaku kita. Proses ini diharapkan membantu membangun kesadaran bersama bahwa kita sedang menghadapi sebuah persoalan serius yaitu keringkahan alam yang akan mengancam kehidupan manusia. Tragedi ini adalah akibat tindakan kolektif, sistematis, berlangsung di berbagai tempat secara serentak, dalam skala kecil dan besar, dalam merusak alam. Untuk mengatasi masalah ini diperlukan kesadaran dan tindakan bersama yang didukung komitmen kuat dari pemerintah, baik di tingkat daerah maupun pusat. Dukungan kebijakan dan keputusan politik yang efektif dalam hal tata guna lahan, intervensi program secara terpadu, dan mobilisasi peran semua pihak harus dilakukan. Cara memandang sumber daya alam secara sempit dan terbatas pada batas wilayah administratif perlu dihindari. Karena banjir dan longsor tidak mengenal batas wilayah

administratif. Kerjasama lintas wilayah administratif dengan pendekatan pengelolaan kawasan secara terpadu perlu dibangun bersama (Maring, 2006).

Pengelolaan daerah aliran sungai perlu memperhitungkan semua aspek fisik, sosial budaya, ekonomi dan politik. Perlu pula diperkuat skema pembiayaan bersama dan distribusi manfaat secara adil antara daerah hulu dan hilir untuk kebutuhan konservasi. Kearifan masyarakat lokal dalam merawat alam sebagai totalitas komunitas ekologis perlu diapresiasi dan diperkuat. Ada bukti di mana masyarakat mampu menempatkan dirinya sebagai bagian integral dari alam dan berperilaku penuh tanggung jawab, peduli dan merawat alam lingkungannya. Meskipun ada kasus di mana kearifan itu hancur karena akibat kekuatan yang datang dari luar diri mereka. Mentalitas eksploitasi sumber daya alam yang melampaui daya dukung untuk tujuan ekonomi perlu dihindari. Di sisi lain usaha untuk internalisasi, pelebagaan kesadaran dan tindakan bio-konservasi secara bersama harus menjadi agenda serius.

Fenomena banjir rutin mestinya menyadarkan kita untuk membangun perilaku kolektif-konstruktif terhadap alam. Perilaku kolektif-konstruktif harus diwujudkan dalam aksi-aksi penanaman kembali atas lahan gundul, pemeliharaan bantaran sungai, normalisasi sungai/danau, pengolahan sampah, malu membuang sampah ke sungai, yang dilakukan secara kolektif untuk kepentingan bersama. Perilaku tersebut harus dipertontonkan secara kolektif di wilayah hulu dan hilir. Prakarsa kolektif-konstruktif terhadap alam sulit muncul dari mereka yang menjadi bagian benang kusut itu. Para korban banjir secara berulang kerap meratapi nasib tetapi enggan pindah. Para penguasa/ aparat yang berorientasi pada kekuasaan kerap mengaitkan penyelamatan lingkungan dengan nasib kekuasaannya. Para pengelola proyek infrastruktur kerap berpihak pada keuntungan pribadinya. Karenanya, membangun perilaku kolektif-konstruktif terhadap alam butuh kepemimpinan perilaku yang bisa bergerak pada proses politik dan aksi lapangan, dan memobilisasi dukungan anggaran, kerjasama lintas sektor/ wilayah, perencanaan terpadu, dan penegakan aturan secara konsisten.

C. KESIMPULAN

Kemandekan tata kelola bantaran sungai mendorong lahirnya perilaku kompetitif dan aksi ambil untung secara kolektif atas sumberdaya bantaran sungai. Kemandekan tata kelola terlihat dalam ketidakpastian pengaturan penguasaan sumberdaya, ketidakpastian penegakan aturan, dan tersendatnya penerapan program penataan bantaran sungai. Perilaku ambil untung secara kolektif terlihat dalam bentuk persaingan penguasaan sumberdaya, perampasan daerah aliran sungai, perilaku ambil untung, perilaku buang sampah, dan buruknya pengelolaan sampah. Hal ini memperkuat karakter bantaran sungai yang berciri terbuka dan menyerap kehadiran masyarakat secara berlebih di bantaran sungai.

Konstruksi struktur sosial komunitas bantaran sungai Ciliwung berciri heterogen dan tidak mencerminkan *dominant culture*. Struktur sosial heterogen tersebut sejalan dengan pola interaksi sosial yang dibangun pada tingkat intrakelompok/asal-usul dan pola interaksi antarkelompok/asal-usul. Pelajaran yang bisa ditarik dari proses membangun relasi-interaksi sosial yang dijalankan masyarakat bantaran sungai adalah lahirnya konstruksi struktur sosial yang berlapis-lapis, berulang, dan bertumpang-tindih peran sebagai respon terhadap realitas banjir yang berulang yang dihadapi masyarakat bantaran sungai. Struktur sosial yang dibangun selalu berorientasi pada fungsi-fungsi untuk saling membantu dan meringankan tekanan yang diakibatkan banjir.

Banjir yang terjadi secara berulang, di satu sisi mendorong masyarakat mengembangkan struktur sosial dan strategi sosialnya, tetapi pada sisi lain melahirkan cara pandang negatif atas sungai. Sungai tidak hanya dilihat sebagai *resources* yang harus diperlihara dan dirawat, tetapi sebagai sumberdaya yang diperebutkan. Konsepsi *public goods* yang harus dikelola secara baik berubah menjadi *public bads* di mana bantaran sungai dijadikan tempat pembuangan sampah, tindakan penyempitan aliran air, dan pendangkalan sungai. Bantaran sungai Ciliwung menjadi arena pertarungan, persaingan, dan perebutan sumberdaya yang diperagakan banyak pihak.

Untuk mengatasi kemandekan pembangunan bantaran sungai diperlukan proses kolektif untuk membangun perilaku konstruktif berupa aksi penanaman lahan gundul, pemeliharaan bantaran sungai, normalisasi sungai/danau, pengolahan sampah, dan memupuk rasa malu membuang sampah ke sungai. Perilaku tersebut harus dipelihara secara kolektif di wilayah hulu dan hilir oleh berbagai aktor seperti pemerintah, legislatif, tokoh masyarakat, pemuda, akademisi, aktivis lingkungan, dan masyarakat. Tragedi banjir bersumber dari menguatnya perilaku kompetitif dan aksi ambil untung secara berlebih atas sumberdaya. Banjir menimbulkan kerusakan fisik-materi luar biasa, namun tidak cukup diselesaikan melalui konstruksi fisik-materi semata. Penyelesaian tragedi banjir perlu memberi perhatian pada proses konstruksi perilaku kolektif-konstruktif terhadap alam.

Ucapan Terima Kasih

Terima kasih kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI yang membiayai penelitian melalui Keputusan Direktur Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Nomor 0263/E5/2014 tentang Penetapan Pemenang Hibah Penelitian Tahun 2014 dan ditindaklanjuti melalui Surat Perjanjian Pelaksanaan Hibah Penelitian bagi dosen perguruan Tinggi Swasta Kopertis Wilayah III Tahun Anggaran 2014 Nomor: 213//K3/KM/2014 Tanggal 7 Mei 2014.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifianto, S. dan Virhani, Mohan Rifqo, 2009. ***Informasi Bencana dan Budaya Lokal (Kasus Penanggulangan Banjir di Kelurahan Bukit Duri Jakarta Selatan)***. Puslit Aptel SKDI Balitbang Sumber Daya Manusia, DepKomInfo. Sumber: [http:// balitbang.kominfo.go.id/balitbang/aptika-ikp/files/2013/02/KAJIAN-BENCANA-BANJIR-JAKARTA.pdf](http://balitbang.kominfo.go.id/balitbang/aptika-ikp/files/2013/02/KAJIAN-BENCANA-BANJIR-JAKARTA.pdf). Akses: 4 Nopember 2014.
- Anonim, 2014. ***Komunitas Ciliwung Condet: Konservasi DAS Ciliwung***. Sumber: <http://komunitasciliwungcondet.blogspot.com>. Akses: 9 Nopember 2014.
- BPDAS Citarum-Ciliwung, 2009. ***Laporan Akhir Tahun: Penyusunan Rencana Detil Penanganan Banjir di Wilayah JABODETABEKJUR***. Kementerian Kehutanan, Ditjen RLPS, BPDAS Citarum-Ciliwung. Sumber: [http://bebasbanjir2025.wordpress.com/ konsep-pemerintah/bpdas-citarum-ciliwung/](http://bebasbanjir2025.wordpress.com/konsep-pemerintah/bpdas-citarum-ciliwung/). Akses: 4 Agustus 2014.
- BPS, 2012. ***Penduduk DKI Jakarta Berdasarkan Kecamatan***. Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta.
- Christanto, Joko, 2010. ***Strategi dan Rencana Aksi Pengembangan Pelayanan Sosial Perkotaan dalam Rangka Meningkatkan Daya Dukung di Kawasan di Wilayah DKI Jakarta***, Jurnal Ekosains, Vol. II No. 1, Maret 2010.
- Creswell, J. W., 2010. ***Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed***, Edisi Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Geertz, Clifford, 1963. *Agricultural Involution: The Process of Ecological Change in Indonesia*. Berkeley: University of California Press.
- Hardin, Garrett, 1968. "Tragedi Memanfaatkan Milik Umum" dalam David C. Korten dan Sjahrir, 1988 (Eds.), *Pembangunan Berdimensi Kerakyatan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Irawaty, Dian Tri, 2012. *Diskusi Normalisasi Sungai Ciliwung*. Sumber: rujak.org/2012/08/diskusi-normalisasi-sungai-ciliwung. Akses: 4 Agustus 2014.
- Karim, Mulyawan, 2007. *Banten dan Involusi Peradaban Kehidupan di Desa*. KOMPAS: 17 September 2007.
- Khasan, M., dan Widjanarko, M., 2012. *Perilaku Coping Masyarakat Menghadapi Banjir*. Jurnal Psikologi Pitutur, Volume I. Nomor 2, Juni 2012.
- Lipsky, Michael, 1980. *Street Level Bureaucracy: Dilemmas of the Individual in Public Services*. New York: Russel Sage Foundation
- Lubis, Zulkifli, 2005. *Kanalisis Ketegangan Etnik dan Kompetisi Budaya dalam Sektor Publik*, Jurnal Antropologi Sosial Budaya, ETNOVISI, Vol. 1, Nomor 2, Oktober 2005
- Maring, Prudensius, et al, 2014. *Potret Strategi Sosial Masyarakat Bantaran Sungai Ciliwung*. Artikel dalam proses penerbitan di Jurnal Ilmiah Komunitas, UNES, Semarang.
- _____, 2009. *"Involusi dan Transformasi Pertanian NTT: Sebuah Sudut Pandang Antropologi Ekologi"*. Orasi Ilmiah pada Dies Natalis Politeknik Pertanian Negeri Kupang.
- _____, 2007. *"Involusi Kekuasaan"*, Opini, Jakarta: Harian KOMPAS: 5 Juli 2007.
- _____, 2007. *"Banjir Berulang dan Jerat Kemiskinan"*, Opini, Jakarta: Harian Seputar Indonesia: 16/2/2007.
- _____, 2006. *"Banjir dan Perilaku Manusia"*, Opini, Jakarta: Harian Seputar Indonesia: 30/12/2006.
- Mikmah, Siti Khoirun, 2010. *Studi Sungai Ciliwung Pengabaian Pemerintah Terhadap Eksistensi Penduduk Pinggir Sungai: Wajah Pengelolaan Sungai di Indonesia*, Jakarta: INFID (*International NGO Forum on Indonesian Development*). Sumber: konservasidasciliwung.files.wordpress.com/2012/ 05. Akses: 4 Agustus 2014.
- Saifuddin, A. F., 2005. *Antropologi Kontemporer: Suatu Pengantar Kritis Mengenai Paradigma*. Jakarta: Prenada Media.
- _____, 2007. *Kemiskinan di Indonesia: Realitas di Balik Angka*. Orasi Ilmiah dalam rangka Pengukuhan Sebagai Guru Besar Antropologi FISIP UI, 24 Januari 2007. Universitas Indonesia.
- _____, 2009. *Refleksi Pemikiran Geertz: Involusi Pertanian, Involusi Kita*. Sumber: Kompas Cyber Media: www.duniaesai.com/antro. Akses 12 Oktober 2009.
- Suminar, Sri, dkk, 2011. *Strategi Penyusunan Pola Tata Komunitas Berbasis Partisipasi Masyarakat Bantaran Sungai Winongso*, Jurnal Penelitian BAPPEDA Kota Yogyakarta, No. 6 April 2011, ISSN 1978.0052.
- Suparlan, Parsudi, 2004. *Masyarakat dan Kebudayaan Perkotaan: Persektif Antropologi Perkotaan*, Yayasan Pengembangan Kajian Kepolisian.
- _____, 1999. *"Kemajemukan, Hipotesis Kebudayaan Dominan, dan Kesukubangsaan."* dalam Jurnal Antropologi Indonesia No. 58 Thn 1999.
- Tim Ekspedisi Ciliwung KOMPAS, 2009. *Ekspedisi Ciliwung: Laporan Jurnalistik Kompas*, Jakarta: Penerbit Kompas.

**PENTINGNYA KEPELOPORAN DAN PELOPOR LOKAL
UNTUK PENGEMBANGAN KOMUNITAS:
Sebuah Refleksi dari Kegiatan PPM Percontohan dan Jasa Produksi Bersih dan Ramah Lingkungan
Pengolahan Tempe Tahu di PIK KOPTI Jakarta Barat**

Oleh Edy Siswoyo^{*)}

ABSTRAK

Makalah ini adalah bagian dari laporan hasil Program Pengabdian Kepada Masyarakat mengenai Percontohan dan Jasa Produksi Bersih dan Ramah Lingkungan Pengolahan Tempe Tahu di Perkampungan Industri Kecil KOPTI Jakarta Barat Tahun 2013. Tujuan yang ingin dicapai dari program ini adalah 1) Proses dan hasil olahan produksi tempe tahu KOPTI Jakarta Barat yang memenuhi standar kesehatan dan komersial; 2) Sertifikat dari Badan POM terhadap produk tempe tahu KOPTI Semanan; 3) Kelompok mahasiswa STISIP Widuri yang siap trampil untuk mendampingi proses pemberdayaan dan kerjasama produksi tempe tahu KOPTI Jakarta Barat; 4) Kelompok mahasiswa STISIP Widuri yang siap trampil untuk mendampingi promosi dan pemasaran tempe tahu produk KOPTI Jakarta Barat. Pendekatan *Social Group Work* dan *Community Organization/Community Development* sebagaimana direncanakan semula, tidak dapat terlaksana sepenuhnya, melainkan harus dimodifikasi sesuai dengan kondisi empirik lapangan, di mana karakteristik ekonomi komunitas setempat adalah ekonomi subsisten, sudah merasa dalam zona nyaman sehingga ragu dan takut beranjak dari etika subsistensi ke etika korporasi modern. Proses sosial menuju perubahan sebagaimana diharapkan, tertolong dengan eksistensi dan kehadiran *laypersons* setempat. Signifikansi peran *laypersons* atau *layman* atau *active actor* sebagai pelopor pembaruan dan perubahan sosial komunitas lokal ini menjadi lebih nyata manakala di lingkungan setempat juga hadir akademisi ataupun praktisi profesional yang mendampinginya.

Kata Kunci:

pendekatan kelompok, organisasi komunitas, pengembangan komunitas, orang awam, aktor aktivis, pionir, perubahan sosial dan reformasi, komunitas-komunitas lokal.

ABSTRACT

This paper is part of a report on the Community Services Programs and Services Pilot on Cleaner Production and Sustainable Soybean Processing in Small Industries KOPTI Village West Jakarta Year 2013. The objectives of this program are 1) Process and processed soybean production meet health standards and commercial; 2) Health Food Certificate of soybean products; 3) The group of students are ready to assist the process of empowerment and cooperation on soybean production; 4) The group of students are ready to assist the promotion and marketing of the soybean product. Social Group Work and Community Organization/Community Development Approach as planned, can not be fully implemented, it should be modified in accordance with the empirical field conditions, where the characteristics of the local community economy is a subsistence economy, already feel the comfort zone so hesitant and afraid to move on ethics subsistence to a modern corporate ethics. Social process towards change as expected, are helped by the existence and presence of local lay persons. The significance of the role of lay persons or lay man or active actor as a pioneer of reform and social change in local communities have become more apparent when the local environment is also present academic or professional practitioners as an escort.

Key Words:

Social Group Work, Community Organization, Community Development, lay persons/ lay man, active actor, pioneer, reform and social change, local communities.

^{*)} Lektor Kepala, Dosen PNS Dpk di STISIP Widuri, dan Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat (PPPM) STISIP Widuri.

A. LATAR BELAKANG

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini² dilaksanakan sebagai tindak lanjut hasil penelitian Hibah Bersaing tentang Intensitas Praktik Ramah Lingkungan Usaha Kecil Produksi Tempe Tahu di PIK KOPTI Semanan Jakarta Barat 2009³.

Hasil penelitian tahun 2009 tersebut menunjukkan bahwa kegiatan industri kecil tempe tahu di Perkampungan Industri Kecil (PIK) KOPTI Swakerta Semanan Jakarta Barat sama sekali tidak dapat dikategorikan sebagai kegiatan industri kecil ramah lingkungan walaupun sudah ada usaha ke arah itu. Pada umumnya warga lingkungan penelitian khususnya para perajin tempe tahu, meskipun berada di dalam satu sentra pembinaan, namun secara empirik intensitas ramah lingkungan pada masing-masing unit usaha tampak bervariasi, mulai dari yang konsisten untuk tetap ramah lingkungan, ramah lingkungan temporer saja, dan sama sekali kembali tidak ramah lingkungan. Walaupun demikian, temuan penelitian juga menunjukkan bahwa komunitas setempat pada dasarnya dapat diarahkan dan siap dibina untuk melakukan kegiatan produksi ramah lingkungan. Hanya saja, model pembinaan yang diharapkan oleh komunitas setempat adalah pembinaan yang bersifat persuasif, fasilitatif dan dengan percontohan yang tuntas.

Keadaan tersebut disadari betul oleh para pengurus dan pelaku usaha setempat. Beruntung pengurus koperasi mempunyai aspirasi yang cukup besar untuk mewujudkan prinsip produksi ramah lingkungan. Tiada hentinya mereka berusaha keras mencari cara baru agar kegiatan produksi mereka dapat memenuhi standar ramah lingkungan baik dari segi pengelolaan limbahnya maupun pada proses produksinya.

Mengenai proses produksi, pengurus bersepakat membangun sebuah rumah percontohan kegiatan produksi bersih dan ramah lingkungan untuk pengolahan dan pengemasan tempe tahu khas KOPTI Jakarta Barat. Rumah percontohan ini direncanakan juga akan berfungsi sebagai rumah jasa produksi dan pengemasan tempe tahu bagi para produsen anggota KOPTI setempat, sehingga rumah tinggal mereka akan benar-benar berfungsi sebagai rumah tinggal yang bersih dan sehat.

Proses pembangunan dan pengadaan peralatan yang diperlukan sudah dimulai sejak tahun 2011 dan diharapkan dapat beroperasi pada awal tahun 2012. Saat ini bangunan sudah berdiri namun belum selesai, dan bantuan peralatan teknis sudah diperoleh namun belum lengkap. Sementara itu para anggota/warga setempat tetap sibuk dengan kegiatan produksinya di rumah masing-masing, dan tidak ada indikasi untuk ikut memikirkan atau berperan serta pada proyek rumah percontohan tersebut.

Untuk itulah pengurus KOPTI Jakarta Barat mengajukan surat permohonan kepada P3M STISIP Widuri untuk memperoleh bantuan pengusaha pendanaan, pendampingan dan pembinaan secara berkesinambungan dengan memanfaatkan sumber-sumber yang ada, melalui kegiatan Pengabdian pada Masyarakat sebagai kelanjutan dari penelitian Hibah Bersaing yang lalu.

² DIPA Dit. Litabmas Dikti 092/SP2H/KPM/DIT.LITABMAS/V/2013,BAP No. 092/BAP/ KPM/VIII/2013

³ DIPA Dit. Litabmas Dikti No. 0868.0/023-04.1/-/2009.

B. ANALISIS SITUASI

Perkampungan Industri Kecil Primer Koperasi Tahu-Tempe Indonesia (PIK PRIMKOPTI) Swakerta Semanan RW 011 Kelurahan Semanan, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat pada dasarnya merupakan: 1) satu-satunya sentra yang secara fisik direncanakan untuk memenuhi syarat ramah lingkungan, sementara sentra yang lain tidak karena sudah terlanjur tumbuh bersama pemukiman penduduk; 2) merupakan sentra industri tempe tahu dengan jumlah unit usaha terbanyak; 3) meskipun berada di dalam satu sentra pembinaan, namun secara empirik intensitas ramah lingkungan pada masing-masing unit usaha tampak bervariasi, mulai dari yang konsisten untuk tetap ramah lingkungan, ramah lingkungan temporer saja, dan sama sekali kembali tidak ramah lingkungan. Gambaran umumnya sebagai berikut:

- Dari aspek bahan baku, semula mereka kurang begitu memahami bahwa bahan-bahan kimia yang mereka campurkan untuk proses produksi sesungguhnya berbahaya bagi kesehatan konsumen. Bahaya dari penggunaan bahan-bahan kimia tersebut mereka sadari belakangan setelah pemerintah dan media masa menayangkan bahaya jangka panjang penggunaan bahan-bahan tersebut. Akan tetapi yang mereka mengerti adalah bahwa bahan-bahan yang mereka pergunakan dalam proses produksi itu adalah bahan-bahan yang lazim; walaupun beracun namun tidak membahayakan jika takarannya kira-kira pas dan hasilnya enak dimakan. Di samping itu mereka juga mempertanyakan jika bahan-bahan tersebut berbahaya dan beracun, mengapa dijual bebas. Mereka tidak sempat memikirkan dan sengaja tidak mempedulikan peringatan bahaya jangka panjang atas penggunaan bahan-bahan beracun tersebut. Yang lebih banyak mereka pikirkan adalah keuntungan untuk menutup modal dan memenuhi kebutuhan sehari-hari, apapun caranya.
- Dari aspek penggunaan air. Unit-unit produksi pada umumnya tidak memiliki sumber air atau sumur sendiri. Kebutuhan air untuk produksi adalah bersumber dari tiga sumur air tanah yang dikelola oleh pengurus lingkungan maupun oleh perorangan yang melayani tetangga sekitar. Tiap unit usaha cenderung sering tidak dapat mengontrol penggunaan air untuk produksi karena penyaluran air dari sumber ke unit produksi tidak mempergunakan meteran. Yang harus mengontrol penggunaan air adalah pemilik sumur, yaitu dengan cara membuka atau menutup kran-kran distribusi. Dalam hal ini pemilik sumur hanya membuka pada jam-jam produksi saja, pagi sampai dengan sore. Jika pemilik lupa menutup kran, penggunaan air cenderung menjadi boros dan menyimpang, misalnya untuk mencuci motor atau menyiram jalan.
- Dari aspek penanganan limbah padat khususnya kulit dari kedelai; pada umumnya para perajin sudah memperoleh informasi mengenai pemanfaatannya untuk diolah kembali menjadi produk yang lebih bernilai. Namun mereka memilih untuk memanfaatkan limbah tersebut untuk pakan ternak dengan alasan tidak repot. Tanpa disadari bahwa tindakan tersebut adalah ekologis (menguntungkan ternak) dan ekonomis (ternak menguntungkan pemilik).
- Dari aspek penanganan sampah, yang dalam hal ini adalah sampah rumah tangga, penulis melihat adanya perkembangan tata-kelola. Semula sampah rumah tangga dikumpulkan di sudut kawasan yang kemudian secara berkala diangkut oleh petugas dari Dinas Kebersihan Pemda Jakarta Barat. Di tempat penampungan tersebut sampah dikumpulkan begitu saja tanpa ada warga yang merapikan dan mudah berserakan karena tertiuip angin. Di kemudian hari koperasi memperoleh alat pengepres sampah bantuan dari Pemda Jakarta

Barat. Kawasan Depo menjadi bersih karena sampah domestik langsung masuk ke mesin pengepres sampah. Mesin tersebut dioperasikan setiap sore hari oleh petugas tetap dari warga setempat. Kemudian dengan waktu yang lebih jarang, petugas dari Dinas Kebersihan mengambil sampah yang sudah dipres tersebut. Proposisi konseptual yang dapat dirumuskan dari kenyataan empirik tersebut adalah bahwa perubahan perilaku sebuah komunitas dapat terjadi karena dukungan atau intervensi eksternal, sementara pihak eksternal sendiri memperoleh keuntungan dari perubahan tersebut, baik keuntungan prestise maupun ekonomis.

- Dari aspek penanganan air limbah, temuan menunjukkan bahwa sejak dari tempat usaha semula para perajin tidak memiliki kebiasaan dan kemampuan untuk mengolah air limbah sendiri-sendiri sebelum limbah tersebut dibuang ke saluran umum. Setelah mereka pindah di satu kompleks, dan dengan tersedianya lahan yang cukup untuk pengolahan air limbah, dan dengan terbentuknya kepengurusan lingkungan, serta dengan bantuan Pemda setempat, dan pada akhirnya juga memperoleh dukungan dari warga masyarakat sekitar, maka mereka dimungkinkan untuk mampu mengelola limbah air secara bergotong-royong dan terkoordinasi. Proposisi konseptual yang dapat dikonstruksi berdasarkan temuan empirik tersebut adalah bahwa praktik ramah lingkungan dimungkinkan dapat dilakukan secara kolektif, terkoordinasi, memperoleh dukungan dari pengusaha (mewakili *state*) dan sekaligus memperoleh dukungan dari warga sekitar (mewakili *society*).
- Dari aspek penggunaan energi, kegiatan usaha cenderung ekonomis; sedikit mungkin mempergunakan listrik, minyak tanah dan gas. Proses pemecahan kedelai pada umumnya dilakukan secara manual dengan mempergunakan tenaga manusia. Perebusan dan penggorengan dengan mempergunakan bahan bakar kayu limbah bangunan atau bekas peti kemas.
- Dari aspek keselamatan dan kesehatan tempat produksi: karena pengutamaan pada aspek ekonomis itulah maka para perajin menjadi tidak memperhatikan pentingnya kesehatan dan keselamatan kerja. Proses produksi tidak higienis, tidak memperhatikan kesehatan dan keselamatan pekerja dan juga tidak memperhatikan estetika dan kesehatan. Dengan demikian proposisi konseptual yang berlaku di lingkungan penelitian adalah bahwa motivasi ekonomi dari kegiatan usaha cenderung sengaja mengorbankan estetika dan kesehatan.

Namun secara kolektif, para perajin dapat diarahkan untuk bersedia melakukan kegiatan produksi ramah lingkungan. Penjelasan yang dapat dikemukakan dalam hal ini adalah:

- 1) Adanya usaha bersama, koordinasi dan bantuan ketersediaan lahan dan bantuan peralatan. Bagi warga PIK KOPTI Semanan, kegiatan produksi ramah lingkungan memang merupakan kegiatan pembelajaran baru begitu mereka berada di lokasi PIK-KOPTI Semanan. Dalam mencoba mengatasi masalah bau air limbah tersebut, warga atau masing-masing unit usaha di PIK-KOPTI Semanan tidak mampu melakukannya sendiri-sendiri, tetapi mereka perlu melakukannya bersama-sama dengan fasilitas dari koperasi, dikoordinasi oleh pengurus koperasi sekaligus pengurus lingkungan setempat. Usaha bersama yang dilakukan adalah membuat satu dapur umum dan kolam komunal untuk penampungan air limbah produksi. Kolam komunal tersebut dimaksudkan untuk menampung air limbah produksi baik dari dapur umum maupun dari masing-masing rumah tangga unit produksi. Dapur umum dan kolam penampungan air limbah produksi tersebut dibangun terpisah dari masing-masing rumah produksi. Lahan untuk lokasi dapur umum dan kolam

penampungan air limbah tersebut adalah milik koperasi. Sedangkan peralatan untuk keberfungsian kolam tersebut seperti mesin *blower* dan mesin pompa air artesis adalah sumbangan Pemda. Demikian juga lahan untuk tempat penampungan limbah padat termasuk sampah domestik, disediakan oleh koperasi. Peralatan berupa mesin pengepres sampah adalah bantuan Pemda.

- 2) Adanya bantuan teknis dari kompleks pemukiman lain yang berkepentingan terhadap penanganan saluran buangan limbah air. Ini adalah bentuk reaksi yang sama sekali berbeda dengan reaksi protes. Jika reaksi protes sudah cukup mendorong warga PIK KOPTI Semanan untuk menyadari perlunya mengelola limbah dengan baik, maka bantuan teknis itu telah memberikan pembelajaran yang lebih konkret dalam bentuk praktek. Warga PIK KOPTI Semanan cenderung akomodatif terhadap bantuan-bantuan jenis konkret dan praktis, seperti juga yang berikut ini.
- 3) Adanya bantuan teknis dan pembiayaan dari Pemerintah untuk meningkatkan keberfungsian kolam penampungan air limbah sebagai instalasi pengolahan limbah. Kolam yang dibuat tersebut pada mulanya hanya sekedar penampungan air limbah saja, yang makin lama makin berbau menyengat, yang pada akhirnya menimbulkan beberapa kali protes dari warga sekitar. Lalu dengan bantuan pendanaan, teknis dan peningkatan kapasitas lokal yang dilakukan oleh Pemda yang dalam hal ini adalah BPLH DKI dan Dinas PU DKI, kolam penampungan tersebut dikembangkan menjadi IPAL.
- 4) Adanya bantuan pemantauan dan secara rutin dari instansi pemerintah. Secara berkala pengurus lingkungan yang dalam hal ini juga pengurus koperasi, bersama dengan tim-nya dan juga bersama dengan petugas dari Pemda melakukan pemantauan terhadap keberfungsian IPAL, termasuk perawatan terhadap peralatan IPAL. Pemantauan dan bantuan perawatan secara rutin juga dilakukan terhadap alat pengepres sampah.
- 5) Eksistensi komunitas PIK KOPTI Semanan dengan kegiatan pembelajarannya untuk melakukan produksi ramah lingkungan juga memperoleh dukungan dari beberapa civitas Perguruan Tinggi yang melaksanakan kegiatan Pengabdian pada Masyarakat di kawasan tersebut. Tema-tema yang dilaksanakan dalam kegiatan tersebut antara lain tentang manajemen produksi, produksi sehat dan aman, penghematan listrik dan konservasi air, di samping bakti sosial yang berupa dokter dan pengobatan gratis.
- 6) Kesiadaan para perajin untuk belajar dan mengambil bagian dalam mencoba melakukan prinsip-prinsip produksi ramah lingkungan. Kesiadaan ini lebih banyak berhubungan dengan rasa "kewajiban" yang ditanamkan pengurus lingkungan kepada para warga. Dalam hal ini pengurus lingkungan melakukan kontrol yang ketat terhadap partisipasi warga dalam melaksanakan prinsip-prinsip produksi ramah lingkungan. Dalam kegiatan pembinaan dan penyuluhan, lembaga penyelenggara menyediakan konsumsi; dan jika penyelenggaraan kegiatan itu dilakukan di luar kawasan PIK KOPTI Semanan maka penyelenggara menyediakan juga akomodasi, transportasi, bahkan uang transport.
- 7) Unit-unit produksi berada dalam satu lingkungan pemukiman yang sama dengan peruntukan khusus bagi kegiatan produksi tahu tempe. Ini mempermudah penanganan limbah, artinya: IPAL dapat dibuat secara kolektif sehingga masing-masing unit usaha tidak perlu memiliki atau membuatnya sendiri-sendiri; pengelolaan IPAL dapat dikerjakan oleh kelompok khusus yaitu warga setempat yang telah memperoleh pelatihan seperlunya, sehingga masing-masing pemilik usaha tidak perlu ikut bekerja mengurus IPAL tersebut melainkan cukup berpartisipasi melalui iuran.

- 8) Struktur komunitas yang khas. Tanda-tanda sebagai komunitas berstruktur sosial tunggal adalah persamaan daerah asal, kebiasaan, lapangan pekerjaan, bahasa, tinggal di wilayah geografis yang relatif tertutup dalam arti dikhususkan untuk perajin tahu tempe asal Pekalongan saja, jumlahnya juga tidak terlalu besar, wilayah teritorialnya juga tidak terlalu luas, namun memiliki beberapa fasilitas bersama seperti masjid, sekolah, mobil ambulan dan lahan yang cukup untuk pengolahan sampah dan limbah produksi; dan eksistensinya disadari dan diakui oleh pihak luar. Akan tetapi sebagai sebuah organisasi formal, yaitu koperasi, masing-masing komponen di dalam komunitas PIK KOPTI Swakarta Semanan memiliki status dan peran yang jelas, diferensiasi tinggi. Hal itu bukanlah ciri struktur sosial tunggal. Koperasi juga membentuk RT/RW sendiri, dan mulai menerima orang luar dengan usaha kecil selain tempe tahu untuk berdomisili di kawasan PIK KOPTI Swakarta Semanan dan tidak perlu menjadi anggota Koperasi. Dengan demikian komunitas PIK KOPTI Swakarta Semanan juga memiliki tanda-tanda sebagai komunitas berstruktur sosial majemuk. Lebih dari itu di dalam struktur sosial komunitas PIK KOPTI Semanan terdapat fungsi *lay persons* yang sanggup menjadi pelopor yang menggerakkan warga untuk peduli pengolahan limbah secara bersama dan memiliki akses ke beberapa sumber pembinaan lingkungan.
- 9) Dari musyawarah antara Pengurus dan Anggota pada tanggal 28 Oktober 2009 yang difasilitasi oleh P3M STISIP Widuri, menghasilkan kesepakatan bahwa Kelompok Pengurus akan memanfaatkan dan mengusahakan sumber-sumber yang dimungkinkan membangun rumah percontohan yang juga berfungsi sebagai pabrik bersama.
- 10) Proses pembangunan dan pengadaan peralatan yang diperlukan sudah dimulai sejak tahun 2011 dan diharapkan dapat beroperasi pada awal tahun 2012. Saat ini bangunan sudah berdiri namun belum selesai, dan bantuan peralatan teknis yang diperlukan sudah diperoleh namun belum lengkap.

C. PRIORITAS PERMASALAHAN

- 1) Proses dan hasil olahan produksi tempe tahu KOPTI Jakarta Barat yang memenuhi standar kesehatan dan komersial.
- 2) Belum ada sertifikat dari Badan POM terhadap produk tempe tahu KOPTI Semanan
- 3) Pengurus cenderung berjalan sendiri, dalam arti:
 - a. Belum ada mitra independen yang mendampingi proses-proses pemberdayaan dan penggalangan kerjasama.
 - b. Belum ada mitra independen yang mendampingi kegiatan promosi dan pemasaran tempe tahu percontohan produk KOPTI Jakarta Barat.

D. STRATEGI DAN METODE SOLUSI YANG DISEPAKATI

Sesuai dengan kapasitas STISIP Widuri yang mengasuh Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial dan Program Studi Ilmu Komunikasi, dan sesuai dengan kesepakatan antara Ketua P3M dan Pengurus KOPTI Jakarta Barat, maka strategi utama untuk pemecahan permasalahan tersebut adalah memberikan pendampingan guna

peningkatan kapasitas pengurus melalui pembentukan atau penguatan kelompok pelopor dan percontohan agar:

- 1) Mampu menggalang sumber-sumber yang dapat membantu menyelesaikan bangunan rumah percontohan guna pengoperasian peralatan yang sudah ada untuk melakukan kegiatan produksi dengan proses dan hasil yang memenuhi standar kesehatan dan komersial.
- 2) Mampu memperoleh sertifikat dari Badan POM atas produk tempe tahu yang dihasilkan oleh kelompok pelopor/rumah percontohan.
- 3) Mampu melakukan kegiatan promosi dan pemasaran produk tempe tahu hasil dari rumah percontohan.
- 4) Mampu memperoleh dukungan dan peran serta seluruh anggota/warga PIK KOPTI Jakarta Barat, agar pengurus bersama seluruh anggota/warga PIK KOPTI Jakarta Barat dapat mendukung kegiatan kelompok/ rumah percontohan.

Pemberian pendampingan ini dilakukan oleh Tim Pengabdian Pada Masyarakat (PPM) STISIP Widuri dengan melibatkan Dosen dan Mahasiswa dari kedua program studi tersebut⁴. Sesuai dengan *core competence* STISIP Widuri yang mengedepankan pada kompetensi bidang *Social Work Intervention* (Intervensi Pekerjaan Sosial), maka metode dasar yang dipergunakan dalam proses pengabdian pada masyarakat ini adalah Metode Intervensi Pekerjaan Sosial. Karena kegiatan pengabdian pada masyarakat ini bekerja dengan kelompok dan komunitas, maka metode intervensi yang relevan adalah Metode Intervensi Pekerjaan Sosial untuk Kelompok dan Komunitas, atau yang lebih dikenal dengan *Social Group Work* dan *Community Organization / Community Development*.

Dengan meminjam prinsip Metode Intervensi Sosial untuk Kelompok dan Komunitas, dalam rangka pendampingan guna peningkatan kapasitas pengurus melalui pembentukan atau penguatan kelompok pelopor dan percontohan ini. Dengan berbagai kekurangan dan keterbatasan, tim PPM STISIP Widuri mencoba mengikuti prosedur sebagai berikut:

- a. Memahami kembali masalah melalui penelitian aksi partisipatoris, asesmen kebutuhan, evaluasi pemberdayaan, dan demistifikasi.
- b. Memahami kembali populasi melalui studi literatur dan dokumen.
- c. Memahami masyarakat berfokus pada populasi sasaran, identifikasi karakteristik, identifikasi perbedaan-perbedaan, dan identifikasi struktur sosial.
- d. Memahami kembali organisasi: analisis lingkungan organisasi: pelanggan (distributor dan pengguna), pemasok, tenaga kerja, modal, peralatan dan tempat kerja, kompetitor, kelompok-kelompok pembuat keputusan seperti pemerintah, serikat kerja dan asosiasi-asosiasi; serta analisis elemen-elemen internal organisasi.
- e. Membangun dukungan dengan mengembangkan hipotesis etiologi dan intervensi, mendefinisikan partisipan, menguji kesiapan sistem untuk berubah, dan menyeleksi pendekatan perubahan.

⁴ Tim Dosen adalah Dr.Edy Siswoyo, MA; Nelson H. Parapat; Dra.MM. Sri Dwiyantari, MSi; dan 5 orang mahasiswa Prodi Komunikasi dan 5 orang mahasiswa Prodi Ilmu Kesejahteraan Sosial.

- f. Bersama-sama pengurus dan beberapa tokoh masyarakat setempat, tim menetapkan strategi dan taktik dengan pertimbangan-pertimbangan politik dan interpersonal, pertimbangan sumber, bandingkan kemungkinan keberhasilan dan kegagalan, lalu pilih strategi dan taktik: kolaborasi, kampanye atau kontes.
- g. Bersama-sama pengurus dan beberapa tokoh masyarakat setempat, tim merancang Program dengan merumuskan nama program, menyatakan tujuan-tujuan hasil, menyatakan tujuan-tujuan proses, mengidentifikasi kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dan mengembangkan rencana aksi.
- h. Monitoring terhadap kegiatan-kegiatan teknis dan kegiatan-kegiatan interpersonal.
- i. Evaluasi terhadap hasil yang telah dinyatakan dalam rencana.

E. TARGET LUARAN

- 1) Proses dan hasil olahan produksi tempe tahu KOPTI Jakarta Barat yang memenuhi standar kesehatan dan komersial.
- 2) Sertifikat dari Badan POM terhadap produk tempe tahu KOPTI Semanan.
- 3) Kelompok mahasiswa STISIP Widuri yang siap terampil untuk mendampingi proses pemberdayaan dan kerjasama produksi tempe tahu KOPTI Jakarta Barat.
- 4) Kelompok mahasiswa STISIP Widuri yang siap terampil untuk mendampingi promosi dan pemasaran tempe tahu produk KOPTI Jakarta Barat.

F. KEGIATAN DAN HASIL SEMENTARA

- 1) Pendekatan *Social Group Work* dan *Community Organization / Community Development* sebagaimana direncanakan semula, tidak dapat terlaksana sepenuhnya, melainkan harus dimodifikasi sesuai dengan kondisi empirik lapangan:
 - a. Tidak semua pemilik/ pelaku usaha dapat mengikuti pertemuan-pertemuan sosialisasi, yang menurut pengurus KOPTI setempat adalah karena tidak memiliki waktu lagi diluar kegiatan produksi dan kegiatan rumah tangga / keluarga.
 - b. Sudah merasa mapan dan cukup, sehingga tidak perlu lagi ikut-ikutan dan lebih-lebih menjadi pelopor dalam meningkatkan kualitas dan diversifikasi produksi.
 - c. Karena itu kegiatan pertemuan-pertemuan sosialisasi hanya dihadiri oleh beberapa orang sebagai perwakilan dari keseluruhan. Kehadiran mereka ini pun agak dipaksa oleh pengurus KOPTI setempat.
- 2) Dari proses yang berjalan, pada akhirnya dapat disepakati 3 mitra yang bersedia terlibat secara aktif dan kontinyu sebagai representasi dari keseluruhan warga komunitas PIK-KOPTI Semanan.
- 3) Persoalan Mitra dan Kegiatan untuk Solusi:
 - a. Mitra 1: Operator TPS Sampah PIK-KOPTI Swakerta Jakarta Barat:
 - Kendala Teknologi:

- ✓ Belum memiliki teknologi/metode menghilangkan bau limbah, khususnya limbah cair dari pencucian kedelai dan juga bau dari sampah domestik.
 - ✓ Belum memiliki teknologi yang diperlukan untuk pengolahan sampah menjadi produk yang lebih bernilai ekonomis dan sekaligus ramah lingkungan, yaitu teknologi pupuk organik, terutama mesin perajang sampah.
 - Kegiatan Solusi melalui Percontohan dan Pelatihan untuk Operator TPA:
 - ✓ Reproduksi/ternak Nitrobacter
 - ✓ Penggunaan Nitrobacter untuk menghilangkan bau limbah cair dan untuk ternak ikan
 - ✓ Perajangan sampah organik
 - ✓ Penggunaan Nitrobacter untuk mengubah sampah organik menjadi pupuk organik.
 - Hasil Kegiatan: Menjelang akhir kegiatan PPP, para petugas operator SPS Sampah PIK KOPTI Semanan sudah mampu:
 - ✓ Membiakkan sendiri nitrobacter untuk pengolahan sampah menjadi kompos.
 - ✓ Mempergunakan nitrobacter tersebut untuk mengolah sampah menjadi kompos.
 - ✓ Karena kegiatannya masih dalam taraf latihan dan percobaan, kelompok belum dapat mengkalkulasi dengan baik pembiayaan dan harga jual kompos yang dihasilkan.
- b. Mitra 2: Usaha Pengolahan Kripik Tempe:
- Kendala Teknologi:
 - ✓ Hasil pengolahan tempe kripik masih terlalu banyak minyak.
 - ✓ Usaha pengeringan memerlukan mesin *spinner* pengering produk makanan gorengan.
 - Manajemen Pemasaran:
 - ✓ Cenderung dipasarkan sendiri.
 - ✓ Memerlukan seorang agen pemasaran.distrobutor
 - Hukum:
 - ✓ Belum memiliki sertifikat/tanda daftar industry dan belum memiliki NPWP usaha.
 - ✓ Perlu dibimbing setidaknya memiliki Sertifikat Pendaftaran Industri Pengolahan Skala Rumah Tangga (P-IRT)
 - Kegiatan Percontohan dan Pelatihan serta pendampingan bagi Usaha Kripik Tempe:
 - ✓ Penggunaan mesin spinner pengering minyak untuk menghasilkan tempe kripik yang lebih kering.
 - ✓ Pendampingan pengurusan NPWP, UUG, STDI dan SIUP
 - ✓ Pendampingan pengurusan sertifikat P-IRT (Perusahaan Industri Rumah Tangga)
 - ✓ Pendampingan cara distribusi dan keagenan.
 - Hasil yang dicapai adalah:
 - ✓ Kripik yang dihasilkan sudah lebih kering, tidak terlalu basah oleh minyak goreng.
 - ✓ Kemasan sudah rapat walaupun belum vacuum, tetapi cukup mampu membuat produk dapat lebih tahan lama tanpa berubah bau, warna dan rasa.

- ✓ Produk berhasil memperoleh P-IRT dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Jakarta Barat.
 - ✓ Volume produksi meningkat dari tidak menentu menjadi dapat menghabiskan 20 kg kedelai per hari.
- c. Mitra 3: Kerajinan Tas dan Dompot Daur Ulang Limbah:
- Kendala Teknologi:
 - ✓ Jumlah mesin kurang mencukupi target volume produksi untuk memenuhi permintaan pasar dari kalangan masyarakat kelas bawah.
 - ✓ Perlu bantuan penambahan mesin jahit dan bimbingan model khusus untuk masyarakat kelas bawah
 - Kegiatan Percontohan Model Tas dan Dompot:
 - ✓ Penggunaan mesin jahit kulit untuk produksi kerajinan dompet dan tas.
 - ✓ Pendampingan cara distribusi dan keagenan.
 - Hasil yang dicapai:
 - ✓ Jumlah tenaga kerja bertambah dari 3 orang menjadi empat orang.
 - ✓ Volume produksi khususnya dompet meningkat dari 75 lusin perminggu menjadi 100 lusin.
- d. Rencana Rencana Rumah Tempe (Jakarta Soy Senter):
- Kendala
 - ✓ Pendanaan.
 - ✓ Kemampuan dan Keberanian Pengelolaan Dana.
 - Pendampingan Komunikasi dan Penggalangan Bantuan Pemerintah Daerah.
 - Hasil yang dicapai:
 - ✓ Komitmen Pemprov. DKI untuk menyediakan pendanaannya.
 - ✓ Pengurus KOPTI justru masih ragu-ragu bahkan takut apakah mampu mengelola dana tersebut.

G. DISKUSI DAN REFLEKSI TEORETIK

- 1) Pendekatan *Social Group Work* dan *Community Organization / Community Development* sebagaimana direncanakan semula, tidak dapat terlaksana sepenuhnya, melainkan harus dimodifikasi sesuai dengan kondisi empirik lapangan.

Sebagaimana kenyataan empirik di lapangan, kegiatan bersama kelompok hanya dapat dilakukan pada awal-awal saja. Selanjutnya kegiatan berjalan lebih didominasi oleh kegiatan individu aktivis tanpa atau lebih tepatnya belum diikuti oleh anggota kelompoknya. Kelompok dan bahkan komunitas cenderung pasif, namun menginginkan dan memperoleh manfaat dari peran individu aktivis tersebut; kelompok atau komunitas cenderung terima bersih dari hasil yang dilakukan oleh individu tersebut. Dengan kata lain kegiatan tidak lagi mengikuti kaidah-kaidah metodologis sebagaimana direncanakan. Jadi, seperti yang pernah disampaikan oleh Giddens (Turner 1998:491-502), bahwa di dalam sosiologi tidak pernah ada dalil-dalil yang bersifat universal atau tidak terikat oleh waktu sebagaimana pada ilmu alam dan biologi. Hal ini karena manusia pada

dasarnya memiliki kapasitas untuk keagenan, sehingga dapat melakukan perubahan terhadap organisasi sosial, dan karenanya dapat menolak dalil-dalil yang sebelumnya dianggap universal. Salah satu argumen Giddens adalah bahwa proses sosial dapat dikerjakan oleh *lay persons* yaitu orang-orang awam yang tidak perlu merupakan agen resmi atau profesional untuk perubahan, namun memiliki kapasitas kepoloporan yang dapat memodifikasi proses-proses sosial tersebut. Bekal yang dimiliki oleh para *lay persons* tersebut adalah struktur yang sudah ada. Akan tetapi yang dimaksud dengan struktur menurut konseptualisasi Giddens adalah *aturan-aturan* dan *sumber-sumber* yang dimanfaatkan oleh para aktor dalam konteks interaksi. Meskipun Giddens tidak mengatakannya secara eksplisit, namun kandungan karakteristik *uncertain* pada proses sosial dalam sosiologi Giddens adalah sangat terasa.

Penjelasan Giddens mengenai peran aktivis dalam lingkup mikro tampaknya melengkapi penjelasan Etzioni (1967:173-187) mengenai peran *the active actor* dalam ikut memobilisasi proses sosial. Dalam kerangka sosiologi makro, Etzioni menyebutkan pentingnya peran kepoloporan kaum profesional berpendidikan tinggi dalam ikut memberikan arahan dan intervensi untuk perubahan sosial.

- 2) Etos kerja kekeluargaan adalah zona nyaman, walaupun subsisten, dan Pengurus KOPTI ragu dan takut beranjak dari etika subsistensi ke etika korporasi modern; lebih-lebih para anggotanya.

Mengenai etika subsistensi ini ADB mengidentifikasi adanya dua jenis UMK, yaitu yang bersifat "*survival*" atau sama dengan "*subsistence*", dan yang bersifat "*viable*" (ADB 1997:27-36). Konsep subsistensi pada dasarnya adalah sama dengan konsep subsistensi yang dikemukakan oleh James C. Scot mengenai moral ekonomi petani di Asia Tenggara (LP3ES 1981) dan Hans Dieter Evers produksi *massa apung* di Jakarta (PRISMA VIII-Juni 1980). Dalam hal ini konsep subsistensi dipakai untuk menunjuk kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh golongan miskin adalah hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan hidup minimal. Produksi pertanian di pedesaan dan barang maupun jasa di perkotaan adalah bukan untuk pasar, tetapi untuk dikonsumsi sendiri, tidak ada orientasi untuk pengembangan usaha, melainkan hanya sebagai *livelihood* saja.

Tabel 1
Karakteristik UMK *Survival/Subsistence* dan *Viable*

No	Variabel	Survival/Subsistence	Viable
1	Motivasi	Sering karena terpaksa oleh keinginan untuk memperoleh keuntungan alternative	Memang berminat dan berniat untuk melakukan usaha yang viable dan menguntungkan, berdasarkan pilihan
2	Waktu	Biasanya bersifat part-time atau musiman, sekedar sebagai sumber sekunder penghasilan rumah tangga	Merupakan sumber utama penghasilan rumah tangga
3	Syarat Ketrampilan	Biasanya tidak terlalu diperlukan, mudah dilakukan sehingga menjadi <i>overcrowded</i>	Pengalaman dan ketrampilan sangat diperlukan
4	Penggunaan penghasilan	Penghasilan usaha cenderung dipakai untuk sekedar mempertahankan hidup dan untuk pengeluaran rumah tangga	Penghasilan usaha dipergunakan untuk reinvestasi pengembangan usaha, ada potensi pertumbuhan

Sumber: Asian Development Bank 1997, *Microenterprise Development, Not By Credit Alone*, pp. 26-27

Dari segi orientasi tindakan ekonomi, memang ada dua jenis usaha, yaitu *livelihood enterprises* dan *growth oriented enterprises*. *Livelihood enterprises* adalah usaha yang tujuannya hanya sebatas sebagai mata pencarian. Sedangkan *growth oriented enterprises* adalah usaha yang berorientasi pada pengembangan usaha.

Tabel 2
Perbedaan Utama antara UMK *Livelihood* dan UMK *Growth Oriented*

No	Variabel	Livelihood Enterprises	Microenterprises
1	Kapitalisasi	Relatif rendah	Lebih tinggi, tetapi awalnya sama
2	Pendidikan	Sedikit pendidikan formal	Setidaknya sekolah menengah
3	Ketrampilan dan Pengalaman	Relatif rendah, kecuali ketrampilan tradisional seperti untuk kerajinan tangan; kegiatan berdagang sering merupakan arena latihan untuk kemudian merakit produk yang sama	Lebih tinggi, umumnya didapat dari kursus-kursus atau dari pengalaman kerja yang lalu
4	Gender	Partisipasi perempuan tinggi	Partisipasi perempuan umumnya lebih rendah, dengan beberapa pengecualian
5	Sektor	Umumnya peternakan, perunggasan, makanan dan perdagangan kecil	Lebih banyak manufaktur dan jasa yang memerlukan beberapa ketampilan
6	Kompetisi	Kompetisi pasar sempurna, relatif bebas masuk, penggunaan tenaga keluarga intensif dan menawarkan kredit kepada buruh	Sering memanfaatkan pasar khusus dengan spesialisasi produk
7	Musim	Musiman, ikut siklus tanaman, tahun sekolah, hari-hari besar	Kurang dipengaruhi oleh musim
8	Kontribusi terhadap penghasilan	Biasanya merupakan sumber sekunder, walaupun vital	Sering merupakan sumber utama
9	Jumlah usaha	Biasanya merupakan salah satu dari beberapa usaha yang sama, sebagai kompensasi musim dan keuntungan rendah	Biasanya hanya satu-satunya
10	Penggunaan tenaga yang dibayar	Jarang, umumnya tenaga keluarga	Umumnya bukan keluarga, ada juga yang keluarga dan anak-anak
11	Surplus dan Reinvestasi	Surplus terbatas dan sering dikeruk untuk pengeluaran rumah tangga	Umumnya surplus direinvest
12	Penggunaan kredit	<i>Consignment</i> dalam kegiatan dagang, <i>profit sharing</i> dalam peternakan, <i>sewa di muka</i> untuk perahu atau kereta; dan menjadi <i>net lender</i> agar dapat bersaing.	Kesempatan kredit lebih luas, baik formal maupun semi formal, serta lebih besar
13	Potensi pertumbuhan	Produksi, penjualan, keuntungan dan penghasilan bisa meningkat, tetapi untuk kesempatan lapangan kerja terbatas; pertumbuhan sering terhambat oleh tingkat permintaan, ketersediaan bahan, keterbatasan tempat.	Memiliki potensi pertumbuhan: jumlah tenaga kerja, tenaga kerja yang dibayar, dan tenaga yang berkualitas

Sumber: Asian Development Bank 1997, *Microenterprise Development, Not By Credit Alone*, pp. 31-32

H. KESIMPULAN

Dari praktek dan temuan di lapangan, serta dari diskusi reflektif tersebut di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Eksistensi *lay persons* yaitu orang-orang awam adalah empirik dan lazim adanya. *Lay persons* yang tidak perlu merupakan agen resmi atau profesional untuk perubahan memiliki peran penting karena memiliki kapasitas kepoloporan yang dapat memodifikasi proses-proses sosial yang untuk perubahan sosial.

- 2) Peranan *lay persons* atau sering juga disebut *lay man* atau *active actor* sebagai pelopor pembaruan dan perubahan sosial adalah signifikan terutama di lingkungan komunitas yang bertaraf ekonomi dengan etika subsisten.
- 3) Signifikansi peran *lay persons* atau *lay man* atau *active actor* sebagai pelopor pembaruan dan perubahan sosial komunitas lokal ini akan semakin nyata manakala di lingkungan setempat juga hadir akademisi ataupun praktisi profesional yang mendampinginya.

DAFTAR PUSTAKA

- Asian Development Bank. 1997. ***Microenterprise Development, Not By Credit Alone***, <http://www.adb.org/Documents/Books/Microenterprise/microenterprise.pdf>
- Evers, Hans-Dieter. 1980. ***Produksi Subsistensi dan "Massa Apung" di Jakarta***, PRISMA VIII – Juni 1980
- Etzioni, Amitai. 1967. ***Modern Organization***, Englewood: Cliffs, Prentice Hall, New Jersey
- Etzioni, Amitai. 1968. ***The Active Society, Theory of Societal and Political Processes***, The Free Press, A Division of Macmillan Publishing Co; Inc; New York.
- Ife, Jim. 1996. ***Community Development: Creating Community Alternative, Vision, Analysis and Practice***, Longman, Melbourne.
- Netting, F. Ellen, Peter M. Kettner, Steven L. McMurry. 2004. ***Social Work Macro Practice***, 3rd ed, Allyn and Bacon, Boston
- Parsons, Talcot. 1960. ***Structure and Process in Modern Societies***, Free Press, Glencoe, Illinois
- Scott, James, C. 1981. ***Moral Ekonomi Petani, Pergolakan dan Subsistensi di Asia Tenggara***, LP3ES, Jakarta
- Suharto, Edi. 2005. ***Membangun Masyarakat Memberdayakan rakyat, kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial***, Refika Aditama, Bandung
- Suharto, Edi. 2005. ***Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial***, Alfabeta, Bandung
- Suharto, Edi. 2006. ***Pengembangan Masyarakat dalam Praktek Pekerjaan Sosial***, Makalah Pelatihan Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat, Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial, FISIP Jember, 28 September 2006

Pengabdian Kepada Masyarakat Desa: Sebuah Refleksi Sosiologik

Oleh Robert M.Z.Lawang^{*)}

A. PENDAHULUAN

Lewat jasa seorang mahasiswi jurusan Pekerjaan Sosial STISIP Widuri (pada waktu itu Sekolah Tinggi Pekerjaan Sosial - STPS), saya dikasih informasi tentang lowongan kerja konsultan dalam bidang irigasi sebagai *sociologist*. Tanpa berpikir panjang saya menyatakan bersedia, walaupun tidak tahu sedikitpun tentang irigasi. Proyek itu disebut *Irrigation Service Fee* (ISF). Permintaan itu terjadi pada tahun 1988. Dengan dasar kesediaan itu, saya diminta oleh Pusat Pengembangan Agribisnis (PPA) di Jakarta yang berasosiasi dengan *Euro Consult* untuk ikut serta dalam menyiapkan proposal tender ke Bank Dunia. Pekerjaan pertama saya adalah mengunjungi Subang, Jawa Barat untuk mengumpulkan data-data dasar tentang petani. Di sana saya bertemu dengan Ir. Rahmat Dasuki, yang sangat antusias dengan proyek ini. Dia adalah Kepala Divisi Tarum Timur yang membawahi sebagian Daerah Irigasi (DI) di Kabupaten Purwakarta, sebagian di Kabupaten Karawang, seluruh Kabupaten Subang, dan sebagian di Kabupaten Indramayu. Sambil menunjukkan peta wilayah Divisi Tarum Timur, dia menjelaskan kepada saya tentang struktur organisasi pelayanan irigasi yang berpusat di Jatiluhur, tempat waduk pembangkit listrik terbesar di Indonesia berdiri. Penjelasan Ir. Rahmat Dasuki sangat menarik terutama pada saat formula ISF dirumuskan dan diterapkan di Kabupaten Subang.

1. Waduk Jatiluhur yang besar itu dikelola oleh sebuah otorita yang disebut Otorita Jatiluhur. Otorita itu merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan status Perusahaan Umum (Perum). Seringkali disebut dengan gabungan keduanya, lalu menjadi Perum Otorita Jatiluhur (POJ). Sebagai Perum, POJ tidak berorientasi cari untung seperti BUMN berstatus Perseroan Terbatas, tetapi juga tidak boleh rugi. Untuk urusan sawah sebagai penunjang utama sistem ketahanan pangan nasional status Perum sangat cocok. Pertanyaan saya pada waktu itu: *bagaimana perusahaan itu bisa bertahan?* Pendapatannya diperoleh, antara lain, dengan menjual tenaga air kepada Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan bahan baku air untuk Perusahaan Air Minum (terutama untuk kota Jakarta). Dengan dana itulah, POJ membiayai seluruh personel, termasuk divisi yang membidangi irigasi Tarum Timur, Tarum Tengah dan Tarum Barat.
2. Struktur organisasi Divisi Tarum Timur ketika itu terdiri dari Kepala, Pengamat, Juru Pengairan, Penjaga Bendung dan Waker (bahasa Belanda). Semua gaji dan tunjangan mereka dibayar Pemerintah (Kementerian Pekerjaan Umum) lewat POJ. Tanpa masuk lebih detil mengenai manajemen keuangan POJ, pendapatan para pegawainya tidak jelek.
3. Dengan pengetahuan saya yang sangat terbatas mengenai irigasi, kami masuk ke dalam satu diskusi mengenai inti ISF itu yakni pelayanan irigasi. Saya dapat kesan bahwa Ir. Rahmat Dasuki mempunyai pengertian tentang ISF terutama pada airnya, bukan pada pelayanannya. Saya sendiri juga berpendapat demikian, karena apalah artinya pelayanan (*service*) tanpa air. Karena itu, diskusi kami lebih banyak menghadirkan masalah-masalah ketersediaan air pada musim kemarau beserta semua mekanisme

^{*)} Guru Besar (Emeritus) dari Sosiologi FISIP UI. Sekarang Ketua STISIP Widuri Jakarta

pengatasannya. Setelah akhirnya perusahaan *Euro Consult* dan PPA memenangi tender proyek itu dan saya ditempatkan sebagai kepala proyek di Subang, dan formula ISF sudah disusun, barulah saya sadar bahwa air hanya merupakan salah satu komponen saja dalam sistem pelayanan irigasi.

Agustus 1989, saya resmi bekerja sebagai konsultan. Secara lisan saya lapor ke pimpinan. Tidak ada komentar. Tidak ya, tidak juga tidak. Pada waktu itu banyak sekali orang-orang dari Perguruan Tinggi yang bekerja di luar, dan malah menjadi "biasa di luar". Alasan utama saya adalah pendapatan dari pegawai negeri yang sama sekali tidak mencukupi untuk bisa hidup layak di Jakarta. Tetapi setelah berkecimpung di dalam proyek, banyak sekali pelajaran yang dapat dipetik daripadanya, dan kalau dikelola dengan baik akan memberikan masukan pada pengembangan akademik (bdk. Achwan dan Sujatmiko, 2010).

Saya bekerja selama lima tahun di Subang (1989-1994) sebagai Kepala Sub Proyek. Ke Jakarta hanya untuk mengajar dan keluarga. Peraturannya sangat ketat. Urusannya, antara lain, persiapan daerah irigasi (wilayah satu kejuron) untuk ujicoba ISF, berdiskusi dengan petani, merancang Perda sebagai landasan hukum untuk pemungutan iuran ISF, mengelola perkantoran dan mengatur tugas dan tanggungjawab *Community Organizer* (CO), dan kadang-kadang harus berdiskusi dengan orang-orang Bappeda Kabupaten dan Provinsi. Dengan demikian, tugas mengajar agak terbelengket. Karena itu perlu penataan perkuliahan khusus untuk matakuliah Teori Sosiologi dan Sosiologi Pedesaan.

1. Untuk Teori Sosiologi persiapan relatif cukup memadai karena pada tahun 1986 saya berhasil menerjemahkan buku Doyle Paul Johnson ke dalam bahasa Indonesia, yang diterbitkan oleh PT Gramedia dengan judul Sosiologi Klasik dan Sosiologi Modern untuk masing-masing bukunya. Nampaknya kedua buku itu merupakan pustaka sosiologi pertama yang tersedia dalam bahasa Indonesia. Karena itu, persiapan kuliah tidak membutuhkan banyak waktu, tanpa mengorbankan kualitas.
2. Untuk Sosiologi Perdesaan ceriteranya sedikit lain. Saya menerima tugas mengajar matakuliah ini dari Jurusan Sosiologi FISIP UI karena Drs. Hatta (kandidat doktor sosiologi) meninggal agak mendadak. Beliau tidak mempersiapkan asisten untuk menggantikan, sehingga pilihan jatuh kepada saya, tanpa saya tahu alasannya. Sebelum beliau, Ir. Sudarmadi (dari IPB) mengasuh matakuliah Sosiologi Pedesaan sejak awal berdirinya Jurusan Sosiologi di FISIP UI. Almarhum Drs. Hatta adalah muridnya dan kemudian menjadi asisten. Sayapun menjadi murid Ir. Sudarmadi tahun 1973 di Rawamangun. Dalam perjalanan tugas ke Ambon, beliau meninggal. Jadi, saya menggantikan dua pengajar Sosiologi Pedesaan yang sudah meninggal. Ada yang berseloroh saya akan mengalami nasib yang sama dengan kedua pendahulu saya. Tetapi rupanya tidak, karena saat ini umur saya sudah 69 tahun.
 - 1) Untuk Sosiologi Pedesaan saya dibantu seorang asisten bernama Ir. Daddy Heryono Gunawan (sekarang doktor sosiologi) tamatan IPB. Di institut itulah Sosiologi Pedesaan berkembang. Pada waktu itu, *grand design* Jurusan Sosiologi untuk lebih menonjolkan Sosiologi Perkotaan sebagai bidang spesialisasinya, mengingat letaknya di Ibukota Negara. Karena itu, Sosiologi Pedesaan bukan merupakan matakuliah yang diminati mahasiswa. Sebelum sistem SKS diterapkan (saya kuliah dengan sistem itu), Sosiologi Pedesaan merupakan matakuliah wajib (terminologi sistem SKS). Setelah sistem SKS diterapkan, Sosiologi Pedesaan menjadi matakuliah pilihan, mungkin karena peminatnya kurang.

- 2) Kehadiran Ir Daddy pada waktu itu lebih daripada sekedar seorang asisten. Dia memberikan angin segar pada perkuliahan Sosiologi Pedesaan dengan menghadirkan kuliah lapangan beberapa hari. Dia mencari dana, menyusun rencana kerja, mengorganisasi kegiatan mahasiswa di lapangan, dan akhirnya mendiskusikannya di kelas menjelang akhir semester. Perkuliahan menarik, dan semangat mahasiswa untuk mengikuti kuliah ini semakin besar. Atas dasar itu, Jurusan Sosiologi menetapkan Sosiologi Pedesaan sebagai matakuliah wajib hingga saat ini.
- 3) Pada waktu itu, Ir. Daddy juga memberikan masukan untuk menjadikan irigasi sebagai salah satu topik perkuliahan di Sosiologi Pedesaan. Seorang mahasiswa dari Jurusan Kesejahteraan Sosial bernama Rizal Hikmat meneliti organisasi Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) di Subang untuk skripsinya. Dia satu-satunya sarjana di FISIP UI yang menekuni irigasi sebagai spesialisasinya. Sayang dia sudah meninggal.
- 4) Bekerja sebagai konsultan irigasi bukan terlalu jauh dari pokok permasalahan Sosiologi Pedesaan. Malah ada Sosiologi Irigasi yang secara khusus menjadikan irigasi sebagai suatu sistem sosial. Komponen struktural irigasi sebagai suatu sistem sosial meliputi pemberi pelayanan irigasi (*service provider*) dan penerima pelayanan irigasi (*service recipient*) yang pada umumnya adalah petani. Tentang hubungan antara kedua sub-sistem ini, sudah ada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum yang mengaturnya. Walaupun ternyata proyek ISF itu gagal diterapkan di Indonesia karena pelbagai macam faktor, pelajaran yang dipetik dari pengalaman itu sangat banyak, dan menjadi bahan refleksi yang berguna untuk pengembangan Sosiologi Pedesaan di satu pihak dan Teori Sosiologi di lain pihak. Karena itu, keputusan untuk menjadi konsultan irigasi, tidak perlu disesalkan, malah sangat mendukung perkuliahan sosiologi pada umumnya.

Setelah pensiun 2010 (65 tahun) saya langsung bekerja lagi sebagai konsultan irigasi untuk suatu proyek bernama *Decentralized Irrigation System Improvement Project II (DISIMP-II)*, sebuah proyek perbaikan dan sebagiannya bangunan irigasi baru di kawasan Indonesia bagian timur. Dengan cara berselang-seling (*intermittent*) saya bekerja di proyek ini sampai Maret 2016. Tidak perlu saya jelaskan tugas saya di proyek ini. Namun satu pengalaman yang mendukung konseptualisasi teori Sosiologi Perdesaan saya adalah peningkatan produksi padi melalui sistem pengelolaan air yang dikombinasikan dengan metode tanam *System of Rice Intensification (SRI)*. Kalau inti Sosiologi Pedesaan adalah pengetahuan sosiologi tentang masyarakat desa untuk meningkatkan taraf hidupnya, maka pengalaman ini memberikan sumbangan hampir penuh pada ilmu pengetahuan ini, terutama kalau masyarakat perdesaannya hidup dari pertanian.

Selama *intermittent* 2013 dari proyek DISIMP-II, saya mendapat dana dari Pertamina Foundation (PF) untuk meningkatkan pendapatan masyarakat petani sawah di Daerah Irigasi Pinis Kabupaten Manggarai Timur NTT dengan menerapkan SRI dan pemupukan organik melalui penggunaan *nitrobacter*. Hasilnya cukup memuaskan. Dibandingkan dengan hasil produksi sebelumnya (atau petani yang tidak menggunakan *nitrobacter* dan metode tanam SRI) yang < 2 ton/ha, penerapan sendiri oleh petani ujicoba menghasilkan 7.4 ton/ha. Sangat membanggakan. Penerapan teknologi ini merupakan salah satu jawaban terhadap masalah lingkungan di daerah pertanian perdesaan, baik karena penerapan Paket Revolusi Hijau (PRH) yang tidak tepat, maupun karena

perubahan cuaca yang tidak karuan. Keberhasilan di Pinis diperluas di lahan kering di Rantung hingga saat ini dalam bentuk uji coba dengan modifikasi seperlunya.

Inti dari ujicoba dengan dana PF adalah bahwa kesejahteraan masyarakat petani di daerah perdesaan saat ini hanya dapat dicapai melalui modernisasi pertanian. Namun pertanyaan yang harus dijawab adalah modernisasi pertanian seperti apa? Berikut ini penataan pengetahuan saya tentang desa dilihat dalam perspektif Modernisasi Ekologi.

B. PENGELOLAAN PENGETAHUAN

Ketika saya belajar sosiologi di FISIP UI antara 1971-1976, masalah lingkungan belum menjadi isu teoretik. Malah ketika memperdalam teori sosiologi di Universitas Leiden - Belanda, masalah lingkungan juga belum terlalu menohok jantung kehidupan manusia seperti saat ini. Menjelang pensiun 2010 (usia 65 tahun) perhatian saya terhadap lingkungan mulai tumbuh, sejalan dengan munculnya begitu banyak masalah sosial dalam masyarakat yang timbul karena masalah lingkungan. Menggarisbawahi apa yang dikatakan Anthony Giddens (2006) bahwa sejauh kelompok (atau kelas, atau kategori, atau komunitas sosial) mempunyai kemampuan berbeda dalam menghadapi masalah lingkungan (pencemaran, pemanasan global, kerusakan lingkungan, cuaca ekstrim dan sebagainya), sejauh itu pula sosiologi mendapat tempat untuk menggambarkan dan menjelaskan isu-isu lingkungan yang berdampak pada kehidupan mereka. Bidang itulah yang disebut dengan istilah Sosiologi Lingkungan (*Environmental Sociology*). Yang paling banyak mendapat dampak kerusakan lingkungan dengan macam-macam manifestasinya adalah kelas sosial bawah. Di daerah perkotaan mereka hidup di kawasan kumuh (*slum area*), sedangkan di daerah perdesaan mereka adalah petani pada umumnya terutama petani dengan lahan kecil dan hidup hanya mengandalkan pertanian saja. Kedua bidang studi kawasan itu mendapat tempatnya di STISIP Widuri. Dr. Ir. Prudensius Maring meneliti tentang masalah lingkungan yang rumit (kehidupan involutif di pinggir sungai Ciliwung), Dr. Edy Siswoyo meneliti tentang pabrik tempe tahu di Semanan sejak beberapa tahun belakangan ini. Sedangkan saya sendiri lebih banyak meneliti petani di daerah perdesaan, khususnya NTT.

Pengelolaan pengetahuan yang menjadi salah satu pokok permasalahan refleksi sosiologik, diinspirasi antara lain oleh tulisan Rochman Achwan dan Iwan Gardono Sujatmiko mengenai perkembangan ilmu sosial (khususnya sosiologi) di Indonesia (2010). Kedua ahli itu membedakan tiga macam *sociologist*: akademik, profesional dan aktivis. Dalam rekomendasinya mereka mengharapkan apa yang dilakukan oleh kaum profesional dan aktivis dapat memberikan masukan kepada pengembangan akademik sosiologi di Tanah Air. Dengan masukan-masukan seperti itu, *sociologist* yang berkembang dalam karya akademik saja (tridharma perguruan tinggi) dapat berkembang dari dan dalam konteks Indonesia. Sebagai definisi kerja, pengelolaan pengetahuan yang dimaksudkan di sini menunjuk pada *penataan pengetahuan terkait desa ke dalam asumsi dan hipotesis untuk memudahkan pengembangan lebih lanjut*. Definisi kerja ini tentu mencerminkan beberapa kondisi pribadi saya sendiri.

1. Sudah lama saya berkecimpung dalam kerja praktis, berbuat sesuatu yang ada hubungannya dengan pengembangan masyarakat. Tahu ini, tahu itu, tetapi belum ada strukturnya. Refleksi ini muncul dari pengalaman mengajar teori sosiologi dan membimbing tesis mahasiswa yang sudah saya lakukan selama berpuluh tahun di FISIP UI, di STISIP Widuri, di Universitas Riau, di Universitas Padjadjaran, di Universitas

Satya Wacana, di Universitas Patimura, di Universitas Terbuka. Setelah jeda sebentar, menengok kembali ke belakang, muncul pertanyaan : semuanya itu apa, bagaimana dan untuk apa ?

2. Saya sedikit beruntung, karena mengajar teori sosiologi dan sosiologi pedesaan yang masing-masing bersifat murni dan terapan, memungkinkan saya untuk melakukan refleksi sosiologik, sebelum semuanya berakhir karena purna bakti dalam arti penuh, tidak bisa berkarya lagi karena fisik tidak mendukung. Juga beruntung karena pernah belajar pendekatan-pendekatan dasar dalam Ilmu Kesejahteraan Sosial di FISIP UI, walaupun hanya satu semester saja di tahun 1972. Kemudian, karena saya pernah mendalami konsep Kapital Sosial sebagai hasil dari Sabatikal 2004, dan menulis buku pengantar tentang konsep itu, dan mengajar matakuliah itu di Program Pascasarjana Departemen Kesejahteraan Sosial, pengembangan pustaka melalui kuliah seminar, memungkinkan saya untuk mulai penataan pengetahuan dalam struktur yang sedikit logik dan berarti.
3. Dr. Surjono dosen luar biasa ketika itu yang mengajar teori involusi pertanian Clifford Geertz tahun 1973 di kampus Rawamangun, sangat memukau saya dan menimbulkan kekaguman intelektual terhadap suatu karya besar seorang *anthropologist* Amerika. Ketika saya membahas teori itu dalam kuliah Sosiologi Pedesaan, kekaguman yang sama muncul dari mahasiswa. Baik kuliah yang saya dapat maupun kuliah yang saya berikan tidak lebih daripada reproduksi saja yang tidak mampu menggugah mereka untuk bertindak dalam kerangka itu. Walaupun perspektif Parsonian itu banyak dikritik orang seperti *pattern variables*, *becoming modern* dalam pengembangan Alex Inkeles, masalah-masalah itu tidak dijadikan dasar untuk melakukan refleksi sosiologik untuk pengembangan ilmu pengetahuan ke depan. Bidang pertanian, pendidikan, birokrasi pemerintahan untuk tidak menyebut semua bidang sudah terjerumus dalam pola-pola pengembangan seperti ini. Sementara di Barat teori itu ditinggalkan, malah di Indonesia masih menjadi asumsi dasar pengembangan. Ambil beberapa ilustrasi berikut ini:
 - 1) Involusi Geertz sesungguhnya berbicara tentang lingkaran setan yang tidak karuan antara tekanan penduduk, keterbatasan lahan, keterbatasan teknologi pertanian dan ketidakmampuan sistem produksi pertanian untuk memberi makan (nasi) kepada begitu banyak orang (Geertz, 1966). Dalam kondisi seperti ini memang tidak ada perkembangan yang berarti. Tetapi masalah tekanan penduduk yang pernah menjadi program rezim Soeharto, tidak diteruskan secara serius oleh pengganti-penggantinya, sehingga ledakan penduduk justru terjadi pada kelas sosial bawah di daerah perdesaan. Begitu juga dengan keterbatasan lahan yang lebih banyak menjadi wacana daripada tindakan nyata untuk redistribusi lahan. Keterbatasan teknologi pertanian dalam bidang benih jalan di tempat, sekurang-kurangnya seperti yang saya amati di NTT. Benih yang sama dipakai hingga berpuluh-puluh kali, sehingga sangat mempengaruhi produktivitas lahan. Kalau dulu sistem pertanian produksi itu dibimbing oleh PPL, sekarang kehadirannya jarang dan kadang-kadang tidak ada di samping petani.
 - 2) Ketika Soeharto memulai rezim pengadaan pangan dengan menerapkan teknologi moderen, yang terjadi di situ adalah penegasan asumsi dasar tentang perkembangan dan kebijakan pembangunan dengan dasar modernitas, rasionalitas dan cenderung pragmatis. Bukankah itu merupakan reproduksi sistem pembangunan yang mengacu pada Barat? Sutan Takdir Alisyahbana pada tahun 1970-an cukup getol dengan ide pembangunan yang berorientasi Barat (westernisasi). Dia dikecam karena kebarat-baratan,

tetapi alternatif pembangunan yang dipilih justru tidak ada bedanya dengan westernisasi dalam bahasa Bourdieu reproduksi. PRH yang sudah dikemukakan sebelumnya adalah produk Barat yang terdiri dari benih unggul (malah diimpor), irigasi teknis (walaupun salah-salah), sistem pengelolaan air di petak tersier, penggunaan pupuk sintetik (urea), penggunaan pestisida sintetik, teknologi pasca panen, adalah struktur dan sistem pertanian moderen yang sudah dikembangkan di Barat. Malah teori involusi Clifford Geertz dikeritik dengan PRH ini yang berhasil meningkatkan produksi padi berlipat-lipat. Pada tahun 1985 Indonesia berhasil swasembada pangan yang menjadi kebanggaan rezim Soeharto. Bukankah ini reproduksi sistem barat atau alias westernisasi?

- 3) Masih terkait kebijakan pembangunan rezim Soeharto dalam bidang pertanian (reproduksi/westernisasi), penataan birokrasi pemerintahan moderen ditujukan untuk menyukseskan peningkatan produksi pangan nasional, dengan prinsip sinerji (lawan dari ego sektoral), efektif, efisien. Dengan kata lain, rasionalitas instrumental, rasionalitas substantif, rasionalitas formal (S. Kalberg) diterapkan dengan baik sekali, sehingga mulai dari pabrik pupuk urea, import pestisida, jalur distribusi, sistem pengadaan sampai ke desa-desa, adalah produk yang sering menjadi kebanggaan sistem pengadaan pangan nasional Indonesia.
- 4) Setelah PRH berjalan puluhan tahun, dampaknya mulai terasa. Di pulau Jawa tanah sawah mengeras, tingkat keasaman tinggi, produktivitas sawah menurun. Untuk memulihkan kondisi tanah yang rusak karena penggunaan pupuk urea yang lama, harus ada biaya yang dikeluarkan oleh petani. Dalam hal ini Pemerintah yang dulu menjadi bagian dari proses pengrusakan itu, diam seribu bahasa, dan membiarkan petani atasi masalah itu sendiri.
- 5) Kebijakan Kementerian Pertanian untuk mengurangi penggunaan pupuk urea dari 200 kg per hektar menjadi 100 kg, merupakan awal dari satu kesadaran baru akan kondisi lingkungan hidup yang lebih baik. Namun dari pengalaman mendampingi petani sawah di Daerah Irigasi Pinis di Manggarai Timur NTT (selanjutnya Pinis saja), dan dari kunjungan kerja sebagai konsultan irigasi pada proyek DISIMP-II, pengurangan penggunaan pupuk urea belum menjadi keputusan petani dalam menjalankan sistem produksinya.
- 6) Mengapa risau? PRH adalah paket dengan persyaratan yang harus dipenuhi secara konsisten. Kalaupun konsistensi ini dijaga (perilaku rasional) tetap dia menyisahkan masalah kerusakan ekosistem sawah. *Pertama*, sawah itu sendiri bersifat monokultur yang menghancurkan ekosistem yang berbasis *biodiversity*. *Kedua*, proses pemulihannya memakan biaya cukup besar. *Ketiga*, petani malas merubah sistem produksi berbasis PRH. Ketiga faktor inilah yang menjadi hambatan penerapan sistem bertani organik di Pinis. Mengapa hal ini terjadi?
 - a. Penerapan sistem bertani organik di Pinis itu berbasis *nitrobacter*. Temuan ini merupakan buah dari ketekunan bertahun-tahun seorang biasa saja bernama Thomas Janardi, bukan seorang petani, dan malah lebih tepat dia adalah seorang pedagang. Dia suku Tionghoa. Pada tanggal 29 Mei 2013 bersama Edy Siswoyo Kepala P3M STISIP Widuri dan saya mengunjungi dia di Purbalingga Jawa Tengah untuk melihat dari dekat produksi *nitrobacter*nya. Penjelannya sangat menarik, persis seperti yang saya pelajari dari internet. Kami mengunjungi beberapa lokasi sambil berdiskusi ringan tentang temuannya itu. Namun dari penjelasannya itu tidak ada satu kajian ilmiah tentang proses kerjanya

nitrobacter itu untuk menetralisasi kerusakan tanah akibat penggunaan pupuk urea, atau campuran dengan biang bakteri pupuk daun dan pohon, tanaman dan sayur, NPK dan bakteri untuk memperoleh hasil yang memuaskan. Ditambah lagi dengan pengetahuan tentang biologi yang mendalam, tidak berani saya kemukakan pendapat saya tentang masalah itu. Bagi saya cukup kalau penggunaan teknologi itu dapat meningkatkan produksi pangan dan lebih dari itu mampu memutuskan satu mata rantai keterikatan petani atau sistem produksi padi nasional yang sangat tergantung pada pupuk dan pestisida sintetik. Temuan ini sangat mengagumkan. Sayang belum ada kajian ilmiah dari pihak perguruan tinggi tentang komposisi *nitrobacter* untuk mengurangi risiko-risiko yang tidak perlu dalam penerapannya. Sekali lagi saya harus katakan di sini bahwa tanggapan perguruan tinggi lambat sekali.

- b. Penerapan *nitrobacter* yang efektif perlu didukung oleh struktur perilaku yang konsisten. Tidak akan dijelaskan secara detil di sini tentang proses pembuatannya. Intinya adalah perubahan perilaku yang ditentukan oleh semua persyaratan yang ditentukan oleh teknologi itu baik dalam proses pembuatan maupun dalam proses penyemprotannya. Petani ujicoba sudah berhasil menerapkan teknologi ini dengan kombinasi cara tanam SRI, sehingga menghasilkan produksi pangan yang lebih tinggi, hingga saat ini. Artinya tidak saja *input* yang dicapai melainkan *outcome* juga. Namun dampak ke petani sekitarnya masih belum memperlihatkan tanda-tanda untuk mau menerapkan teknologi itu.
 - c. “Keberhasilan” PRH hingga saat ini tercapai karena dukungan struktur dan sistem yang kuat terkait pengadaan pupuk dan pestisida sintetik mulai dari hulu (pabrik) sampai hilir (tingkat pengguna di petak tersier). Ditambah lagi dengan kebijakan subsidi saprodi oleh Pemerintah, struktur dan sistem itu menjadi lebih efektif lagi. Struktur dan sistem seperti inilah yang perlu diciptakan untuk memungkinkan penerapan pertanian organik dapat berjalan lancar. Penemu *nitrobacter* sudah mulai mengarah ke sana dengan jalan menggantikan urea sebagai komponen penting dalam fermentasi *nitrobacter* dengan enzim dengan prinsip pembuatan yang sama dengan proses fermentasi sebelumnya, yang sekarang sedang diterapkan oleh petani ujicoba yang sama di Pinis.
 - d. Kegagalan PRH sudah dirasakan oleh petani dan Pemerintah. Masalahnya di pengadaan paket yang dibutuhkan. Kalau salah satunya tidak tersedia, tentu saja mempengaruhi hasil optimal. Pemerintahan Jokowi (2014-2019) berusaha untuk menata kembali sistem produksi pertanian kita untuk mencapai status kedalautan pangan.
4. Kita sampai pada usaha penataan pengetahuan dalam bentuk asumsi dan hipotesis untuk memungkinkan pengembangan lebih lanjut.
- 1) Asumsi tentang pembangunan desa yang intinya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.
 - a. Asumsi – 1: Modernisasi perdesaan merupakan satu-satunya jalan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Secara tidak langsung, proses itu akan berfungsi untuk mengurangi macam-macam masalah terkait urbanisasi, kerawanan pangan, desentralisasi, dan kedalautan masyarakat.

- b. Asumsi – 2 : Daerah perdesaan sudah mengalami kerusakan sosial, ekonomi, politik dan lingkungan yang cukup parah sehingga membutuhkan usaha untuk memulihkan keadaan yang kondusif untuk pembangunan.
 - c. Asumsi – 3 : Perspektif Modernisasi Ekologik (PME) merupakan pendekatan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat desa secara berkesinambungan (*sustainable*).
 - d. Asumsi – 4 : Sintesis antara PME dan Kapital Sosial (KS) memiliki kekuatan eksplanatoris yang solid untuk penyusunan kebijakan sosial ekonomi politik yang berkesinambungan.
- 2) Hipotesis yang dapat dikembangkan lebih lanjut, dideduksi dari sintesis antara PME dan KS pada umumnya. Tetapi karena alasan praktis, penyusunan hipotesis mengacu pada analisis KS dari Michael Woolcock dan Deepa Narayan (1999), yang sudah juga menjadi bahan diskusi bagi mahasiswa S2 Kesos UI dan S2 Kesos STISIP Widuri. Pokok pikirannya dapat dilihat sebagai berikut :
- a. *Communitarian view* – kekuatan masyarakat untuk menjaga lingkungan hidup.
 - b. *Network view* – kekuatan bersama secara regional atau nasional untuk menjaga lingkungan dan memanfaatkannya secara bertanggungjawab.
 - c. *Institutional view* - peran negara dan CSO untuk mengembangkan kebijakan yang berorientasi pemeliharaan dan pemanfaatan lingkungan hidup secara melembaga.
 - d. *Synergy view* – peran semua warga dalam mempertahankan dan menjaga kehidupan bumi untuk memberi kita kehidupan.
- 3) Hipotesis yang dapat dikembangkan dari PME dengan menggunakan strategi keberlanjutan (*strategy of sustainability*) yakni *sufficiency*, *efficiency* dan *consistency*:
- a. Komunitas perdesaan dapat mulai mengembangkan pertanian organik baik yang berbasis sumber daya lokal, maupun melalui intervensi dari luar melalui kebijakan yang memihak pada mereka atau kalau mungkin melalui mekanisme pasar. Ketiga strategi itu dapat dicapai sekaligus.
 - b. Komunitas regional dapat mulai mengembangkan pertanian organik untuk bidang kehidupan bersama yang lebih luas, sehingga membutuhkan pendekatan *network-view* yang akan bertahan lebih lama kalau disintesis dengan pendekatan *institutional view*.
 - c. Komunitas nasional dapat mengembangkan pertanian organik melalui sinergi semua kekuatan yang ada pada komunitas kampung, regional yang membutuhkan jaringan sosial yang lebih luas lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Achwan, Rochman and Iwan G. Sujatmiko. "Contesting Mainstream Sociology and Developing Alternative Public Sociologies in Indonesia", dalam *Michael Burawoy et al.. Facing An Unequal World: Challenges for A Global Sociology vol 2*. Joint Publication of the Institute of Sociology, Taiwan and Council of National Associations of the International Sociological Association, Spain, 2010.
- Geertz, Clifford. *Agricultural Involution. The Process of Ecological Change in Indonesia*. Univ. Of California Press, 1963.
- Kalberg, Stephen. *Max Weber's Types of Rationality: Cornerstones for the Analysis of Rationalization Processes in History*. The American Journal of Sociology, Vol. 85, No. 5 (Mar., 1980), pp. 1145-1179. Published by : The University of Chicago Press
- Woolcock, Michael and Deepa Narayan. *Social Capital : Implications for Development Theory, Research and Policy*, 1999.

Pemberdayaan Keluarga Melalui Pemanfaatan Potensi Lingkungan Keluarga (Pengalaman LK-3 STISIP Widuri Dalam Meningkatkan Keberdayaan Keluarga)

Oleh : MM Sri Dwiyantari^{*)}

ABSTRAK

Pemberdayaan keluarga ini dilakukan untuk membantu memecahkan masalah keluarga dimana salah satu anggota keluarga sering mengeluh pusing, sering kesal pada anggota keluarga yang lain dan kas bon pada keluarga dimana ia bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Hasil *asement* menunjukkan bahwa faktor penyebabnya adalah lemahnya ekonomi keluarga. Penanganan masalah dilakukan dengan metode *social case work*. Dalam hal ini dilakukan dengan pemberdayaan keluarga dengan memanfaatkan potensi lingkungan keluarga tersebut yaitu pemanfaatan lahan kosong sekitar rumah dan pemanfaatan tanaman liar pepaya gantung yang menghasilkan bunga pepaya. Hasil pemberdayaan ini ialah meningkatnya penghasilan (*income*) keluarga dan peningkatan berelasi sosial anggota keluarga secara internal dan eksternal. Hal ini membuat kondisi psikososial klien membaik, yang ditandai menurunnya frekuensi mengeluh pusing, sering kesal, muka cemberut, dan beban sering berutang pada keluarga tempat ia bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Dengan kata lain intervensi ini dapat meningkatkan keberdayaan keluarga. Di samping itu proses pemberdayaan keluarga tersebut ternyata berpengaruh kepada keluarga-keluarga di masyarakat setempat dimana keluarga-keluarga sekitar meniru aktivitas keluarga yang telah diberdayakan.

Kata kunci: keluarga, pemberdayaan, kemiskinan, psikososial

ABSTRACT

Family empowerment is done to help solve the problem of the family in which one member of the family often complain of dizziness, often annoyed at other family members and cash bon family where she worked as a housekeeper. The results of the assessment indicate that the cause is the weak economic factor family. Troubleshooting done by the method of social case work. In case this is done by empowering families to take advantage of the potential of the family environment is the use of the vacant land around the house and use of wild plants that produce flowers hanging papaya. The result of this is the increasing empowerment of earnings (income) families and increase social related family members internally and externally. This makes the client's psychosocial condition improved, which marked decrease in the frequency complained of dizziness, often annoyed, sullen, and owe to the family where she worked as a housekeeper. In other words, these interventions can improve family empowerment. Besides, the process of empowerment of the family is influential to families in the local community where families around mimicking the activity of a family that has been empowered.

Keywords: family, empowerment, poverty, psychosocial

A. PENDAHULUAN

Permasalahan kehidupan keluarga di pedesaan, antara lain kemiskinan. Menurut Sayogyo (1978, 1991) yang dikutip Ihromi (1999:240), mereka yang tergolong miskin umumnya terdiri dari keluarga-keluarga atau rumah tangga buruh tani, petani sempit, pengrajin dan juga nelayan. Hasil penelitian Harry Hikmat (2010) di Desa Kecipir, Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes berikut memberi gambaran nyata tentang kondisi tersebut.

^{*)} Ketua LK3 (Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga) STISIP Widuri Jakarta

**Distribusi Penduduk Berdasarkan
Jenis Pekerjaan di Desa Kecipir 1999**

Pekerjaan	Jumlah	%
PNS	8	0,27
Pedagang	13	0,45
Nelayan	76	2,61
Buruh Tani	2376	81,57
Petani	336	11,53
Lainnya	104	3,57
Jumlah:	2913	100

Data diolah dari : Hary Hikmat (2010: 176)

Data tersebut menggambarkan bahwa kendati mereka bekerja, yaitu di sektor pertanian, namun tampak bahwa sebagian terbesar adalah bekerja sebagai buruh tani. Lemahnya penduduk miskin tersebut juga tercermin dari tingkat pendidikan yang mereka miliki. Dari penelitian yang sama ditunjukkan bahwa tingkat pendidikan mereka rendah; 39%nya tamat SD, 33% tidak tamat SD. Hanya 4 orang yang tamat PT (0,13%) dan selebihnya yang tamat SLTP, SLTA dan putus sekolah SD, SLTP dan SLTA. (Harry Hikmat 2010 : 174 – 175)

Kemiskinan dikenal sebagai tiadanya kemampuan untuk memperoleh kebutuhan-kebutuhan pokok (Bagir 1985 dalam Huraerah 2011:183). Kebutuhan pokok dimaksud meliputi kebutuhan pangan, sandang, perumahan, kesehatan dan pendidikan. Sementara Robert Chambers (Huraerah 2011; 183) mengatakan inti kemiskinan terfokus pada apa yang disebut jebakan kekurangan (*deprivation trap*). Jebakan kekurangan ini meliputi ketidakberuntungan yaitu: kemiskinan itu sendiri, kelemahan fisik, keterasingan, kerentanan dan ketidakberdayaan. Kelimanya saling mengait yang akhirnya menimbulkan jebakan kekurangan. Demikian dikemukakan oleh Subandriyo (2006) yang dikutip Huraerah (2001; 183). Dalam konteks yang lebih pragmatis, kemiskinan dilihat dari sudut pandang manapun pada akhirnya akan bermuara pada munculnya pola hidup miskin yang cenderung mengekalkan kemiskinan itu. Pola hidup seperti ini dikatakan oleh Oscar Lewis dalam Suparlan (1984) sebagai “kebudayaan kemiskinan”., yang cirinya antara lain: (1) kurang efektifnya partisipasi dan integrasi kaum miskin ke dalam lembaga-lembaga utama masyarakat, (2) kuatnya perasaan tak berharga, tak berdaya, kebergantungan dan rendah diri. Kondisi semacam ini pada akhirnya dapat berpengaruh pada masalah yang lebih besar bagi keberfungsian sosial seseorang. Dalam kaitan itu, Pekerjaan Sosial sebagai profesi utama dalam usaha kesejahteraan sosial ikut memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mengatasi masalah kemiskinan. Tugas dan tanggung jawab pekerjaan sosial adalah memperbaiki dan meningkatkan kemampuan masyarakat miskin agar mereka dapat berfungsi sosial atau menjalankan tugas-tugas kehidupannya dengan baik yaitu tugas dalam memenuhi kebutuhan pokoknya.

Kondisi kemiskinan seperti diuraikan diatas juga penulis temukan didaerah pinggiran kota Tangerang Selatan - tepatnya di perbatasan Tangerang Selatan – Bogor, yaitu di Dusun Jletreng, Desa Pengasinan Kecamatan Gunungsindur, Kabupaten Bogor. Sementara itu pada sisi yang lain keluarga-keluarga di komunitas tersebut memiliki berbagai sumber-sumber yang dapat dimanfaatkan untuk terlepas dari belenggu kemiskinan. Sumber-sumber tersebut, antara lain, lahan sekitar rumah yang subur dan sumber-sumber lain di lingkungannya

yang dapat diakses. Melihat masalah dan potensi tersebut *Social Worker* (SW) LK-3 STISIP Widuri terdorong untuk berupaya memberdayakan keluarga-keluarga tersebut. Dalam hal ini *Social Worker* memulai dengan mendampingi salah satu keluarga yaitu keluarga Om. Melalui pendampingan ini diharapkan terjadi perubahan pada keluarga Om. Berdasarkan latar belakang tersebut maka paparan ini ingin menggambarkan hal-hal berikut:

1. Bagaimana praktik dan hasil pemberdayaan keluarga?
2. Bagaimana keberdayaan keluarga berpengaruh pada keluarga-keluarga di masyarakat setempat?

B. PEMBERDAYAAN KELUARGA

1. Pengertian Pemberdayaan dan tujuan

Mengacu pada pandangan Payne (1977) yang dikutip Adi (2001:32), pemberdayaan ialah proses yang ditujukan untuk membantu klien memperoleh daya untuk mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan ia lakukan terkait dengan diri mereka, termasuk mengurangi efek hambatan pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan. Hal ini dilakukan melalui peningkatan kemampuan dan rasa percaya diri untuk menggunakan daya yang ia miliki antara lain transfer daya dari lingkungannya. Mengacu pada pandangan Payne (1977) dalam buku *Modern Sosial Work Theory* dalam Alfitri (2011: 23) bahwa tujuan dasar pemberdayaan adalah keadilan sosial dengan memberikan ketenteraman kepada masyarakat yang lebih besar serta persamaan politik dan sosial melalui upaya saling membantu dan belajar melalui pengembangan langkah kecil guna tercapainya tujuan yang lebih luas. Menurut Ife seperti dikutip Suharto (2005:59), pemberdayaan memuat dua pengertian kunci, yaitu kekuasaan dan kelompok lemah. Kekuasaan diartikan bukan hanya menyangkut kekuasaan politik dalam arti sempit, melainkan kekuasaan atau penguasaan klien atas:

- a. Kemampuan dalam membuat keputusan mengenai gaya hidup, tempat tinggal dan bekerja.
- b. Kemampuan menentukan kebutuhan selaras dengan aspirasi dan keinginannya.
- c. Kemampuan menjangkau, menggunakan dan mempengaruhi pranata masyarakat seperti lembaga kesejahteraan sosial, pendidikan, kesehatan.
- d. Kemampuan mengekspresikan dan menyumbangkan gagasan dalam suatu forum atau diskusi secara bebas dan tanpa tekanan.
- e. Kemampuan memobilisasi sumber formal, informal dan masyarakat.
- f. Kemampuan memanfaatkan dan mengelola mekanisme produksi, distribusi dan pertukaran barang serta jasa.
- g. Kemampuan dalam kaitannya dengan proses kelahiran, perawatan anak, pendidikan dan sosialisasi.

2. Proses pemberdayaan

Memberdayakan masyarakat memerlukan rangkaian proses yang panjang (tidak seketika). Proses pemberdayaan cenderung dikaitkan sebagai unsur pendorong sosial ekonomi dan politik. Pemberdayaan adalah suatu upaya dan proses bagaimana agar seseorang atau masyarakat mampu berfungsi sebagai *power* dalam mencapai tujuan yaitu pengembangan diri.

Ia mengemukakan pula bahwa pemberdayaan harus mencakup enam hal berikut:

- a. *Learning by doing*. Artinya pemberdayaan adalah sebagai proses hal belajar dan ada suatu tindakan konkrit yang terus menerus dampaknya dapat dilihat.
- b. *Problem solving*. Pemberdayaan harus memberikan arti terjadinya pemecahan masalah yang dirasakan krusial dengan cara dan waktu yang tepat.
- c. *Self evaluation*. Pemberdayaan harus mampu mendorong seseorang atau kelompok tersebut untuk melakukan evaluasi secara mandiri.
- d. *Self development and coordination*. Artinya mendorong agar mampu melakukan hubungan koodinasi dengan pihak lain secara lebih luas.
- e. *Self selection*. Suatu kumpulan yang tumbuh sebagai upaya pemilihan dan peneilaian secara mandiri dalam menetapkan langkaah kedepan.
- f. *Self decisim*. Dalam memilih tindakan yang tepat hendaknya dimilikii kepercayaan diri dalam memutuskan sesuatu secara mandiri. (Saraswati 1997 dalam Alfitri 2011: 24)

Proses pemberdayaan keluarga dapat menggunakan pendekatan Proses Intervensi Pekerjaan Sosial, diantaranya sebagaimana dikemukakan oleh Max Siporin (1975) sebagai berikut:

- a. *Engagement, Intake and Contract,*
- b. *Assessment*
- c. *Planning*
- d. *Intervention*
- e. *Evaluation & Termination,*

atau format lain yang dikemukakan oleh Charles Zastrow (1995), yang meliputi:

- a. *Identfy as precisely as possible the problem (s)*
- b. *Generale possible alternative solutions*
- c. *Evaluate the alternative solutions*
- d. *Select a solution (s) to be used, and set goals*
- e. *Implement the solutions*
- f. *Follow up to evaluate how the solution (s) worked*

Dalam pemberdayaan keluarga Om ini SW menggunakan format proses pemecahan masalah sosial sebagai berikut (Wibhawa 2010:65):



3. Tingkatan keberdayaan

Untuk mengetahui apakah upaya pemberdayaan mampu meningkatkan kondisi klien, penulis menggunakan indikator tingkat keberdayaan, dengan mengacu pada pandangan Susiladiharti dalam Huraerah (2011:103), yang mengemukakan terdapat 5 (lima) tingkat keberdayaan:

- a. Tingkat keberdayaan pertama, adalah terpenuhinya kebutuhan dasar (*basic needs*).
- b. Tingkat keberdayaan kedua, adalah penguasaan dan akses terhadap berbagai sistem dan sumber yang diperlukan.
- c. Tingkat keberdayaan ketiga, adalah dimilikinya kesadaran penuh akan berbagai potensi, kekuatan dan kelemahan diri dan lingkungannya.
- d. Tingkat keberdayaan keempat, adalah kemampuan berpartisipasi secara aktif dalam berbagai kegiatan yang bermanfaat bagi lingkungan yang lebih luas.
- e. Tingkat keberdayaan kelima, adalah kemampuan untuk mengendalikan diri dan lingkungannya. Tingkatan kelima ini dapat dilihat dari keikutsertaan dan dinamika masyarakat dalam mengevaluasi dan mengendalikan berbagai program dan kebijakan institusi.

C. PEMBERDAYAAN KELUARGA OM

Gambaran umum keluarga Om dan persoalannya

Om seorang ibu rumah tangga, berusia 38 tahun, bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Suaminya Som berusia 50 tahun. Mereka dikaruniai 3 anak yaitu Sr berusia 25 tahun, Ww 20 tahun dan R 15 tahun.

The Presenting problem: Om sering mengeluh pusing, encok, kesal dengan suami dan anak-anak dan Om sering kas bon pada keluarga B tempat ia bekerja sebagai pembantu rumah tangga.

1. Hasil Assessment

a. Garis besar hasil assesment dan penaganan kasus Om

Penjelasan secara rinci dilampirkan pada Case Study yang terlampir pada paparan ini:

1) *Kondisi fisik dan kehidupan keluarga OM:*

Berikut gambaran Keluarga Om dengan lingkungan fisik dan sosialnya:



Keluarga Om tinggal di daerah pinggiran kota besar, tepatnya perbatasan kawasan Tangerang Selatan dan Bogor. Mereka tinggal tidak jauh dari kompleks perumahan dikawasan tersebut. Keluarga ini tinggal berdekatan dengan keluarga besarnya.

Om bekerja sebagai pembantu rumah tangga di salah satu keluarga di Kompleks Perumahan tersebut. Som, suami Om bekerja sebagai buruh tani, penjaga pekarangan sekaligus serabutan. Sr anak pertamanya bekerja sebagai penjaga ternak ayam disekitar tempat tinggal keluarga Om. Ww anak keduanya bekerja serabutan, antara lain mengorek pekarangan, bersih-bersih rumah dll. R anak ketiganya tidak sekolah dan tidak bekerja.

2) Latar Belakang Pendidikan

Pendidikan mereka paling tinggi adalah SLTP; Om dan suaminya tamat SD, Sr anak pertama dan Ww anak kedua tamat SLTP, sedangkan anak ketiganya R *drop out* SLTP. Om sering mengeluh tentang anak ketiganya yang malas sekolah dan berakhir *drop out* SLTP tersebut.

3) Hubungan antar anggota keluarga dan dengan lingkungannya

Hubungan antar anggota keluarga di keluarga Om termasuk baik, tidak terjadi konflik yang berarti meskipun Om kadang mengeluh kesal pada suami dan anak-anaknya. Relasi keluarga Om dengan saudara dan tetangganya juga termasuk baik, dan satu sama lain saling mendukung. Hal ini tergambar dari aktivitas Om di lingkungannya melalui keikutsertaannya dalam arisan bersama dan pengajian bersama tetangganya.

b. Identifikasi Masalah

Berdasarkan hasil interview mendalam dan observasi teridentifikasi bahwa akar masalah yang menjadi penyebab Om sering pusing, encok, cemberut, sering kesal dengan suami dan anak-anak adalah karena faktor ekonomi keluarga lemah. Minimnya pemasukan keluarga di satu sisi dan banyaknya kebutuhan yang harus dipenuhi oleh keluarga menyebabkan keluarga Om berulang kali menghadapi kesulitan keuangan dan berulang kali juga meminjam sejumlah dana dari pihak lain.

Penghasilan keluarga Om per bulan	
Som (KK)	Rp .1.440.000,-
Om (isteri)	Rp. 360.000,-
Sy (anak tertua)	<u>Rp. 1.440.000,</u>
Total	Rp. 3.240.000,-

Jumlah tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga; suami-isteri dan 3 (tiga) orang anaknya, yaitu untuk makan, membayar listrik, biaya sosial dan mengangsur motor setiap bulan sebesar Rp 660.000. Om menginformasikan bahwa bahwa pengeluaran yang sering membuat pusing adalah cicilan bulanan motor dan biaya sosial (“kondangan”) yang tak habis-habisnya. Hal ini yang menambah deretan beban kebutuhan keluarga tersebut disamping ia harus mengangsur pinjaman-pinjaman lain. *Jadi kelemahan ekonomi keluarga Om yang menyebabkan munculnya masalah psikososial Om.* Oleh karena itu salah penanganan masalah psikososial ini salah satu pendekatannya dengan pemecahan masalah ekonomi keluarga tersebut.

c. Sumber-sumber internal-eksternal keluarga Om

- 1) Lingkungan tempat tinggal Om adalah perkampungan yang tergolong sejuk sehingga tanam-tanam dapat tumbuh subur. Kondisi ini ditunjang dengan adanya peternakan ayam yang ada dimasyarakat setempat. Hal ini memudahkan masyarakat setempat dalam mendapatkan pupuk organik.
- 2) Keluarga Om memiliki lahan kosong disekitar rumah mereka. Di lahan ini terdapat 3 tanaman papaya gantung (Jenis pohon papaya yang hanya menghasilkan bunga). Pada awalnya adik Om menjual bunga papaya gantung tersebut ke daerah Tanah Abang, disebuah rmah makan Manado, setiap 2 minggu satu kali masing-masing 2 kg dengan harga Rp 10.000,- Jadi dari penjualan ini Om mendapat tambahan penghasilan Rp 20.000,- tiap 2 minggu satu kali. Namun belakangan karena adik Om tersebut tidak bekerja lagi di rumah makan itu maka bunga-bunga tersebut dibiarkan rontok, kecuali jika secara *incidental* terdapat penjual sayuran keliling yang ingin membelinya. Kondisi ini membuat penghasilan keluarga Om menurun walaupun tidak besar.
- 3) Terdapat peluang bagi keluarga Mn mengingat bahwa masakan berbahan dasar bunga papaya merupakan salah satu jenis masakan favorit bagi masyarakat, khususnya suku Manado.

2. Plan of Treatment

a. Sumber-Sumber Eksternal

Untuk merencanakan treatment Social Worker (SW) terlebih dahulu melakukan *assesment* tentang sumber-sumber di lingkungan terdekat Om yang kemungkinan dapat diakses oleh Om dalam mengupayakan pengembangan usaha bunga pepaya tersebut. Maka SW melakukan survai pasar dan mengadakan pendekatan kepada pihak-pihak yang memungkinkan.

- 1) Survai pada lapak-lapak pedagang sayuran di pasar modern BSD



*Gbr. Lapak pedagang sayuran
a.l bunga pepaya*



*Gbr. SW survey harga bunga
papaya pada lapak-lapak di
pasar modern BSD*

Dari survei pasar ini disimpulkan bahwa di lapak-lapak pedagang sayuran tersebut mereka mau membeli bunga pepaya dengan harga Rp 12.500,- per kg.

2) Survei pada penjual masakan khas Manado di pasar modern BSD



Gbr. SW survey harga bunga papaya pada penjual masakan khas Manado di modern BSD

Dari hasil interview kepada penjual-penjual masakan khas Manado di pasar modern BSD, mereka mau membeli bunga pepaya mentah dengan harga Rp 13.000,- per kg, dengan catatan harus rutin, yaitu setidaknya 2 kg setiap dua hari sekali.

3) Menghubungi Ny Mn seorang ibu beretnis Manado, salah seorang anggota WKRI Ranting St Martha, yang pandai memasak masakan khas Manado

Memahami latar belakang Ny Mn tersebut, SW memotivasi agar Ny Mn bersedia melakukan demonstrasi memasak masakan bunga pepaya pada pertemuan Ibu-ibu anggota WKRI Ranting St Martha Serpong. Pertemuan ini dihadiri 30 orang Seusai demo memasak tersebut dan memahami ketertarikan Ibu-ibu pada masakan tersebut, SW menawarkan dan memotivasi kepada Ibu Mn dan atau Ibu-ibu lain untuk mau melanjutkan kegiatan memasak ini sebagai usaha produktif bagi keluarga. Dalam hal ini SW menjamin bahan mentahnya dan menjamin untuk menghubungkan ke Seksi Usaha WKRI Cabang St Monika untuk membantu memasarkan masakan tersebut pada setiap hari Minggu dimana pada setiap Minggu pagi kantin tersebut buka.

Dari survei dan pendekatan tersebut dapat dipahami bahwa menghubungkan Om dengan Ny Mn dapat menjadi alternatif terbaik, artinya lebih efisien dan lebih mudah melakukannya bagi Om dan dengan alternatif ini lebih memungkinkan terbangunnya jaringan kerja yang lebih baik. Maka tujuan dan strategi intervensi dirumuskan sebagai berikut:

b. Tujuan dan Strategi

Tujuan:

- a. Peningkatan penghasilan keluarga-keluarga yang terkait yaitu keluarga Om dan Ny Mn
- b. Peningkatan keterlibatan anggota keluarga dalam pemecahan masalah keluarga

Peningkatan pemanfaatan lahan kosong keluarga agar produktif dengan strategi:

1. Membangun kolaborasi antar sistem klien
2. Membangun jaringan usaha produktif antara Om dengan Ny Mn dan dengan Sie Usaha WKRI Cabang St Monika

3. Treatment Action

SW menghubungkan untuk terbangunnya jaringan Om-Ny Mn- WKRI Cabang St Monika

a. Terhadap klien 1 (Om)

- 1) SW menghubungkan Om kepada Ny Mn. Om sebagai suplyer bunga papaya sedangkan Ny Mn memasaknya. SW juga menghubungkan Ny Mn dengan bidang usaha WKRI Cabang St Monika yang memasarkan masakan Ny Mn.
- 2) SW mendorong Om agar komit dan rajin yaitu setiap hari Sabtu sekalian berangkat kerja membawa paling sedikit 1 kg bunga papaya. Hal ini untuk menjamin berlanjutnya kerjasama dengan Ny Mn dan Sie Usaha WKRI St Monika yang telah bersedia memasarkan masakan Ny Mn.
- 3) SW menjembatani agar terjadi kesepakatan bahwa setiap Sabtu pagi Om meletakkan bunga papaya diteras Sw dan Ny Mn mengambilnya. Hal ini perlu mengingat hal ini jalan yang paling strategis untuk terjadinya transaksi yang efisien mengingat tempat tinggal SW berada di tengah-tengah antara Om dan Ny Mn.
- 4) SW mendorong agar Om melibatkan anak-anak dan suaminya untuk memelihara, memupuk dan menyiram tanaman papaya secara rutin agar tanaman tumbuh subur.
- 5) SW mendorong Om agar mengembangkan tanaman papaya dengan menambah jumlah sesuai dengan lahan yang dimiliki.

b. Terhadap klien 2 (Ny Mn)

- 1) Pada awalnya SW mengajak Ny Mn untuk mendemonstrasikan bagaimana cara memasak sayur bunga papaya didepan kelompok Ibu-ibu anggota WKRI Ranting St Martha, kemudian memotivasi Ny Mn dan atau Ibu-ibu yang lain untuk berusaha memasak bunga papaya dengan menjamin bahwa bahan mentah dan tempat pemasarannya tidak akan terbengkelai, walaupun ibu-ibu sendiri bisa berkreasi mencari bahan dan memasarkan hasil olahannya. Pada akhirnya Ny Mn setuju.
- 2) SW bernegosiasi pada organisasi sosial gereja setempat yaitu WKRI Cabang St Monika untuk menerima masakan Ny Mn dan memasarkan melalui kantinnya di setiap hari Minggu. Pada akhirnya Sie Usaha organisasi ini menyetujuinya.

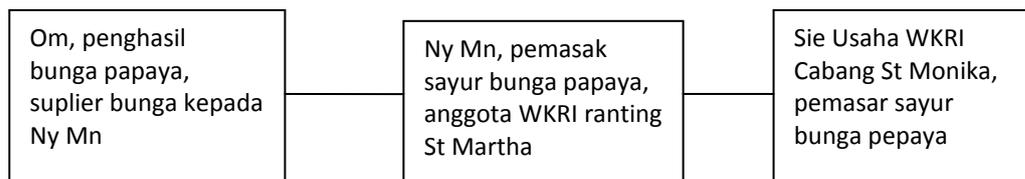
4. Evaluasi dan Terminasi

Hasil pemberdayaan keluarga

Secara garis besar hasil pemberdayaan keluarga Om dan Ny Mn dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Pada akhirnya terbentuk jaringan kerja antara Om, Ny Mn dan Sie Usaha WKRI Cabang St Monika, didukung oleh Pengurus WKRI Ranting St Martha.

Gambaran jaringan kerja tersebut adalah:



Dan pada perkembangannya, WKRI Cabang St Monika memandang kesungguhan berusaha membangun diri dari Om dan Ny Mn, maka pada tanggal 21 Pebruari 2012 Om dan Ny Mn mendapat bantuan berupa dana bergulir untuk tambahan modal usahanya, masing-masing Rp 500.000,- Dana tersebut diserahkan pada rapat Pleno WKRI Cabang St Monika BSD.

- b. Om mengutarakan demikian “ *Ya Bu, alhamdulillah sekarang saya ada tambahan penghasilan rutin, setidaknya setiap hari Sabtu*”. Ungkapan ini menunjukkan tambahnya kelegaan pada diri Om, yang diharapkan berpengaruh pada keluarga sebagai sistem.

Tambahan penghasilan tersebut jika di rata-rata Rp 140.000,- tiap Sabtu. Menurut Om tambahan penghasilan tersebut terutama ia gunakan untuk nenambah pemenuhan kebutuhan sehari-hari seperti beras, membayar listrik. Data secara keseluruhan dapat dilihat pada lampiran paparan ini. Dan dalam buku catatan Om, dari tgl 3 September 2011 s.d 9 Agustus 2014.

- c. Berdasarkan pengamatan SW, kondisi psikologis Om membaik, muka yang cemberut, keluhan pusing-pusing dan encok mereda, demikian pula frekuensi kas bon berkurang.
- d. Demikian pula bagi Ny Mn, ia mendapat tambahan pengahsilan nya rata-rata Rp 84.000,- setiap Minggu pagi, berupa laba usahanya. Ny Mn juga mengutarakan “ *Ya lumayan bu, ada kesibukan, ada tambahan penghasilan dan senang bahwa cucu yang masih sekolah ini rajin membantu Omanyanya mengabil bunga kerumah ibu (SW) setiap Sabtu sore, buat dia belajar tanggung jawab*”.
- e. Upaya Om memanfaatkan lahan sekitar rumah yang memberikan nilai tambah ini ditiru oleh saudara dan tetangganya, sehingga keluarga-keluarga di lingkungan Om hingga saat ini memiliki sejumlah tanaman tersebut. Hasilnya disalurkan oleh Om. Om kemudian berperan semacam pengepul bunga papaya bagi masyarakat sekitar. Dengan kata keberdayaan Om ini menular kepada keluarga-keluarga sekitar Om untuk memanfaatkan lahan sekitar rumahnya.
- f. Terminasi telah dilakukan mengingat Om dan Ny Mn sudah mandiri, bahkan Ny Mn telah berhasil mengkader penerusnya yang usianya relatif lebih muda., yaitu Ny li. Secara kebetulan Ny Mn juga pindah tempat domisili, sehingga tidak mungkin melanjutkan sendiri usaha ini.
- g. Hambatan yang ada ialah:
- 1). Kemarau panjang yang membuat pohon-pohon papaya tidak produktif
 - 2). Pembibitan pohon papaya gantung itu tidak mudah karena selama ini mengandalkan cara konservatif yaitu menunggu setelah pohon berusia sekitar 3 bulan baru bias diketahui jenis pohon tersebut, apakah

jenis papaya biasa atau papaya gantung. Karena itu untuk menambah jumlah pohon membutuhkan waktu panjang.

- 3). Kebiasaan masyarakat setempat menyelenggarakan hajatan relatif besar, yang bagi keluarga hal ini cukup memberatkan, namun keluarga tidak bisa meninggalkan kebiasaan ini.

D. PEMBAHASAN

1. Dalam memberdayakan keluarga Om, SW menerapkan kerangka proses dan metode pemecahan masalah *social case work*. (*assessment, plan of treatment, treatment action, evaluation and termination*). Proses pemberdayaan dengan kerangka kerja ini ternyata dapat mendorong Om dan anggota keluarga untuk mengaktualisasikan potensinya sehingga dapat meningkatkan penghasilan keluarganya yang pada akhirnya berpengaruh pada membaiknya kondisi psikososial Om, kendati tingkat keberdayaannya masih pada tingkat pertama yaitu sebatas dapat dipenuhi kebutuhan dasarnya (*basic needs*).
2. Dalam pemberdayaan ini SW lebih menekankan pada proses menstimuli, mendorong atau memotivasi individu anggota keluarga Om agar sadar akan peluang yang dimiliki yaitu lahan kosong dan pohon-pohon papaya gantung yang sangat mudah dipelihara. Hal ini dapat dijadikan pekerjaan sampingan.
3. Pemberdayaan keluarga menjadi kuat ketika melibatkan instiusi social yang kuat (contoh dalam kasus ini adalah WKRI Cabang dan Ranting) yang diharapkan mampu hadir sebagai sumber yang dapat diakses oleh keluarga-keluarga tersebut. Dalam hal ini peran SW untuk menghubungkan kepada institusi tersebut sangat signifikan. Selain peran sebagai penghubung peran-peran lain yang signifikan dalam pemberdayaan tersebut adalah: peran sebagai pemungkinan dan penguatan.

E. IMPLIKASI DARI PENGALAMAN PEMBERDAYAAN KELUARGA

Berikut implikasi dari pengalaman pemberdayaan keluarga:

1. Ternyata upaya keluarga Om dapat menular atau berpengaruh pada keluarga-keluarga sekitarnya karena munculnya keyakinan akan keberhasilannya. Dalam perspektif pemberdayaan masyarakat pengalaman ini dapat dikembangkan sebagai model pemberdayaan masyarakat, yaitu dimulai dari keluarga-keluarga kemudian berkembang pada masyarakat setempat.
2. Pemberdayaan keluarga dengan model pemanfaatan potensi lingkungan ini dalam perspektif pembangunan social dapat dipandang sebagai pemberdayaan yang bersifat komprehensif mengingat:
 - a. Upaya tersebut dapat mengurangi pemanasan global, karena melalui pemberdayaan ini setiap keluarga dimobilisasi untuk mencintai dan memelihara tanaman, bukan membunuh tanaman walaupun itu tanaman liar.
 - b. Melalui kegiatan tersebut dapat membangun relasi sosial, karena keluarga satu dengan yang lain saling berkolaborasi untuk berusaha. Dalam hal ini terdapat saling ketergantungan. Pemasak tidak bisa memasak tanpa di-*supply* bahan oleh penghasil bunga, dan penghasil bunga akan kesulitan menjual tanpa kehadiran pemasak.

F. KESIMPULAN

Berikut disampaikan beberapa kesimpulan kegiatan pengabdian pada masyarakat ini:

1. Kelemahan ekonomi keluarga (kemiskinan) dapat menjadi faktor munculnya masalah psikososial anggota keluarga. Maka diperlukan upaya pemberdayaan keluarga. Pemberdayaan keluarga menggunakan metode *social case work* dapat meningkatkan keberdayaan keluarga. Dalam hal ini dengan memanfaatkan potensi lingkungan keluarga tersebut. Dalam kasus ini adalah pemanfaatan lahan kosong sekitar rumah dan pemanfaatan tanaman liar papaya gantung yang akhirnya terjadi "*income generating*" keluarga dan sarana peningkatan membangun relasi sosial.
2. Pemberdayaan keluarga melalui pemanfaatan potensi lingkungan keluarga dapat menjadi salah satu model pemberdayaan yang komprehensif dilihat dari perspektif pembangunan sosial dan pembangunan lingkungan. Bahwa aktivitas keluarga Om yang telah diberdayakan tersebut ternyata berpengaruh kepada keluarga-keluarga di masyarakat setempat dimana keluarga-keluarga di lingkungan setempat menirunya dengan memanfaatkan lahan keluarga dan menanam papaya gantung sebagaimana keluarga Om melakukannya.

G. UCAPAN TERIMA KASIH

Bapak/Ibu/Sdr/Sdri dan mahasiswa peserta seminar serta pemerhati masalah-masalah sosial yang terhormat.

Penulis mengucapkan terimakasih atas perhatian, sumbangsaran yang disampaikan. Perlu penulis sampaikan bahwa ruang lingkup studi ini sangat mikro, namun penulis berharap dengan studi ini dapat menyumbangkan pemikiran dan menginspirasi bagi para pendamping keluarga dalam mengupayakan peningkatan kualitas hidup keluarga, khususnya bagi keluarga-keluarga bermasalah yang tinggal di pinggiran kota. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Ketua LK-3 STISIP Widuri yang telah mendukung kegiatan pemberdayaan keluarga ini sebagai bentuk pengabdian pada masyarakat, Dharma ketiga dari Tri Dharma Perguruan Tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Isbandi Rukminto. 2001. *Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat dan Intervensi Komunitas*. Jakarta: Lembaga Penerbit FEUI.
- Alfitri. 2011. *Community Development, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Huraerah, Abu. 2008. *Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat*. Bandung: Humaniora.
- Hikmat, Harry. 2010. *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Humaniora Utama Press.
- Ife, Jime & Frank Tesoriero. 2008. *Community Development, Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi*. Terjemahan oleh Sastrawan Manullang dkk. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ihromi, T.O. 2044. *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Wibhawa, Budhi. 2010. *Dasar-dasar Pekerjaan Sosial*. Bandung: Widya Padjadjaran.

PRAKTIK PEKERJAAN SOSIAL DALAM PENANGANAN MASALAH PSIKOSOSIAL KELUARGA DI LK3 STISIP WIDURI

Studi Kasus di Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) STISIP Widuri

Oleh Flores Mayaut, S.Sos. *)

ABSTRAK

LK3 sebagaimana dimandatkan oleh Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia (Permensos) Nomor 16 Tahun 2013 adalah lembaga yang memberikan pelayanan kepada keluarga yang mengalami masalah psikososial. Dalam memberikan layanannya, LK3 menugaskan pekerja sosial sebagai ujung tombak pelayanan pada masyarakat dibantu dengan tenaga profesi lainnya seperti psikolog, dokter, polisi, ahli agama, ahli ekonomi, dan ahli pendidikan. LK3 STISIP Widuri memprioritaskan, pada hakikatnya terhadap fokus permasalahan dalam keluarga, yaitu masalah Sosial Psikologi keluarga.

Data yang tercatat pada tahun 2014 ini, LK3 STISIP Widuri menangani 7 klien dengan berbagai permasalahan keluarga. Sementara pada penulisan ini penulis mengangkat 1 kasus yang tinggal di Kelurahan Grogol Utara, Jakarta Selatan, dengan identifikasi masalah adalah tidak mampu berinteraksi dengan lingkungan sosialnya dan penyakit yang dideritanya yaitu batuk-batuk.

Penulis menggunakan pendekatan praktek pekerjaan sosial dalam proses pelayanannya yaitu dimulai dengan Pendekatan awal yang meliputi *engagement*, *intake* dan *contract*, pengungkapan dan pemahaman masalah (*assessment*), penyusunan rencana pemecahan masalah (*planning*), Penanganan masalah (*intervention*), monitoring & evaluasi (*evaluation*), dan diakhiri dengan *terminasi*. Penulis dalam pelaksanaan proses tersebut melakukan beberapa peran sesuai dengan kebutuhan yang terjadi dalam penyelesaian masalah klien Sa. Adapun peran-peran pekerja sosial yang digunakan meliputi *problem solver*, *motivator* dan *broker* (Perantara).

Dalam proses intervensi yang dilakukan penulis terhadap klien Sa, LK3 STISIP Widuri, hasil perubahan yang disampaikan adalah pada kasus klien Sa memang masih dalam proses tindak lanjut yaitu a). Sampai saat ini klien sudah melakukan pemeriksaan kesehatannya di puskesmas sudah dilakukan sebanyak 3 kali. Klien diberikan obat untuk meredakan batuknya, namun jika masih belum banyak berubah, maka dokter menyarankan untuk dilakukan tindakan medis di rumah sakit rujukan; b) Klien sudah mulai mengikuti pengajian di lingkungan tempat tinggalnya saat ini yang diajak oleh tetangganya; c) Klien hanya sesekali mengojek, karena faktor angin malam yang menyebabkan klien sering mengalami batuk.

Dalam penanganan kasus tersebut, proses tidak selalu berjalan sesuai dengan harapan penulis. Ada beberapa hambatan yang didapat dalam proses pelaksanaan pelayanan LK3 STISIP Widuri terhadap klien Sa. Adapun hambatan tersebut meliputi a) Kecenderungan klien yang bertahan pada zona nyamannya, sehingga butuh waktu yang cukup lama dalam pelayanan yang diberikan. b) Merubah kebiasaan atau sifat yang dimiliki klien membutuhkan proses panjang, sehingga intensitas kehadiran pekerja sosial cukup tinggi untuk mendampingi klien.

Kata Kunci: praktek pekerjaan sosial, masalah psikososial, intervensi, keluarga

A. LATAR BELAKANG

Paradigma dunia terhadap penanganan masalah sosial tidak lagi terfokus pada substansi kemiskinan, tetapi sudah bergeser pada substansi pembangunan keluarga atau ketahanan keluarga (*family resilience*). Ketahanan Keluarga yaitu kemampuan keluarga dalam mengelola sumberdaya yang dimiliki serta menanggulangi masalah yang dihadapi, untuk dapat memenuhi kebutuhan fisik, mental dan sosial keluarga. Indikator kuatnya ketahanan

*) Sekretaris LK3 (Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga) STISIP Widuri Jakarta

keluarga harus ditandai pula dengan kuatnya ketahanan ekonomi, pendidikan, akhlak atau agama, dan keharmonisan atau hubungan anggota keluarga yang baik.

Bila kita melihat bahwa Pendekatan ekologis mengkaji dinamika hubungan antar sesama anggota keluarga, serta anggota keluarga dengan lingkungannya. Tekanan sosial psikologis dapat terjadi pada anggota keluarga secara perorangan, baik bagi anggota yang mengalami masalah, yang tidak mampu mengatasi masalah, atau mereka mengalami masalah yang bersumber dari lingkungannya. Kondisi lingkungan yang mempengaruhi keluarga perlu dipahami, karena kondisi ini saling berhubungan atau saling mempengaruhi di antara keluarga dengan lingkungannya. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan kemampuan keluarga dalam memanfaatkan sumber-sumber yang tersedia.

Permasalahan keluarga cenderung terus meningkat baik secara kuantitas maupun kualitas, baik di dalam maupun di luar rumah tangga yang ikut mempengaruhi ketahanan keluarga. Beberapa permasalahan dalam rumah tangga antara lain kekerasan, pengasuhan anak, dan perkawinan. Permasalahan di luar rumah tangga seperti konflik yang disebabkan oleh agama, politik, sosial budaya dan ekonomi yang memberi kontribusi terhadap masalah ketahanan keluarga. Masing-masing orang yang ada dalam satu keluarga tersebut akan mencari penyelesaiannya sendiri serta dunianya masing-masing. Pada akhirnya masalah akan datang dan menghampiri mereka. Semua ini berpengaruh terhadap kejiwaan atau psikologis, serta kemampuan berelasi sosial anggota keluarga dalam mengarungi kehidupannya. Secara sosial keluarga akan menanggung dampak psikologis yang berkepanjangan, dan jika permasalahan tersebut tidak ditangani secara serius akan berdampak pada keutuhan keluarga.

Berdasarkan permasalahan diatas, masyarakat membutuhkan media untuk berbagi, berkonsultasi dalam rangka mendapatkan solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh keluarga. Melihat kebutuhan tersebut, sejak tahun 2009, Kementerian Sosial RI melalui Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan membentuk Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) di 485 Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia sebagai bagian dari upaya membantu menemukan solusi permasalahan dalam keluarga, khususnya masalah psikososial.

LK3 sebagaimana dimandatkan oleh Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia (Permensos) Nomor 16 Tahun 2013 adalah lembaga yang memberikan pelayanan kepada keluarga yang mengalami masalah psikososial. Dalam memberikan layanannya, LK3 menugaskan pekerja sosial sebagai ujung tombak pelayanan pada masyarakat dibantu dengan tenaga profesi lainnya seperti psikolog, dokter, polisi, ahli agama, ahli ekonomi, dan ahli pendidikan. Secara umum di dalam permensos tersebut dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan *masalah psikososial adalah kondisi yang dialami seseorang yang disebabkan oleh terganggunya relasi sosial, sikap dan perilaku yang meliputi gangguan pemikiran, perasaan, perilaku dan atau relasi sosial yang secara terus menerus saling mempengaruhi satu sama lain.*

Namun tidak semua permasalahan keluarga dapat ditangani oleh LK3 di STISIP Widuri, meskipun seyogyanya Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) STISIP Widuri dapat membantu mengatasi semua permasalahan keluarga (bertahap), baik secara Sosial-Psikologi ataupun Ekonomi. Akan tetapi, keadaan yang ada dan sesuai dengan kemampuan. LK3 STISIP Widuri memprioritaskan, pada hakikatnya terhadap fokus permasalahan dalam keluarga, yaitu masalah Sosial Psikologi keluarga. Untuk menjawab permasalahan yang ada

di dalam keluarga STISIP Widuri memberikan pelayanan melalui melalui pelayanan konseling, konsultasi, pemberian penyebarluasan informasi, penjangkauan, pemberdayaan dan rujukan melalui konsultan (bidang Ahli) untuk tujuan yang mulia guna membantu mengatasi masalah sosial psikologis keluarga dalam rangka peningkatan taraf kesejahteraan dan ketahanan sosial keluarga.

B. GEJALA MASALAH PSIKOSOSIAL

1. Gejala Yang Terkait dengan Perasaan (Afeksi)

- a. Menghayati berbagai emosi negatif yang dulu tidak pernah, atau jarang dihayati, seperti rasa marah, sedih, putus asa, kehilangan kepercayaan diri, kekhawatiran akan masa depan.
- b. Merasa mudah khawatir, takut berbagai hal yang dulu tidak pernah ditakutinya.
- c. Merasa takut terhadap hal-hal yang dapat mengingatkan kembali akan kejadian yang tidak menyenangkan.
- d. Merasa sedih yang berkaitan dengan kehilangan. Individu merasa khawatir akan terjadi kehilangan lagi, khawatir bahwa orang-orang yang dekat dan disayangi akan meninggal, akan terpisah dari dirinya.

2. Gejala Yang Terkait dengan Aspek Kognisi

- a. Evaluasi negatif tentang kehidupan, kemampuan diri, niat baik dan kemampuan manusia pada umumnya.
- b. Sering memikirkan peristiwa-peristiwa kekerasan (misalnya, peristiwa yang dialaminya atau disaksikan) atau terobsesi pada pikiran-pikiran negatif.
- c. Sulit memusatkan pikiran dan sulit berkreasi.
- d. Tidak berminat pada kegiatan-kegiatan yang dulu disukainya.
- e. Sangat sulit mengambil keputusan meskipun untuk hal-hal yang sederhana

3. Gejala Yang Terkait dengan Tindakan Atau Perilaku (Konasi)

- a. Menampilkan perubahan perilaku, misalnya menjadi pemarah, agresif, menarik diri, tidak peduli kepada orang lain, tidak bertanggung jawab, atau sebaliknya menjadi over protektif pada anak, membatasi aktivitas keluarga, menjadi tergantung dan penuntut.
- b. Kurang bersemangat, hilang nafsu makan
- c. Gelisah, tidak dapat duduk tenang dan tidak dapat memusatkan perhatian dalam waktu yang lebih lama
- d. Khususnya pada kelompok usia remaja dan dewasa muda : perilaku berlebihan untuk mencari perhatian atau untuk membuktikan diri, mencari pelampiasan, kebingungan dan kejenuhan melalui perilaku-perilaku destruktif yang merugikan diri sendiri maupun orang lain (penggunaan obat, minuman keras, judi, hubungan seks bebas, perampasan dan menggertak orang lain).

4. Gejala Yang Terkait dengan Aspek Fisik

- a. Merasa tidak fit, lesu, tidak sehat.
- b. Merasa sakit kepala, mual dan muntah, gangguan perut, sakit di seluruh tubuh, jantung berdetak sangat cepat dan tidak teratur terutama saat merasa ketakutan.

- c. Masalah tidur: lebih sering mengalami mimpi buruk, mudah terbangun oleh suara-suara yang pelan sekalipun, sulit nyenyak, tetap terjaga sampai larut malam.
- d. Pada anak mungkin muncul gejala mengompol, padahal sebelumnya tidak pernah ngompol.

5. Gejala Yang Terkait dengan Hubungan Sosial

- a. Mudah tersinggung, marah dan tidak dapat mengendalikan diri sendiri, kasar, banyak berkonflik dengan orang lain.
- b. Tidak atau sulit mempercayai orang lain lagi, menjadi skeptis tentang segala hal.
- c. Menyendiri, menolak hubungan sosial.
- d. Terlibat dalam kelompok yang melakukan tindakan destruktif dengan menyakiti diri sendiri ataupun orang lain. Melakukan kegiatan yang beresiko tinggi, membangkang, kecanduan obat.
- e. Konsep sosial, moral serta perilaku berubah. Balas dendam dan fanatisme menjadi sangat dominan dalam kehidupan keluarga.

C. PELAKSANAAN PRAKTEK PEKERJAAN SOSIAL

Proses Pelayanan

Proses intervensi pada klien Sa dimulai saat klien sedang dirumah. PS menemui klien diantar oleh seorang teman yang kebetulan bertetangga dengan klien Sa.

Adapun proses praktek pekerjaan sosial yang dilakukan adalah :

1. Pendekatan Awal yang meliputi *Engagement, Intake dan Contract*

- a. Pendekatan awal merupakan :
 - 1) Keterlibatan seseorang didalam suatu situasi, menciptakan komunikasi dan merumuskan hipotesa-hipotesa pendahuluan mengenal permasalahan;
 - 2) Suatu periode dimana pekerja sosial mulai berorientasi terhadap dirinya sendiri, khususnya mengenai tugas-tugas yang ditanganinya;
 - 3) Pelayanan dan penyediaan sumber bagi siapa saja yang membutuhkan dan memenuhi syarat.
- b. Tugas pekerja sosial pada tahap kontak awal (*engagement*) adalah:
 - 1) Melibatkan dirinya dalam situasi tersebut;
 - 2) Menciptakan komunikasi dengan semua orang yang terlibat;
 - 3) Mulai mendefinisikan ukuran / parameter yang berkaitan dengan hal-hal yang akan dilaksanakan;
 - 4) Menciptakan atau membuat suatu struktur kerja awal / pendahuluan.
- c. Pekerja sosial mempunyai tanggungjawab untuk menjalin hubungan dengan klien yaitu melalui cara:
 - 1) Klien datang secara sukarela untuk meminta bantuan (*voluntary application*). Klien biasanya menyadari bahwa mereka mempunyai masalah dan mencoba mengatasi masalahnya dengan berbagai cara namun tidak / kurang berhasil, sehingga klien meminta tolong kepada pekerja sosial.

- 2) *Klien tidak mau datang secara sukarela (involuntary application). Klien berusaha untuk mengatasi hal-hal yang berlawanan dengan keinginannya karena masalah yang dialaminya seperti tekanan sosial dari individu / institusi yang berpengaruh terhadap dirinya, tetapi klien segan meminta bantuan, maka pekerja sosial mempunyai tugas yang paling awal untuk berhubungan dan berkenalan dengan keengganan tersebut.*
 - 3) *Pekerja sosial berusaha untuk mencari klien. Pekerja sosial mempunyai tanggungjawab untuk membantu orang yang bermasalah. Oleh karena itu pekerja sosial akan keluar untuk melibatkan dirinya dengan orang yang tidak aktif mencari bantuan dan tidak direferal agar dapat memperoleh bantuan.*
- d. Kontrak (*contract*), merupakan suatu perumusan dan penyusunan persetujuan kerja guna memperlancar pencapaian tujuan pemecahan masalah. Kontrak ditujukan untuk menciptakan kesepakatan untuk memahami tujuan kerjasama, metode, prosedur yang ditempuh, mendefinisikan peranan dan tugas pekerja sosial serta peranan dan tugas klien. Kontrak dapat terjadi secara formal maupun informal yang bersifat fleksibel dan dibutuhkan untuk mengubah kehidupan melalui relasi pertolongan yang khusus. Dasar pemikirannya yaitu suatu pola kemitraan yang berkaitan dengan situasi yang memerlukan perhatian. Perumusan atau penetapan kontrak dilakukan secara timbal balik antara pekerja sosial dengan klien.

2. Pengungkapan dan pemahaman masalah (*assessment*):

Pengungkapan dan pemahaman masalah (*assessment*) merupakan kegiatan untuk memahami permasalahan, kondisi klien, lingkungan, dan interaksi ketiganya.

Tujuan pengungkapan dan pemahaman masalah yaitu :

- a. Membantu mendefinisikan masalah;
- b. Menunjukkan dan menghubungkan sumber-sumber sesuai dengan masalah dan kebutuhan .

Kegiatan yang dilakukan pekerja sosial dalam tahap pengungkapan dan pemahaman masalah ialah:

- a. Pengumpulan data;

Hal yang penting dalam pengumpulan data adalah menerapkan prinsip dimana, pekerja sosial hanya mengumpulkan informasi yang relevan dengan situasi yang ditanganinya dan kemudian memformulasikan/merumuskan cara-cara melalui penilaian yang valid. Sumber data terutama diperoleh dari klien dan sistem klien. Sumber data juga dapat diperoleh dari catatan, laporan, tes, studi dan evaluasi terhadap berbagai hal yang berhubungan dengan masalah klien. Hal itu dilakukan secara bertahap, terpisah dan simultan.
- b. Pengecekan data

Hal yang perlu diperhatikan oleh pekerja sosial di dalam melakukan pengumpulan data adalah pengecekan data. Pengecekan data dilakukan untuk menjaga akurasi data dan informasi.
- c. Analisa data

Analisa data dapat dilakukan jika data sudah terkumpul secara teruji dan terukur agar benar-benar obyektif.
- d. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan dapat diperoleh jika analisa data sudah dilakukan. Kesimpulan meliputi:

- 1) Fokus masalah klien;
- 2) Kebutuhan klien;
- 3) Sumber-sumber yang dapat dimanfaatkan untuk memecahkan masalah.

Untuk dapat melaksanakan fungsi dan tugas asesmen dengan baik, pekerja sosial perlu mengacu prinsip asesmen yaitu Asesmen pekerja sosial akan menghasilkan keunikan dan keindividualisasian tentang masalah, orang, situasi sosial dan interaksi diantara ketiganya.

3. Penyusunan Rencana Pemecahan Masalah (*Planning*)

Penyusunan rencana pemecahan masalah (*Planning*) merupakan penentuan tujuan untuk mengarahkan secara langsung suatu kegiatan. Penentuan tujuan akan lebih efektif jika ada pembagian proses, dimana klien mempunyai tanggungjawab utama untuk memutuskan kebutuhan yang akan dan perlu dipenuhi serta bagaimana mewujudkannya.

Proses penentuan tujuan merupakan proses timbal balik dalam upaya menemukan kebutuhan yang harus dipenuhi dan tindakan yang perlu diambil guna mengatasi masalah. Pemberian kesempatan dan tanggungjawab kepada klien akan dapat meningkatkan komitmennya dalam proses pemecahan masalah. Klien akan merasa dan menyakini bahwa tujuan yang telah ditetapkan benar-benar sesuai dengan pilihan dan relevan dengan keinginannya. Tujuan dapat memberikan makna dan arah bagi proses pemecahan masalah serta mampu dipergunakan sebagai pedoman dan ukuran bagi kemajuan proses pemecahan masalah. Pekerja sosial perlu memiliki ketrampilan dalam memotivasi klien agar bersedia untuk aktif menyeleksi dan merumuskan tujuan.

4. Penanganan Masalah (*Intervention*)

Penanganan masalah dalam praktek pekerjaan sosial ialah tindakan pekerja sosial yang diarahkan kepada rumusan yang telah ditetapkan dalam perencanaan dengan menggunakan metode dan teknik pekerjaan sosial yang sesuai dengan bidang prakteknya. Pekerja sosial harus mampu merubah perilaku individu juga kondisi lingkungan sosial.

5. Monitoring & Evaluasi (*Evaluation*)

Pekerja sosial harus mampu menguji kemampuan (kemanjuran), ketepatan (akurasi) alternatif penanganan yang diterapkannya juga memonitor faktor yang membawa keberhasilan dan yang mengakibatkan kegagalan. Pekerja sosial hendaknya mengembangkan berbagai strategi agar klien mampu memelihara perubahan yang telah ia capai, klien diharapkan mampu memelihara dan meningkatkan perubahan tersebut dengan tidak menampilkan perilaku disfungsional setelah pertolongan dihentikan.

6. Terminasi (*Termination*)

Terminasi adalah proses pengakhiran pelayanan pekerja sosial kepada klien. Terminasi dilaksanakan berdasarkan evaluasi bersama antara pekerja sosial, klien, dan pihak-pihak terkait lainnya mengenai hasil yang telah dicapai.

D. MASALAH YANG DIHADAPI KLIEN/ FOKUS MASALAH KLIEN

Diskripsi singkat masalah Klien

Klien Sa merupakan warga RT 11 RW 14 kelurahan Grogol Utara. Klien (Sa) adalah pekerja disebuah lembaga pendidikan sebagai tukang kebun. Klien sudah bekerja selama 20 tahun. Penghasilan yang didapat sebesar Rp 1.200.000,- setiap bulan. Klien hanya berpendidikan sampai kelas 3 SD. Hal ini disebabkan karena orangtuanya tidak bisa membiayai sekolahnya pada waktu itu. Klien bekerja dari pagi hingga sore hari. Sepulang kerja terkadang klien menarik ojek di sekitar tempat tinggalnya. Saat ini klien tinggal di rumah kontrakan yang berada di RT 11/14 kelurahan Grogol Utara, Jakarta Selatan. Rumah kontrakannya sangat sempit, dan didiami oleh 4 orang penghuni yaitu klien, istri, anak dan cucu. Hubungan Sa dengan Istri, ke-2 anaknya, 1 mantu dan 2 cucu memiliki hambatan dalam berkomunikasi. Klien tinggal bersama istri, 1 anak dan 1 cucunya. Klien sering sekali pindah kontrakan. Dalam 1 tahun, klien bisa 2 sampai 3 kali pindah kontrakan. Alasan klien pindah-pindah kontrakan biasanya dilatar belakangi oleh masalah pembagian air, listrik, cucunya mengotori rumah tetangga, dll. Klien memiliki sifat pemalu, pendiam dan susah bergaul dengan tetangganya. Selain itu kondisi kesehatan klien juga kurang baik, sering batuk-batuk. Usia klien telah menginjak 65 tahun.

Berdasarkan diskripsi singkat diatas maka pekerja sosial mengidentifikasi permasalahan klien sebagai berikut :

- a. Klien sering pindah-pindah kontrakan
- b. Klien sering tidak cocok dengan tetangga
- c. Klien pemalu, pendiam dan tidak suka bergaul dengan tetangga
- d. Klien sering batuk-batuk

Dalam pelaksanaan intervensi terhadap klien Sa, proses praktek pekerjaan sosial mulai dari pendekatan awal sampai dengan Terminasi. PS dalam pelaksanaan proses tersebut melakukan beberapa peran sesuai dengan kebutuhan yang terjadi dalam penyelesaian masalah klien Sa. Adapun peran-peran pekerja sosial tersebut adalah :

1) *Problem solver*

Membantu klien mencari jalan keluar permasalahannya sehingga ditemukan beberapa alternatif pemecahannya.

Pelaksanaan :

Berdasarkan hasil *assesment*, maka PS mengidentifikasi permasalahan-permasalahan klien dan selanjutnya bersama klien dan keluarga melakukan upaya-upaya untuk mengatasi permasalahannya:

- a. Mengajak bicara klien, apakah klien memiliki keinginan untuk tinggal menetap di satu kontrakan untuk jangka waktu yang lama.
- b. Mengupayakan klien untuk ikut dalam kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh lingkungan.
- c. Sering melakukan silaturahmi dengan tetangga.
- d. Membicarakan bersama tetangga tentang persoalan mengenai masalah pembagian air, listrik, dan sebagainya.

- e. Merujuk ke Institusi kesehatan terkait dengan masalah kesehatan klien, serta mengupayakan bantuan untuk pembiayaannya

2) *Motivator*

PS berperan membantu klien memberikan dorongan agar timbul kesadarannya dalam menghadapi permasalahan sosial serta segera melaksanakan niatnya untuk mencari alternatif pemecahannya.

Pelaksanaan:

- a. Mendorong klien untuk melakukan pendekatan terhadap tetangga dengan melakukan silaturahmi. Langkah awal pekerja sosial adalah mendampingi klien saat memulai percakapan dengan tetangga sekitarnya.
- b. Mendorong klien untuk mencari bahan-bahan pembicaraan bila bertemu dengan tetangga. Disini pekerja sosial membantu dengan mengajak klien untuk melihat kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh tetangga dengan cara mengajak bicara tetangga, sehingga klien bisa masuk ke dalam topik-topik yang menjadi kebiasaannya tersebut.
- c. Mendorong klien untuk mengikuti kegiatan pengajian di lingkungan. Melalui pendekatan ke tetangga atau orang-orang disekitar klien, pekerja sosial meminta untuk sesering mungkin mengajak klien mengikuti pengajian.

3) *Broker (Perantara)*

PS berperan menjadi penghubung klien dengan sistem-sistem sumber

Pelaksanaan :

Kesehatan : merujuk ke puskesmas kelurahan. Pekerja sosial membantu klien dalam pembuatan kartu BPJS. Hal ini dilakukan untuk memeriksa secara gratis untuk masalah kesehatan klien.

E. PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA KLIEN SELAMA PELAYANAN BERLANGSUNG

Dalam proses intervensi yang dilakukan pekerja sosial terhadap klien LK3 STISIP Widuri, hasil perubahan yang disampaikan adalah:

Pada kasus klien Sa memang masih dalam proses tindak lanjut:

- a) Sampai saat ini klien sudah melakukan pemeriksaan kesehatannya di puskesmas sudah dilakukan sebanyak 3 kali. Klien diberikan obat untuk meredakan batuknya, namun jika masih belum banyak berubah, maka dokter menyarankan untuk dilakukan tindakan medis di rumah sakit rujukan.
- b) Klien sudah mulai mengikuti pengajian di lingkungan tempat tinggalnya saat ini yang diajak oleh tetangganya.
- c) Klien hanya sesekali mengojek, karena faktor angin malam yang menyebabkan klien sering mengalami batuk.

F. RENCANA LANJUTAN

Rencana lanjut dengan klien Sa adalah :

- a) PS bersama klien akan menindaklanjuti bila hasil dignosa dokter puskesmas menunjukkan bahwa klien Sa harus diberi tindakan medis ke rumah sakit.
- b) PS bersama klien rutin mengadakan pertemuan untuk membicarakan kemajuan-kemajuan yang dicapai dan hal-hal yang masih harus dibenahi.

G. HAMBATAN DALAM PELAKSANAAN PELAYANAN LK3

Ada beberapa hal yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan pelayanan LK3 STISIP Widuri khususnya menangani klien Sa antara lain :

- a) Kecenderungan klien yang bertahan pada zona nyamannya, sehingga butuh waktu yang cukup lama dalam pelayanan yang diberikan.
- b) Merubah kebiasaan atau sifat yang dimiliki klien membutuhkan proses panjang, sehingga intensitas kehadiran pekerja sosial cukup tinggi untuk mendampingi klien.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Robert, Albert R & Greene, Gilbert J. 2002. *Buku Pintar Pekerja Sosial – Jilid 1*. Jakarta: PT BPK Gunung Mulia.
- Syarif, Muhidin, Msc. 1997. *Pengantar Ilmu Kesejahteraan Sosial*. Bandung: Koperasi Mahasiswa Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial.
- Sukoco, Dwi Heru. 1991. *Profesi Pekerjaan Sosial dan Proses Pertolongan*. Bandung: Koperasi Mahasiswa Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial.
- Wibhawa, Budhi, dkk. 2010. *Dasar-Dasar Pekerjaan Sosial*. Bandung: Widya Padjadjaran.

Sumber Lain :

- Draft Buku Pengantar Penanganan Masalah Psikososial di LK3 oleh Direktorat Pemberdayaan Keluarga dan Kelembagaan Sosial Kementerian Sosial RI.
- Peraturan Menteri Sosial RI No. 16 Tahun 2013, Tentang Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga.

**Intervensi Pekerja Sosial Terhadap Anak-Anak Jalanan
Kategori Rentan yang Putus Sekolah di Wilayah Pusat Grosir Cililitan (PGC):
Studi Kasus di Rumah Singgah Akur Kurnia Jakarta Timur**

Oleh Hastin Trustisari, M.Si^{*)}

ABSTRAK

Rumah Singgah Akur Kurnia adalah Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak yang memberikan pelayanan kepada anak-anak jalanan di 4 titik pelayanan di wilayah Jakarta Timur. Keseluruhan anak-anak jalanan yang dibina oleh Rumah Singgah Akur Kurnia dari 4 titik tersebut berjumlah 230 anak. Banyak kasus anak-anak jalanan dampingan Akur Kurnia yang putus sekolah tidak tertangani dengan tuntas, selain keterbatasan SDM, juga karena penanganan dan pendampingan anak dalam bidang pendidikan tidak berkesinambungan dan tidak konsisten dilakukan oleh Rumah Singgah khususnya untuk anak-anak yang putus sekolah dan ingin melanjutkan sekolah kembali.

Peneliti menerapkan 4 cara pendekatan dalam penanganan klien pada penelitian ini yaitu pendekatan individu untuk klien dan orang tua, pendekatan kelompok untuk teman teman klien, dan orang tua anak-anak jalanan, pendekatan institusi untuk kelembagaan Rumah Singgah Akur Kurnia, dan lembaga pendidikan dan juga pendekatan masyarakat digunakan dalam upaya menghubungkan kebutuhan klien dan lembaga dengan sistem sumber di masyarakat.

Penelitian ini merekomendasikan ke tempat penampungan sebagai penyedia pelayanan kesejahteraan sosial bagi anak-anak jalanan untuk terus meningkatkan program pendidikan, terutama untuk mengirim anak jalanan yang putus sekolah kembali ke sekolah-sekolah. Kasus klien dan proses intervensi klien dapat digunakan sebagai model peran intervensi oleh rumah singgah untuk memberikan pengaruh yang baik bagi anak-anak lain dalam upaya untuk meningkatkan kualitas hidup anak-anak jalanan melalui pendidikan.

Kata kunci: rumah singgah, intervensi, program partisipatif, kesejahteraan sosial

ABSTRACT

The Shelter of Akur Kurnia located is a child welfare institution providing services to street children targeting 4 service sites in East Jakarta. The street children getting services from the Shelter of Akur Kurnia at the 4 service sites are 230 children in total. Many cases of street children getting services from the Shelter of Akur Kurnia and dropping out of school are not handled completely through provision of comprehensive services.

The researcher applies 4 approaches in handling clients in this study, namely an individual approach to the clients and their parents; a group approach to the friends of client and the parents of street children; an institutional approach to the Shelter of Akur Kurnia and the schools; and a societal approach in order to facilitate the need of clients to shelter and the schools with the available resources of society.

This study also recommends to the shelter as a provider of social welfare services for the street children to continuously improve the educational program, especially for sending back the dropping out street children to schools. The case of the client and the client intervention process can be used as a role model of intervention by shelter in order to provide a good influence for the other children in an effort to improve the quality of life of street children through education.

Keywords: shelter, intervention, partisipatory approach, social welfare

^{*)} Penulis aktif di Lembaga Kajian dan Sumber Daya Manusia (Lakpesdam) NU sebagai Program Manager PNPM Peduli Phase1.

A. LATAR BELAKANG

Beberapa tahun terakhir ini, pertumbuhan anak jalanan di Indonesia semakin meningkat, terutama di kota-kota besar. Jakarta adalah salah satu contoh, dimana kita akan sangat mudah menemui anak jalanan di berbagai tempat, mulai dari perempatan lampu merah, stasiun kereta api, terminal, pasar, pertokoan, dan bahkan mal. Pada mulanya ada dua kategori anak jalanan, yaitu anak-anak yang turun ke jalanan dan anak-anak yang ada di jalanan. Namun pada perkembangannya ada penambahan kategori, yaitu anak-anak dari keluarga yang ada di jalanan.

Tahun 2013, data Dinas Sosial DKI Jakarta mencatat, sebanyak 7.300 anak jalanan di Jakarta. Jumlah itu meningkat sekitar 10 persen dari tahun lalu. Kemiskinan adalah penyebab utama mengapa anak jalanan terus bertambah jumlahnya. Kemiskinan juga inheren dengan kebodohan. Pendidikan adalah sebuah hak asasi sekaligus sebuah sarana untuk merealisasikan hak-hak asasi manusia lainnya. Sebagai hak pemampuan, pendidikan adalah sarana utama dimana orang dewasa dan terutama anak-anak yang dimarjinalkan secara ekonomi dan sosial dapat mengangkat diri mereka keluar dari kemiskinan dan memperoleh cara untuk terlibat dalam komunitas mereka. Sedangkan, berdasarkan fakta di Rumah Singgah Akur Kurnia Jakarta Timur terdapat data yang tercatat⁵ Tahun 2012 sebanyak 230 anak yang didampingi Rumah Singgah Akur Kurnia dari 4 lokasi dampingan dengan usia sekolah SD/SMP, hanya 25 % anak yang melanjutkan pendidikan/ pernah sekolah (20% tercatat melanjutkan di PKBM Akur Kurnia dan mengikuti paket kejar A dan B, sedangkan 5% tercatat anak-anak bersekolah di sekolah formal negeri).

Dalam konteks pemenuhan hak atas pendidikan, negara menjadi pihak utama yang bertanggung jawab untuk menjaminkannya. Pada Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terdapat penegasan bahwa negara dalam hal ini pemerintah memiliki tanggung jawab memberikan biaya pendidikan dan/atau bantuan cuma-cuma atau pelayanan khusus bagi anak dari keluarga tidak mampu, anak terlantar, dan anak yang bertempat tinggal di daerah terpencil.

Mengacu hal tersebut, tentunya anak menjadi prioritas utama dalam pendidikan, tidak terkecuali untuk anak jalanan. Pendidikan memainkan sebuah peranan penting untuk memberdayakan dan melindungi anak-anak dari eksploitasi kerja dan seksual yang berbahaya, karena anak merupakan salah satu kelompok yang rentan terhadap pelanggaran HAM dan memerlukan bantuan orang dewasa dalam melindungi hak-haknya. Perlindungan anak di sini tidak hanya sampai pada pemenuhan hak hidup, namun juga memastikan bahwa mereka mendapatkan hak mengenyam pendidikan yang sesuai dengan tumbuh kembangnya.⁶ Persoalan yang kemudian muncul adalah pada kenyataannya masih banyak anak-anak jalanan pada umumnya berada pada usia sekolah, usia produktif, mereka tidak mempunyai kesempatan yang sama seperti anak-anak yang lain, meskipun mereka adalah warga negara yang berhak mendapatkan pelayanan pendidikan, tetapi di sisi lain mereka tidak bisa meninggalkan kebiasaan mencari penghidupan di jalanan sebagai bagian untuk memenuhi tuntutan hidup.

⁵ Data anak yang bersekolah di PKBM Akur Kurnia Tahun Ajaran 2011-2012.

⁶ Nono Sumarsono, *Children Mainstreaming, Suatu Peluang dan Tantangan*, dalam *Jurnalisme Anak Pinggiran*, Jakarta, Kelompok Kerja Anak Pinggiran, 1999, hal 36.

B. TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini mempunyai tujuan untuk:

1. Mendiskripsikan pelaksanaan intervensi Pekerja Sosial pada anak jalanan kategori rentan yang putus sekolah di wilayah PGC yang didampingi Rumah Singgah Akur Kurnia Jaktim
2. Mendiskripsikan hasil intervensi Pekerja Sosial pada anak jalanan kategori rentan yang putus sekolah di wilayah PGC yang didampingi Rumah Singgah Akur Kurnia Jaktim .

C. DEFINISI TENTANG ANAK JALANAN DAN RUMAH SINGGAH

1. Anak Jalanan

Untuk memahami anak jalanan secara utuh, kita harus mengetahui definisi anak jalanan terlebih dahulu. UNICEF memberikan batasan tentang anak jalanan, yaitu : *Street child are those who have abandoned their homes, school and immediate communities before they are sixteen years of age, and have drifted into a nomadic street life*⁷ (anak jalanan merupakan anak-anak berumur dibawah 16 tahun yang sudah melepaskan diri dari keluarga, sekolah dan lingkungan masyarakat terdekatnya, larut dalam kehidupan yang berpindah-pindah di jalan raya (H.A Soedijar, 1988 : 16).

Sedangkan menurut Tata Sudrajat (1999:5) anak jalanan dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok berdasarkan hubungan dengan orang tuanya⁸, yaitu : **Pertama**, Anak yang putus hubungan dengan orang tuanya, tidak sekolah dan tinggal di jalanan (anak yang hidup di jalanan / *children the street*). **Kedua**, anak yang berhubungan tidak teratur dengan orang tuanya, tidak sekolah, kembali ke orang tuanya seminggu sekali, dua minggu sekali, dua bulan atau tiga bulan sekali biasa disebut anak yang bekerja di jalanan (*Children on the street*) **Ketiga**, Anak-anak yang berasal dari keluarga yang tinggal di jalan (*Children from families of the street*). Anak anak ini mempunyai hubungan dengan keluarga yang sangat kuat, namun hidupnya terombang ambing dari satu tempat ke tempat lainnya. Biasanya dari bagi, orang tuanya merrka mengasuh anak anaknya di jalan.

Mengacu ada kedua definisi diatas, peneliti dalam menentukan kategori anak jalanan mengambil batasan berdasarkan Hasil penelitian Kemensos RI dengan UNDP di Jakarta dan Bandung (BKSN, 2000: 2-4), anak jalanan di bedakan dalam 4 kategori antara lain:

a. Anak yang hidup /tinggal di jalan, dengan kriteria antara lain:

- Putus dengan keluarga / lama tidak bertemu dengan keluarga
- Berada 8-10 jam sehari untuk “bekerja” (mengemis, mengamen,dll) , selebihnya menggelandang atau tidur di jalan
- Tidak lagi bersekolah
- Berusia diantara 14 tahun.

b. Anak jalanan yang bekerja di jalanan, kriteria antara lain :

- Berhubungan dengan tidak teratur dengan keluarga
- 8 – 16 jam berada di jalan

⁷ Lihat H.A Soedijar (1988 : 16).

⁸ Penelitian Tata Sudrajat tahun 1999 : 5 dengan judul Isu prioritas dan Program Intervensi untuk Menangani Anak Jalanan.

- Mengontrak rumah bersama teman teman / saudara/ keluarganya. Uummnya menempati di daerah kumuh.
- Tidak lagi bersekolah
- Pekerjaan ; penjual Koran, pengasong, pencuci bus, pemulung, penyemir sepatu, dll
- Berusia rata rata sekitar 16 tahun.

c. Anak yang rentan menjadi anak jalanan, dengan kriteria antara lain :

- Bertemu setiap hari dengan orang tua dan tinggal bersama dengan keluarga.
- Berada antara 4- 5 jam di jalanan untuk aktifitas mencari uang/ penghasilan tambahan.
- Rata rata masih sekolah/ pernah sekolah
- Pekerjaan: Penjual Koran, penyemir, pengamen.
- Berusia antara 11 – 15 tahun.

d. Anak-anak jalanan yang berusia di atas 16 tahun, dengan criteria antara lain :

- Mereka berada di jalanan untuk mencari kerja, atau masih labil suatu pekerjaan.
- Umumnya mereka telah lulus SD bahkan ada yang SLTP. Mereka biasanya kaum urban yang mengikuti orang dewasa (orang tua ataupun saudaranya) ke kota.
- Pekerjaan mereka biasanya mencuci bus, menyemir sepatu, membawa barang belanjaan (kuli panggul), pengasong, pengamen, pengemis dan pemulung.

2. Rumah Singgah

Salah satu bentuk penanganan anak jalanan tersebut adalah melalui pembentukan dan pemberdayaan fungsi rumah singgah. Menurut Departemen Sosial RI rumah singgah didefinisikan sebagai perantara anak jalanan dengan pihak-pihak yang akan membantu mereka. Rumah Singgah merupakan proses informal yang memberikan suasana pusat realisasi anak jalanan terhadap sistem nilai dan norma di masyarakat.

Secara umum tujuan dibentuknya Rumah Singgah adalah membantu anak jalanan mengatasi masalah-masalahnya dan menemukan alternatif untuk pemenuhan kebutuhan hidupnya. Sementara Peran dan fungsi rumah singgah bagi program pemberdayaan anak jalanan sangat penting. Secara ringkas fungsi rumah singgah antara lain:

- a. Sebagai *tempat pertemuan (meeting point)* pekerja sosial dan anak jalanan. Dalam hal ini sebagai tempat untuk terciptanya persahabatan dan keterbukaan antara anak jalanan dengan pekerja sosial dalam menentukan dan melakukan berbagai aktivitas pembinaan.
- b. *Pusat diagnosa dan rujukan.* Dalam hal ini Rumah Singgah berfungsi sebagi tempat melakukan diagnosa terhadap kebutuhan dan masalah anak jalanan serta melakukan rujukan pelayanan sosial bagi anak jalanan.
- c. *Fasilitator* atau sebagai perantara anak jalanan dengan keluarga, keluarga pengganti, dan lembaga lainnya.
- d. *Perlindungan.* Rumah Singgah dipandang sebagai tempat berlindung dari berbagai bentuk kekerasan yang kerap menimpa anak jalanan dari kekerasan dan perilaku penyimpangan seksual ataupun berbagai bentuk kekerasan lainnya.
- e. *Pusat informasi* tentang anak jalanan
- f. *Kuratif dan rehabilitatif*, yaitu fungsi mengembalikan dan menanamkan fungsi sosial anak.

- g. *Akses terhadap pelayanan*, yaitu sebagai persinggahan sementara anak jalanan dan sekaligus akses kepada berbagai pelayanan sosial.
- h. *Resosialisasi*. Lokasi rumah singgah yang berada ditengah-tengah masyarakat merupakan salah satu upaya mengenalkan kembali norma, situasi dan kehidupan bermasyarakat bagi anak jalanan. Pada sisi lain mengarah pada pengakuan, tanggung jawab dan upaya warga masyarakat terhadap penanganan masalah anak jalanan.

D. PENDEKATAN/ LANDASAN TEORI YANG DIGUNAKAN

Pendekatan dalam penelitian ini adalah lebih menekankan pendekatan pekerjaan sosial yang menggunakan pendekatan *casework*, *groupwork* dan juga institusi (klien, keluarga klien dan lingkungan dan lembaga) disamping pendekatan lain sebagai penunjang. Teori dan pendekatan yang digunakan oleh peneliti semata mata digunakan untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif tentang klien, keluarga dan lingkungan klien dan untuk memberikan alternatif dalam menyelesaikan permasalahan klien. Terdapat beberapa pendekatan teoritis yang digunakan dalam perubahan berencana dalam penelitian ini antara lain adalah:

1. Teori Biopsikososial

Peneliti menganggap penting teori biopsikososial digunakan dalam proses penelitian ini khususnya dalam mengasesemen klien dan keluarga dalam mengenali kebutuhan dan kemampuannya dalam proses untuk melanjutkan sekolah. Informasi dan data yang diperoleh penelitian ini sebagai dasar *case study* dan *case conference* yang digunakan oleh peneliti dalam proses mengintervensi klien dan keluarga untuk mendapatkan dukungan dari lembaga terkait sesuai dengan kebutuhan klien dan keluarga.

Menurut Meyer (1993) dalam Buku Pintar Pekerja Sosial⁹ proses assesment terdiri dari 5 langkah yaitu: (1) *Exploration* (2) *inferential thinking*, (3) *Evaluation*, (4) *Problem Definition* dan (5) *Intervention Planning*.

Teori ini menjadi langkah rujukan peneliti dalam langkah kerja melakukan need assesment klien dan keluarga untuk mengungkapkan masalah dan kebutuhan yang pada akhirnya data menjadi dasar intervensi dan rujukan pengambilan keputusan klien. Pada tahap ini kurang tepatnya dalam menggali informasi dan data dapat berpengaruh pada penyusunan rencana intervensi secara optimal.

2. Teori tentang Perubahan Perilaku

Peneliti melihat bahwa teori perubahan perilaku ini dalam konteks perilaku anak jalanan yang putus sekolah, sangat diperlukan untuk melihat lebih jauh perilaku yang tampak dan dipengaruhi oleh lingkungan sekitar, teman maupun keluarganya. Perilaku yang muncul dari apa yang ditampakkan oleh anak jalanan tidak dapat dilihat dalam satu sisi saja dan memerlukan asesmen yang mendalam terkait hal tersebut. Beberapa pedoman asesmen perilaku meliputi:

1. Menyepakati perilaku yang ingin dirubah
2. Memahami faktor-faktor yang menyebabkan munculnya perilaku yang ingin diubah (*stimulus*)
3. Memahami faktor-faktor yang dapat mempertahankan perilaku yang ingin diubah.
4. Memahami faktor-faktor yang dapat mencegah perilaku yang ingin diubah.

5. Memahami faktor-faktor yang mendahului munculnya perilaku yang ingin diubah (*Antecedents*).
6. Memahami akibat- akibat negatif maupun positif dari perilaku yang ingin diubah terhadap kondisi fisik, psikologis dan sosial anak.
7. Memahami hal hal yang dapat member kepuasan terhadap anak.
8. Memahami perilaku-perilaku positif lain yang dapat menghasilkan kepuasan yang lebih atau sama dengan perilaku yang ingin diubah (penguatan positif)
9. Memahami perilaku yang menghambat munculnya perilaku positif (penguatan negatif)
10. Menentukan orang orang yang dekat dengan anak dan memiliki kemampuan, kesenjangan waktu untuk melaksanakan proses perubahan perilaku bersama anak (sistem klien)

3. Teori Manusia dan Lingkungan Sosial

Upaya Pekerja Sosial dalam penguatan kepribadian klien dalam mencapai tujuannya tidak lepas dari unsur lingkungan dimana individu tersebut tinggal.

Menurut Achlis, 1998:40 "*Terdapat 2 fakta yang melandasi teori kepribadian adalah (1),kehidupan ini dimanis (2),manusia berkembang melalui adaptasi terhadap tuntutan yang senantiasa berubah, baik tuntutan yang berasal dari diri sendiri maupun lingkungannya*".

Dengan demikian jelas Pekerja Sosial harus mampu melakukan pendekatan bukan hanya kepada klien, keluarga, namun juga lingkungan sekitarnya. Hal ini menjadi penting, karena klien sebagaimana makhluk yang dinamis, yang mempunyai keterkaitan sangat kuat dengan lingkungan dimana klien tinggal maupun bergaul dalam kehidupan sosialnya. Memahami lingkungan klien, dapat membantu Pekerja Sosial mengetahui dan mendalami kebutuhan dan masalah serta pengaruh-pengaruh apa saja yang mungkin muncul mempengaruhi kepribadian dan keputusan klien sehingga dapat mengambat atau memperkuat proses layanan.

E. HASIL INTERVENSI DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Situasi Fakta lapangan:

- a. Data yang tercatat¹⁰ Tahun 2012 sebanyak 230 anak yang didampingi Rumah Singgah Akur Kurnia dari 4 lokasi dampingan dengan usia sekolah SD/SMP, hanya 25 % anak yang melanjutkan pendidikan/pernah sekolah (20% tercatat melanjutkan di PKBM Akur Kurnia dan mengikuti paket kejar A dan B , sedangkan 5% tercatat anak anak bersekolah di sekolah formal negeri).
- b. Banyak kasus dampingan Akur Kurnia yang putus sekolah tidak tertangani dengan tuntas, selain keterbatasan SDM (hanya memiliki 2 Pekerja Sosial dan 1 koordinator lapangan) dikarenakan juga karena penanganan dan pendampingan tidak berkesinambungan dan tidak konsisten dilakukan oleh Rumah Singgah.
- c. Rumah Singgah Akur Kurnia sangat minim mempunyai data maupun *lesson learn* penanganan terkait dengan kasus anak jalanan yang putus sekolah khususnya anak yang berada di sekolah formal/ sekolah negeri. Di beberapa kasus anak yang meninggalkan sekolah, tidak diketahui secara jelas oleh pihak Rumah Singgah.

⁹ Lihat *Buku Pintar Pekerja Sosial* (Jilid 1), hal 27-42, Gunung Mulia, 2008

- d. Persepsi yang berkembang, bahwa anak jalanan rentan dapat melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Hal ini disebabkan karena anak jalanan berperilaku mal adaptif di sekolah, sehingga “label” anak nakal dan susah diatur terlanjur melekat di sekolah. Asumsi ini ada bukan tanpa alasan, karena pada faktanya beberapa pengalaman kejadian terkait dengan keberadaan anak jalanan yang pernah dirujuk oleh pihak Rumah Singgah selalu berakhir dengan adanya kasus yang berakibat persepsi tersebut makin kuat.
- e. Pihak penyelenggara pendidikan formal seringkali banyak pertimbangan (menolak) dan sangat hati-hati untuk menerima keberadaan anak jalanan berada di lingkungan sekolah mereka, karena sekolah mengantisipasi pengaruh negatif yang dapat dibawa oleh anak jalanan. Biasanya pihak sekolah meminta pihak yang bertanggung jawab yang dapat bertanggungjawab atas keberadaan anak jalanan di sekolah mereka (karena tidak dipungkiri beberapa kasus anak jalanan yang berperilaku negatif disekolah seperti mencuri, selalu berbuat keributan, minim prestasi akademik, dst).
- f. Bagi anak jalanan, persepsi dan fakta yang sudah terlanjur melekat pada diri mereka menyebabkan dampak psikologis yang luar biasa, misalnya rasa rendah diri, merasa tidak memiliki kesempatan yang sama, diskriminasi, stigma, dll. Sehingga keterbatasan hak mereka untuk melanjutkan kehidupan yang lebih baik melalui pendidikan yang berkualitas terkadang hanya merupakan impian dan jauh dari kenyataan yang sebenarnya.
- g. Bagi penyelenggara Rumah Singgah, seringkali anak jalanan hanya dirujuk ke pelayanan pendidikan non pemerintah sebagai solusi ketika anak ingin melanjutkan sekolah. Faktanya sekolah non pemerintah/ Pendidikan non formal yang lebih leluasa menerima anak tanpa melihat latar pendidikan atau lingkungan sebelumnya, namun anak harus mengeluarkan banyak biaya untuk bersekolah. Karena untuk masuk ke sekolah formal negeri banyak sekali kendala yang terjadi, baik dari sisi anak, keluarga dan pihak sekolah itu sendiri.
- h. Masalah klien diketahui oleh pihak Rumah Singgah namun klien belum mendapat pelayanan rujukan dan tidak pernah dilakukan asesmen secara mendalam.
- i. Klien mendapatkan bantuan Program Kesejahteraan Anak (PKSA) dari Kementerian Sosial berupa tabungan sebesar Rp. 1.200.000,-/tahun untuk membantu kebutuhan sarana dan prasarana sekolah. Faktanya, Tabungan tersebut banyak digunakan untuk keperluan kebutuhan orang tua (membayar kontrakan, membeli sembako) dan belum digunakan secara maksimal sesuai dengan tujuan program (saana prasarana pendidikan).
- j. Program yang dijalankan belum partisipatoris, masih *project oriented* dan bersifat residual, sehingga membentuk watak anak-anak jalanan dan orang tua terbiasa menerima bantuan tanpa harus mengupayakan untuk memperolehnya.

2. Pendekatan yang Dilakukan dalam Proses Intervensi

Peneliti menerapkan 4 cara pendekatan dalam intervensi klien pada penelitian ini antara lain:

- a. Pendekatan case work/ individu

¹⁰ Data anak yang bersekolah di PKBM Akur Kurnia Tahun Ajaran 2011-2012

Pendekatan ini dilakukan peneliti untuk mengidentifikasi profil klien dan juga pendalaman harapan dan kebutuhan klien dan keluarga. Dalam penerapannya, pendekatan individu pada ke 2 klien dan keluarganya dilakukan dengan cara yang berbeda, karena setiap klien adalah unik. *Home visit*, observasi lapangan, *depth interview*, adalah cara yang dilakukan oleh peneliti untuk menerapkan pendekatan ini.

b. Pendekatan group work/ kelompok

- Pendekatan kelompok ini penting karena kelompok teman-teman mempunyai pengaruh yang besar terhadap perilaku dan harapan klien dalam menentukan pilihan sekolah. Observasi lapangan, FGD dengan kelompok di lapangan adalah cara yang digunakan peneliti pada pendekatan ini.

- Pendekatan dengan para orang tua anak jalanan (*Parent Support*)

Kegiatan ini dilakukan pada saat kegiatan arisan orang tua di Rumah Singgah. Arisan orang tua binaan Rumah Singgah dilakukan sebulan sekali. Peneliti mengambil kesempatan tersebut untuk turut serta menumbuhkan motivasi dan dukungan orang tua terhadap hal-hal positif yang dapat diupayakan demi menyiapkan masa depan anak-anak melalui pendidikan. Disamping itu peneliti juga memberikan gambaran tentang risiko yang dialami anak-anak ketika harus terus berada di jalan dan tidak lagi bersekolah, melalui *game* yang tidak menjenuhkan orangtua.

c. Pendekatan institusi / kelembagaan

Pendekatan institusi juga merupakan bagian penting dalam proses pelaksanaan intervensi klien. Penting karena pelaksanaan intervensi klien merupakan bagian dari upaya pemberdayaan dan kemandirian yang merupakan misi lembaga. Selain berorientasi pada upaya intervensi klien dan keluarga, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai upaya pengembangan program lembaga dalam upaya penanganan masalah anak jalanan khususnya dalam bidang pendidikan. Melalui pendekatan ini, peneliti melibatkan staf lembaga dalam semua proses tahapan intervensi yang dilakukan kepada klien dan keluarga. Harapannya staf lembaga dapat mengambil pembelajaran dalam upaya pengembangan dalam upaya pendekatan dan penanganan masalah pendidikan terhadap anak jalanan.

d. Pendekatan Masyarakat

Pendekatan ini digunakan dalam upaya menghubungkan kebutuhan klien dan lembaga termasuk didalamnya untuk mencari donatur untuk pendidikan. Peneliti melakukan **Kegiatan Belajar Bersama** dengan anak-anak (bukan komunitas jalanan). Kegiatan ini ternyata membawa dampak baik untuk anak-anak jalanan dan yang diluar komunitas jalanan. Mereka menjadi inklusi dan saling menghargai, serta mengurangi diskriminasi terhadap anak jalanan.

3. Hasil Intervensi

Selama kurun waktu pelaksanaan penelitian yang dilakukan peneliti, berikut rangkuman hasil intervensi dan dampak penelitian antara lain:

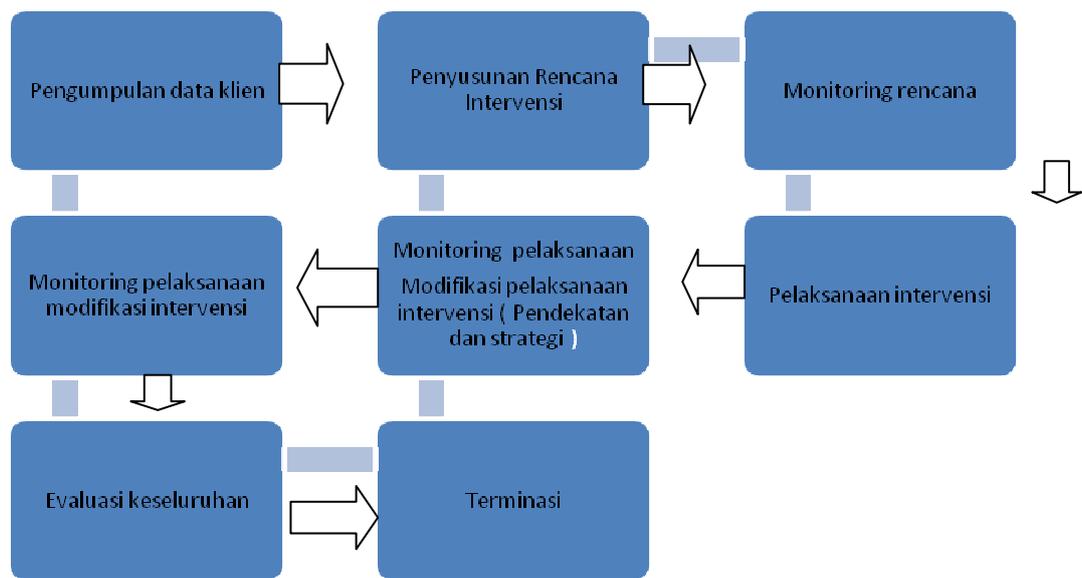
Tabel 1. Hasil Intervensi

No	Fokus kegiatan	Hasil kegiatan
1	Klien dan keluarga	<p>Klien :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Klien memahami tentang kebutuhan dan masalahnya sendiri (meskipun memerlukan waktu lama untuk memberikan pemahaman terhadap klien tentang kebutuhan dan masalahnya terkait dengan melanjutkan sekolah) • Klien mampu menentukan pilihan untuk pengembangan dirinya (mampu memilih sekolah) • Klien mau terlibat dalam upaya penyusunan intervensi untuk dirinya sendiri (dengan pendampingan Pekerja Sosial Rumah Singgah) • Klien mengetahui tentang tantangan dan peluang dalam menentukan masa depannya. • Klien memahami risiko menjadi anak jalanan dan risiko jika tidak melanjutkan sekolah.
		<p>Keluarga</p> <ul style="list-style-type: none"> • Orang tua terlibat dalam merumuskan masalah dan tujuan klien untuk melanjutkan sekolah • Orang tua ikut serta dalam proses mencari sekolah dan memberikan keterangan kepada pihak sekolah • Orangtua kooperatif dalam melengkapi syarat administrative yang perlu dilengkapi.
2	Kelompok	<p>Kelompok geng klien:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Teman teman / geng klien mengamen di jalan mengetahui rencana klien untuk meneruskan sekolahnya. • Teman teman klien bersedia bertemu dan mau diajak komunikasi dengan peneliti tentang rencana klien meneruskan pendidikannya. <p>Kelompok orang tua anak jalanan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Orang tua belajar memahami bahwa pendidikan untuk anak jalanan itu sangat mungkin dilakukan dan diupayakan jika ada niat dan kemauan dari anak dan orang tua. • Orang tua belajar menggambarkan risiko dan tantangan jika anak anak mereka hidup dijalan. • Orang tua belajar mengeluarkan pendapat dan menjadi pendengar yang baik.
3	Lembaga	<ul style="list-style-type: none"> • Staf lembaga dapat memahami tujuan dari Case Conference/ pembahasan kasus (CC) • CC dapat dilakukan pada awal perencanaan dan pelaksanaan intervensi dan belum dapat dilakukan sampai tahap evaluasi pelaksanaan intervensi. • Staf lembaga mulai berkoordinasi dalam tim kecil dalam upaya penanganan intervensi klien. • Staf lembaga dapat mengembangkan model /Modifikasi intervensi dalam upaya penanganan klien. • Adanya pemahaman bahwa dalam upaya penanganan masalah anak jalanan perlu proses panjang dan memerlukan koordinasi tim yang solid. • Langkah langkah yang diterapkan oleh peneliti dapat dijadikan rekomendasi dalam upaya penanganan masalah anak jalanan khususnya dalam upaya menyusun program untuk memastikan keberlanjutan pendidikan anak jalanan. • Bertambahnya jaringan sistem sumber layanan pendidikan yang dapat dikembangkan oleh Rumah Singgah (SDN 06 Kramat Jati).
4	Lingkungan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya donatur yang dapat menjadi orang tua asuh dan memberikan dana pendidikan untuk klien (1 donatur). • Muncunya inisiasi dari peneliti untuk mengadakan ujicoba belajar bersama anak jalanan dengan anak anak diluar komunitas sesama kelas 5 SD .

Tabel 2. Dampak Penelitian

No	Fokus	Dampak
1	Klien N Klien R	<ul style="list-style-type: none"> • Klien berinisiatif mencari info tentang ujian persamaan • Klien mampu mengusulkan alternatif pilihan dalam merencanakan sekolahnya. • Klien mulai dapat mengatur waktunya antara mengamen dan sekolah. • Klien berinisiatif mengurangi jam mengamen di jalan. • Klien dapat menyusun jadwal belajar. • Klien membatasi mengamen di jalan hanya sampai jam 9 malam (sebelumnya sampai jam 11 malam). • Klien punya inisiatif untuk mengikuti belajar tambahan (les).
	Keluarga	<ul style="list-style-type: none"> • Keluarga mulai memahami bahwa keberhasilan dan kegagalan upaya mencapai tujuan bagi anak adalah ditentukan oleh anak sendiri dan dukungan keluarga dan bukan pihak lain. (bukan pada Rumah Singgah ataupun peneliti).
2.	Kelompok	<p>Teman–teman klien:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Muncul keinginan anggota kelompok klien ntuk meneruskan sekolah jika klien berhasil melanjutkan sekolah. <p>Kelompok orang tua:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mulai ada inisiatif untuk mengeluarkan pendapat, bertanya dan juga menjawab pertanyaan tentang pentingnya pendidikan untuk anak anaknya.
3.	Lembaga	<ul style="list-style-type: none"> • Program pengembangan keberlanjutan sekolah dijadikan <i>lesson learnt</i> dalam upaya intervensi layanan pendidikan untuk anak jalanan. • Munculnya kesepakatan antara Ketua Rumah Singgah dan Staf dalam upaya uji coba meneruskan program melanjutkan pendidikan untuk anak anak jalanan yang berpotensi dan mempunyai kemauan tinggi melanjutkan sekolah. • Rumah Singgah akan meneruskan program orang tua asuh khusus untuk anak yang ingin melanjutkan sekolah. • Didapatkannya orang tua asuh yang mensuport anak-anak jalanan untuk menerusakn sekolah menjadikan inspirasi tersendiri baik bagi teman teman klien dan juga lembaga.
4.	Lingkungan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Muncul pemahaman dari anak-anak (di luar komunitas anak jalanan), yang pernah belajar bersama anak jalanan, bahwa anak jalanan mempunyai banyak kelebihan dan menyenangkan. • Bagi Guru pengajar SDN 06 Kramat Jati, keberadaan klien menjadi bukti program inklusi.

Gambar pelaksanaan tahap intervensi klien berlangsung antara lain:



4. Exit Strategi yang Digunakan

Kegiatan *Charity* “Membatik Bersama Anak Jalanan” Membuka Jalan Pelibatan Pihak Lain (Donatur)

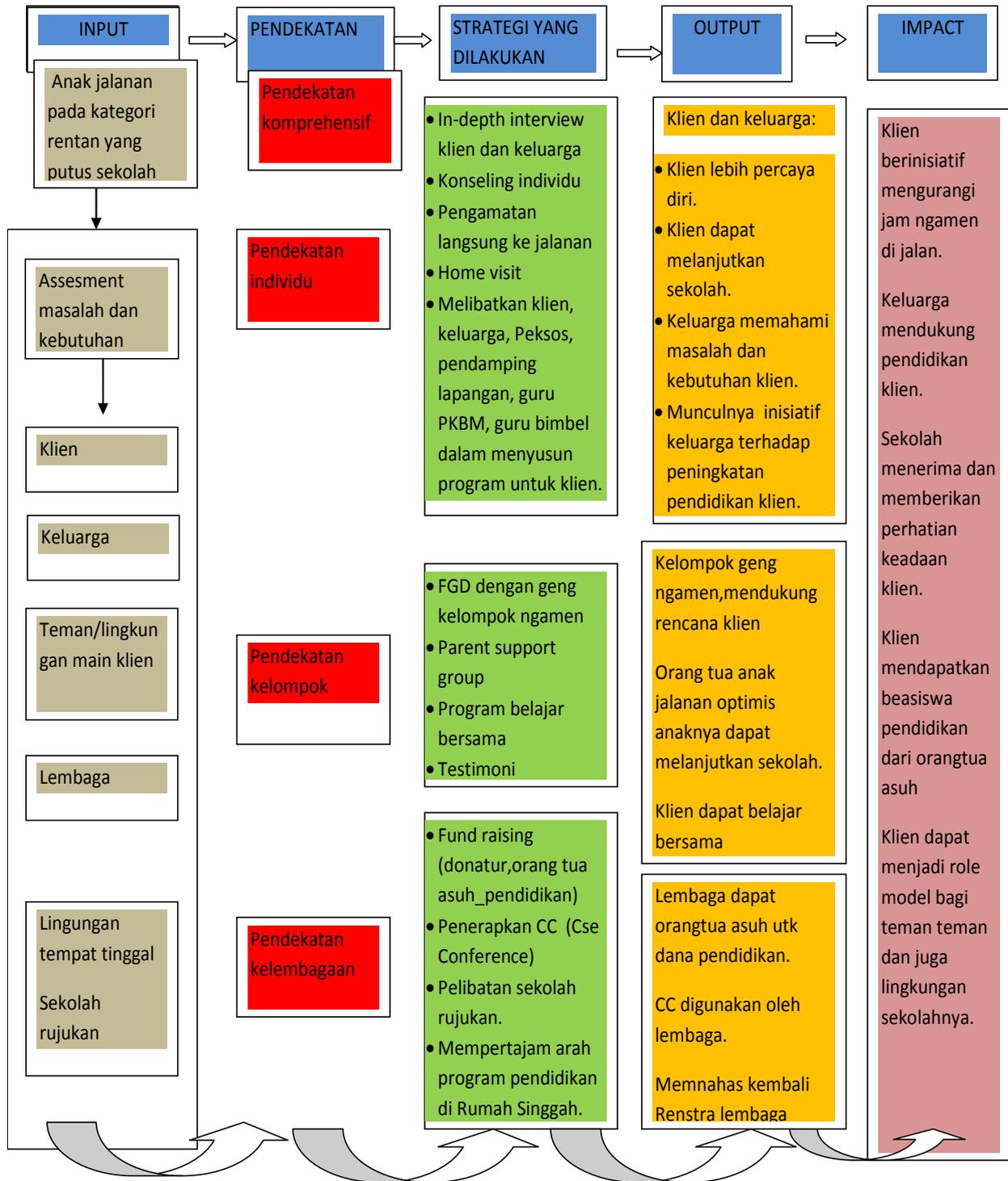
Salah satu kegiatan yang di gagas oleh peneliti sebagai upaya exit strategi pada program intervensi anak jalanan rentan yang putus sekolah adalah mengadakan kegiatan pengumpulan dana untuk mendukung pembiayaan anak-anak jalanan yang ingin meneruskan sekolah kembali. Kegiatan pengumpulan dana ini bertema “Membatik Bersama anak-anak jalanan” bekerjasama dengan Yayasan Van Deventer Mars (Yayasan Beasiswa dari Belanda) pada bulan Mei tahun 2013 bertempat di Yayasan Akur Kurnia Jakarta Timur.

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menggalang dana dan mencari donatur tetap (orang tua asuh) yang bersedia membiayai anak-anak yang ingin melanjutkan sekolah. Kegiatan ini diikuti oleh 50 anak-anak jalanan dan dibagi menjadi 2 sesi mambatik (tingkat SD dan tingkat SMP). Batik yang dihasilkan pada acara ini berupa batik sapu tangan yang didesain oleh anak-anak sendiri dengan teman bunga, hewan dan alam.

Hasil batik sputangan ini di bingkai dengan mencantumkan profil anak. Keseluruhan hasil tersebut dipamerkan pada beberapa even seperti perayaan Hari Anak Nasional di berbagai Kementerian dan dinas-dinas terkait dan kegiatan sosial lainnya yang melibatkan kegiatan anak-anak jalanan. Hasil dari pameran batik tersebut, terdapat donatur tetap yang telah menjadi orang tua asuh klien dan sanggup membiayai klien untuk meneruskan ke jenjang pendidikan sampai pada kemampuan anak. Melalui kegiatan *Charity* “Membatik Bersama Anak Jalanan”, peneliti memberikan dorongan kepada Pihak Rumah Singgah untuk dapat berbuat bersama dan berperan setara dengan anak-anak jalanan dengan melibatkan pihak-pihak lain sesuai dengan tujuan yang ingin diharapkan bersama.

GAMBARAN DIAGRAM KEGIATAN PENELITIAN YANG DILAKUKAN OLEH PENELITI

Gambar 3. Diagram Alur Penelitian



F. Kesimpulan dan Saran

1. Kesimpulan

- Pelaksanaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa ketidakmampuan anak-anak untuk melanjutkan sekolah, bukan dari ketidakmampuan ekonomi, melainkan dari mentalitas orang tua, pengaruh lingkungan tempat tinggal, tempat bermain dan juga kurangnya *role* model anak jalanan untuk mencapai cita-cita melalui jenjang pendidikan.
- Upaya intervensi yang telah dilakukan oleh peneliti pada klien yang ingin melanjutkan sekolah perlu melibatkan orang tua/keluarga, dan teman teman lingkungan klien tinggal sebagai bagian intervensi yang tidak dapat terpisahkan. Selain itu pelibatan sekolah rujukan (guru kelas dan kepala sekolah) menjadi penting dilakukan untuk memastikan penerimaan sekolah dan pemenuhan hak anak jalanan dalam mendapatkan pendidikan tanpa diskriminasi.
- Pelaksanaan intervensi Pekerja Sosial tidak akan dapat maksimal dilakukan jika tidak melibatkan orang tua dan anak dalam upaya pengambilan keputusan untuk melanjutkan sekolah. Peran orang tua yang berkomitmen mendukung anak jalanan untuk melanjutkan sekolah perlu diperkuat secara terus-menerus sebagai pondasi dasar untuk merubah mentalitas orang tua terhadap anak dalam melihat pendidikan adalah investasi masa depan anak.
- Pelayanan pekerjaan sosial yang diberikan kepada klien dan keluarga sangatlah bergantung dari berbagai macam unsur yang berkaitan erat dengan tempat, situasi, kondisi klien, waktu pelaksanaan, sudut pandang klien dan masyarakat serta perkembangan yang terjadi pada masyarakat yang selalu berubah.

2. Saran

- Kegiatan *case conference*/ pembahasan kasus klien dengan melibatkan klien dan keluarga perlu mulai diterapkan dalam setiap pembahasan kasus dan pelaksanaan intervensi bagi anak jalanan khususnya dalam upaya pengembangan program melanjutkan sekolah untuk anak jalanan dampingan Rumah Singgah Akur Kurnia.
- Mempertimbangkan untuk melanjutkan program orang tua asuh melalui kegiatan *fund raising* (mengemas kegiatan anak jalan dengan menampilkan karya anak jalanan) yang telah dilakukan peneliti.
- Menghidupkan kembali program relawan sosial untuk mengajar dan mendampingi anak-anak jalanan belajar di PBKM Akur Kurnia, sehingga anak-anak mendapatkan kesempatan untuk memperdalam pelajaran sekolah dengan bimbingan para sukarelawan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alston, Margaret & Bowles, Wendy. 1998. *Research for Social Workers an Introduction to Methods*. Australia: Allen & Unwin.
- Achlis, 1983a. *Model-Model Pendekatan Pekerjaan Sosial*. Bandung: Senat Mahasiswa STKS.
- Achlis . 1983b. *Komunikasi dan Relasi pertolongan Dalam Pekerjaan Sosial*. Bandung: Koperasi Mahasiswa STKS
- Achlis, 1993. *Relasi Pekerjaan Sosial*. Bandung: Koperasi Mahasiswa STKS.
- Barker, Roberst L. 1999. *The Social Work Dictionary (4th edition)*. The NASW Press

- Burhan, Bugin, 2001. **Metodologi penelitian Sosial dan Format Kuantitatif dan Kualitatif**. Airlangga University Press
- Corey, Gerald. 2003. **Teori dan Praktek Konseling dan Psikoterapi**. Bandung: Aditama Refika.
- Departemen Sosial. 2005. **Pedoman Penanganan Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA)**. Jakarta: Departemen Sosial.
- Faisal, Sanapiah. 1990. **Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar dan Aplikasi**. Malang: YA 3
- Husaini Usman, Purnomo Setiady Akbar. 2003. **Metodologi Penelitian Sosial**. Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Hamidi. 2004. **Penelitian Kualitatif**. Jakarta: PT. Grafindo.
- Iskandar, Jusman. 1993. **Beberapa Keahlian Dalam Pekerjaan Sosial**. Bandung : Koperasi STKS Bandung.
- Iskandar, Jusman. 1991. **Filsafat dan Etika Pekerjaan Sosial**. Bandung : Puspa.
- Johan Muller.2006. **Pembangunan Masalah Kapasitas**. Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Moleng, Laurike. 2002. **Metodologi Penelitian Kualitatif**. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Nana Sutisna, 2006. **Manual Terapi Psikologikal**. Bandung: Kopma STKS Jurusan Rehabilitasi SNCS Bandung.
- Pincuss Allan & Minahan Anne. 1997. **Social Work Practice** (Alih Bahasa Soetarso). Bandung: Kopma STKS.
- Purnianti, Fentiiny Nugroho, dan Romany Sihite. 1991. **Arti dan Lingkup Masalah Perlindungan Anak**. Jakarta : Universitas Indonesia.
- Robert R Albert, Greene Gilbert J. 2008. *“Social Workers’ Desk Reference”* dalam: Damanik Juda, Pattiasina Cynthia, **Buku Pintar Pekerja Sosial**. Jakarta: BPK Gunung Mulia, Jilid I.
- Soetarso. 1993. **Praktek Pekerjaan Sosial dan Pembangunan Masyarakat**. Bandung: Kopma STKS
- Suharto Edi. 1997. **Pembangunan Kebijakan Sosial dan Pekerjaan Sosial**. Bandung:Lembaga Studi pembangunan LPS-STKS
- Soetarso. 1999. **Metoda-metoda Penyembuhan Sosial Dalam Praktek Pekerjaan Sosial**. Bandung: Kopma STKS.
- Valerie Miller& Jane Couly. 2005. **Pedoman Advokasi, Perencanaan. Indah Refleksi** (Penerjemah Tharmojo). Jakarta: Yayasan Obor.
- Zastrow, Charles. 2004. **Introduction to Social Work Welfare**. USA: Thomson Brook/Cole
-2001. **Intervensi Pekerjaan Sosial**. Jakarta: Direktorat Kesejahteraan Anak, Keluarga dan Lanjut Usia, Departemen Sosial RI.
- 2004. **Ensiklopedia Pekerjaan Sosial Indonesia**. Jakarta: Ditjen Pemberdayaan Sosial, Departemen Sosial RI.
-2003. **Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak**. Jakarta: Direktorat Bina Pelayanan Sosial Anak, Direktorat Bina Pelayanan Sosial Anak Departemen Sosial RI.
- 2002. **Himpunan Peraturan dan Perundang-Undangan tentang Perlindungan Anak**. Jakarta: Direktorat Bina Sosial Pelayanan Anak, Departmen Sosial RI.
- 2005. **Petunjuk Teknis Pelayanan Sosial Anak Jalanan**. Jakarta: Direktorat Sosial Pelayanan Sosial Anak, Departemen Sosial RI.
- 2007. **Pedoman Pelayanan Sosial Anak Jalanan Berbasis Panti**, Jakarta: Direktorat Pelayanan Sosial Anak, Departemen Sosial RI.

NOTULENSI
SEMINAR NASIONAL “Peran STISIP Widuri dalam Pemberdayaan Masyarakat”

SESI I:

Moderator: Drs. Nelson Parapat, M.Si.

Pembicara I: Dr. Prudensius Maring, MA

“Involusi Perkotaan dan Strategi Sosial-Ekonomi Masyarakat Terkena Banjir Secara Berulang di Bantaran Sungai Ciliwung.”

Penelitian ini dilakukan sejak bulan Mei 2014. Ada beberapa faktor yang melatarbelakangi penelitian ini. Pertama, kita tentu tahu, setiap tahun terjadi banjir. Ciliwung salah satunya dan terbesar, dan aksesnya terbatas. Banjir di kali Ciliwung sudah sejak lama, tetapi hal yg lebih kompleks adalah proses ini berlangsung setiap tahun. Tahun ini telah terjadi 14 hari banjir. Kemudian alasan lainnya adalah proses warga ini di satu sisi harus menghadapi banjir di sisi lain juga harus menghadapi kehidupan ekonomi sosialnya.

Dalam strategi sosial ekonomi masyarakat, dari sisi luar ada intervensi, tetapi di sisi lain dia harus menghadapi banjir dan kompleksitas kota di sepanjang bantara kali. Kemudian masalah penelitian, kita mengorganisasi dalam 3 masalah penelitian. Pertama, bagaimana realitas involusi yang berlangsung di bantaran sungai? Kedua, bagaimana strategi sosial ekonomi masyarakat bantaran sungai? Ketiga, bagaimana model intervensi sosial pemberdayaan masyarakat bantaran sungai?

Metode yang kita lakukan adalah pendekatan penelitian kualitatif, dan kemudian fokusnya mulai dari masyarakat. Kita mencoba untuk menguraikan manusianya, kemudian baru sisi ekonomi, sosial dan lainnya. Kita melakukan pengumpulan data, melalui wawancara mendalam, pengamatan terlibat dan diskusi kelompok terfokus. Kemudian tantangan dan hambatan, adalah harus bangun tidur lebih cepat, atau tidur lebih lama dari warga bantaran sungai, tetapi sulit karena perbedaan. Ini merupakan pengalaman penelitian antropologi.

Kemudian kerangka teoritis, secara garis besar ada beberapa hal yang menginspirasi dengan pendekatan ekologi budaya dan involusi. Untuk *men-drive*, untuk memberikan fokus kepada kita yang aman budaya sebagai *core*. Dan melalui pendekatan itu, muncullah involusi, dimana involusi menjelaskan pola kebudayaan kalau tidak mencapai kemapaman, maka akan mengalami kerumitan dan melahirkan kemandekan (involutif). Involusi sama dengan ketika menggambar di sebuah kertas kosong, dan dilakukan secara terus menerus untuk melakukan gambar. Jadi gambar yang sudah ada, kemudian digambar lagi oleh orang lain.

Kemudian yang terakhir, menggunakan perspektif antropologi perkotaan, yang menjelaskan hubungan antara kota dengan pola kebudayaan dalam konteks masyarakat lebih luas. Dalam analisis, saya sudah meninggalkan konsep tadi secara perlahan. Dalam prosesnya kami melihat ada beberapa hal yang patut didiskusikan, yaitu karakter Ciliwung yang terbuka. Bahwa rendahnya tata kelola bantaran sungai- kasus 13 bantaran sungai, kemudian karena tidak dikelola, tingginya peluang akses dan penguasaan (membeli, menyewa, memperluas dan okupasi) jadi ada proses. Kemudian rendah ongkos (membeli, menyewa,

mobilitas). Mobilitas sangat gampang, karena sungai Ciliwung membelah kota Jakarta dan bernuansa pinggiran yang ada di pusat kota.

Kedua, karakter Ciliwung yang absorbir. Ciliwung mewadahi 13 wilayah kelurahan di DKI, berbicara tentang geografis. Ciliwung menampung 34.051 KK. Kelurahan Cawang menampung 1.623 KK (6 RW), kelurahan Kampung Melayu menampung 7.233 KK (6 RW).

Kemudian yang ketiga, Ciliwung merupakan arena intervensi proyek setengah hati. Dimana teknikalisisasi dan orientasi fisik berlebihan. *Jakarta Urgent Flood and Mitigation Project*, kemudian proyek normalisasi sungai Ciliwung dan relokasi tanpa resosialisasi. Kemudian penyerapan anggaran rutin bencana dan memakan korban. Selanjutnya arena kontestasi politik musiman, gap horizontal dan vertikal pelaku proyek yang menyebabkan adanya kesulitan terkait koordinasi, serta adanya kesenjangan antara yang diniatkan dengan yang terjadi (*the will to improve*).

Dari potret strategi masyarakat, yang ada di sana terdapat heterogenitas dan tidak terlihat *dominant culture*. Kemudian organisasi sosial berjenjang secara vertikal dan horizontal. Jadi setiap organisasi disana, tidak ada yang formal, yang mana tujuannya untuk merespon persoalan. Kemudian yang ketiga, organisasi sosial berorientasi inklusif dengan tujuan mengatasi masalah sosial. Dimana tempat mereka ini menjadi ruang atau tempat untuk mengungsi. Sumber pencaharian beranekaragam, domiasi karakter ekonomi informal. Kemudian penguasaan lahan/ rumah: warisan, milik, beli, sewa/ kontrak. Lebih lanjut, rumah permanen, berloteng, perabotan sekedarnya di sepanjang aliran sungai. Kemudian, Ciliwung bukan sebagai *sources* tapi sebagai *public bad*. Ciliwung merupakan wadah untuk membuang sampah, limbah.

Fenomena involusi melalui alur *absorb vs diverse*, dimana warga datang dari mana-mana, kemudian mereka masuk dan tinggal di bantaran Ciliwung, mereka lalu membangun rumah dan memadati.

Wajah involusi Ciliwung; bantaran Ciliwung dari hulu ke hilir bagai media/ kanvas yang siap dilukis, yang diklaim sebagai sumberdaya bersama dan menggiurkan. Implikasinya apa? Yaitu predikat buruk, dimana wilayah dengan infrastruktur fisik dan sosial buruk. Ciliwung menjadi wilayah marjinal di pusat kota metropolitan, basis kampung kumuh dan miskin (terhadap 392 RW dan 64 Kampung).

Implikasi kedua, strategi masyarakat. Berkembang strategi adaptasi masyarakat berciri involutif; menerima keadaan, menjadikan sebagai hal biasa, bertahan, melindungi, menciptakan kepuasan baru. Berkembang strategi adaptasi masyarakat berciri resisten, menguasai, melindungi, bertahan, enggan, tak bergeming, menolak, dan melawan perubahan. Kemudian berkembang strategi sosial dan ekonomi menciptakan kenyamanan dan menguatkan posisi sebagai masyarakat bantaran sungai.

Implikasi selanjutnya, yaitu masalah strategis. Menguatnya fenomena *tragedy of the commons* (tragedi kepemilikan bersama), *public bad*. Ada mekanisme saling berbagi hasil serba sedikit untuk hidup secukupnya atau disebut strategi berbagi kemiskinan (*shared poverty*) dan kesenjangan ide/ konsep dengan praktik. Ada kesenjangan struktural.

Kemudian, gagasan intervensinya. Pertama, proses konstruksi masalah bersama dan tujuan bersama. Saya pikir Jokowi dan Ahok berhasil, meskipun belum seluruhnya, di mana proses konstruksi terbangun. Kemudian perlu ada simpul prioritas, strategis dan bukti/contoh. Lalu, membangun pada level struktural, prosedural dan kultural. Menjembatani kesenjangan antara konsep dengan metode kerja, teori dengan praktik. Intervensi pada level tiga.

Pembicara II: Dr. Edy Siswoyo, M.Si

“Pentingnya Kepeloporan dan Pelopor Lokal Untuk Pengembangan Komunitas”

Di sini dibahas pentingnya kepeloporan dan pelopor lokal untuk pengembangan komunitas dari sebuah refleksi kegiatan PPM percontohan dan jasa produksi bersih dan ramah lingkungan pengolahan tempe tahu di PIK KOPTI Jakarta Barat.

Warga wilayah ini sangat homogen, semuanya berasal dari Pekalongan. Pada umumnya warga lingkungan penelitian khususnya para perajin tempe-tahu, meskipun berada didalam satu sentra pembinaan, namun secara empirik intensitas ramah lingkungan pada masing-masing unit usaha tampak bervariasi, mulai dari yang konsisten untuk tetap ramah lingkungan, ramah lingkungan temporer saja, dan sama sekali kembali tidak ramah lingkungan.

Gejala yang paling umum adalah masing-masing melakukan produksinya dengan cara yang masih kurang ramah lingkungan, dan tradisional, kemudian pembuangan limbah menyebabkan bau yang menyengat. Harusnya mereka memiliki visi, itu hal yg masih sulit.

Mengapa masih seperti itu, yaitu karena kebiasaan tradisional. Masyarakat juga tidak mempersoalkan.

Kegiatan usaha diprioritaskan sebagai sumber penghasilan utama, dengan tujuan utama memperoleh penghasilan untuk memenuhi kebutuhan pokok keluarga. Yang dipikirkan oleh para pemilik usaha adalah memperoleh penghasilan dan tidak ada waktu untuk memikirkan apakah kegiatan produksinya itu ramah lingkungan atau tidak. Konsumen/ para pedagang cenderung tidak mempersoalkan.

Ternyata setelah diajak studi banding di Bogor, terdapat kendala. Warga tidak memiliki waktu, dan kemudian juga merasa sudah cukup dengan penghasilannya. Juga terdapat masalah, dimana mitra belum memiliki alat/ cara menghilangkan bau.

Mitra usaha kripik tempe, masih terlalu banyak minyak, dipasarkan sendiri, belum ada agen pemasaran, belum memiliki sertifikat P-IRT (Pendaftaran Industri Pengolahan Skala Rumah Tangga) dan belum memiliki NPWP. Kemudian mitra selanjutnya adalah kerajinan tas, tetapi belum memiliki modal.

Metode yg digunakan modifikasi pendekatan *social group work* dan CO-CD. Kemudian tiga mitra bersedia berpartisipasi sebagai representasi warga. Kemudian kegiatan untuk solusi antara lain: pengelolaan sampah, usaha kripik tempe dengan penggunaan *spinner*, pengurusan NPWP, bimbingan teknis P-IRT dan bimbingan distribusi/ keagenan. Kerajinan tas dompet limbah mendapatkan pembinaan lanjutan dan permodalan.

Pembicara III: Prof. Robert MZ Lawang

“Pengabdian Kepada Masyarakat Desa: Sebuah Refleksi Sosiologik”

Beberapa masalah sosial ekonomi politik:

1. Involusi pertanian
2. Kegagalan paket Revolusi Hijau
3. Pemulihan kondisi lingkungan pertanian yang sangat mahal.
4. Berkurangnya kesejahteraan petani di daerah perdesaan.

Adapun perspektif modernisasi ekologi:

1. Strategi *sufficiency*, *efficiency* dan *consistency*.
2. Kebijakan yang memihak pada *sustainability*.

Asumsi tentang pembangunan desa intinya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Terdapat beberapa asumsi. Asumsi pertama, modernisasi perdesaan merupakan satu-satunya jalan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Secara tidak langsung, proses itu akan berfungsi untuk mengurangi macam-macam masalah terkait urbanisasi, kerawanan pangan, desentralisasi, dan kedaulatan masyarakat. Adapun asumsi kedua, daerah perdesaan sudah mengalami kerusakan sosial, ekonomi, politik, dan lingkungan yang cukup parah sehingga membutuhkan usaha untuk memulihkan keadaan yang kondusif untuk pembangunan.

Kemudian asumsi ketiga, Perspektif Modernisasi Ekologik (PME) merupakan pendekatan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat desa secara berkesinambungan (*sustainable*). Asumsi keempat, sintesis antara PME dan Kapital Sosial (KS) memiliki kekuatan eksplanatoris yang solid untuk penyusunan kebijakan sosial ekonomi politik yang berkesinambungan.

Hipotesis yang dapat dikembangkan lebih lanjut dideduksi dari sintesis antara PME dan KS pada umumnya. Tetapi karena alasan praktis, penyusunan hipotesis mengacu pada analisis KS dari Michael Woolcock dan Deepa Narayan (1999) yang sudah juga menjadi bahan diskusi bagi mahasiswa S2 Kesejahteraan Sosial STISIP Widuri. Pokok pikirannya dapat dilihat sebagai berikut:

1. *Communitarian view* - kekuatan masyarakat untuk menjaga lingkungan hidup.
2. *Network View* -kekuatan bersama secara regional atau nasional untuk menjaga lingkungan dan memanfaatkannya secara bertanggungjawab.
3. *Institutional View* -peran negara dan CSO untuk mengembangkan kebijakan yang berorientasi pemeliharaan dan pemanfaatan lingkungan hidup secara melembaga.
4. *Synergy View* -peran semua warga dalam mempertahankan dan menjaga kehidupan bumi untuk memberi kita kehidupan.

Adapun hipotesis yang dapat dikembangkan dalam PME dengan menggunakan strategi keberlanjutan (*strategy of sustainability*) yakni *sufficiency*, *efficiency*, dan *consistency*:

1. Komunitas perdesaan dapat mulai mengembangkan pertanian organik baik yang berbasis sumber daya lokal, maupun melalui intervensi dari luar melalui kebijakan yang memihak pada mereka atau kalau mungkin melalui mekanisme pasar. Ketiga strategi ini dapat dicapai sekaligus.
2. Komunitas regional dapat mulai mengembangkan pertanian organik untuk bidang kehidupan bersama yang lebih luas, sehingga membutuhkan pendekatan *network-view* yang akan bertahan lebih lama kalau disintesis dengan pendekatan *institutional view*.
3. Komunitas nasional dapat mengembangkan pertanian organik melalui sinergi semua kekuatan yang ada pada komunitas kampung, regional yang membutuhkan jaringan sosial yang lebih luas lagi.

TANYA JAWAB:

Erna Dinata, P.hD

Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya sangat senang sekali dengan panel ini. Buat saya, ini memberikan satu inspirasi yang luar biasa melihat konsep-konsep yang sudah dipelajari dalam kurikulum pekerjaan sosial. Tapi saya juga melihat dari tiga pendekatan pengembangan masyarakat ini memberikan suatu nuansa untuk *me-refine* (menyuling) kembali konsep-konsep makro, meso dan mikro, yang saya pikir sangat kaya sekali dalam contoh-contoh dari tiga pendekatan yang disajikan pada pagi hari ini.

Ini saya pikir suatu hal yang merupakan tantangan kita semua baik staf pengajar maupun juga dialog dengan mahasiswa yang berpraktik di lapangan, untuk secara kritis atau mengkritisi terus menerus konsep-konsep yang kita gunakan. Apa artinya ketika kita menggunakan intervensi makro, atau intervensi mezzo atau intervensi mikro, jadi sangat jelas sekali dari ketiga contoh-contoh tadi itu betul-betul memperlihatkan bahwa konsep keberfungsian sosial itu sendiri menjadi sangat kompleks dengan konteks pemahaman yang boleh saya katakan satu interdisiplin. Dari ketiga contoh institusi itu terlihat sekali bahwa pekerja sosial tidak bisa melihat atau menilai permasalahan sosial disini tanpa bantuan dari disiplin-disiplin ilmu lainnya.

Yang ingin saya tanyakan kepada panelis, bagaimana menempatkan pendekatan seperti ini kaitannya dengan proses pendidikan atau dalam kurikulum atau dalam matakuliah khususnya? Saya ingin menanyakan, bagaimana kalau kita melihat pengayaan metode pendekatan pekerjaan sosial, dengan memasukkan pendekatan-pendekatan yang konkrit didalam pelayan, apakah ada perbedaan? Itu yang pertama.

Yang kedua, bagaimana keefektifan dalam konteks –pekerjaan sosial dalam mengintegrasikan berbagai disiplin, karena sampai sekarang belum ada kurikulum yang mengakomodir bagaimana pekerja sosial dapat bekerja dengan multi disiplin lintas sektoral?

Saya pikir itu merupakan tantangan kita bersama, karena waktu kita terasa habis dengan pendefinisian kompetensi-kompetensi yang tidak berakar pada pemahaman kontekstual yang sebetulnya. Merupakan tantangan kita dalam memperjuangkan kurikulum pekerjaan sosial di Indonesia.

Untuk Prof. Robert Lawang sangat menarik dalam menyajikan hasil studinya mengenai masyarakat, sistem adat. Adanya interaksi yang terjadi. Kita perlu melihat hubungan antara kebijakan dengan kondisi yang ada. Bagaimana juga hubungannya antara undang-undang desa dengan kearifan lokal? Interpelasi antara kearifan lokal dengan prinsip-prinsip yang sebetulnya memberdayakan. Bukan hanya sekedar prinsip-prinsip adanya masyarakat yang sedang dimanipulasi.

Moderator:

Baik terima kasih Bu Erna. Baik, jadi ada dua pertanyaan Bu Erna; Pertama, bagaimana dengan penyajian tiga panelis tadi, *me-refine*, menyusun menata kembali konsep-konsep yang berhubungan dengan keberfungsian sosial yang ternyata juga membutuhkan berbagai disiplin lainnya. Dan terkait dengan penyusunan kurikulum atau mengenai masalah akademisi di perguruan tinggi, sehingga mahasiswa bisa menghadapi ini semua.

Dan yang kedua ini, masih berhubungan khusus dengan Pak Robert karena mengenai masalah perdesaan, antara undang-undang desa dengan kearifan lokal dalam hukum adat. Bagaimana itu, Pak?

Jawaban:

Dr. Prudensius Maring, MA

Background saya adalah antropologi, dan bergabung di sini sudah lama. Memang dalam beberapa hal saya melihat ada beberapa hal yang baru. Namun bagi saya, yang telah terbiasa melakukan pemberdayaan sosial, ada proses-proses yang dilakukan. Kemudian dilakukan analisis-analisis yang kemudian dikembangkan untuk dilakukan perkembangan. Itu adalah pengalaman yang saya lakukan. Kemudian, ini terkait dengan pendekatan pekerjaan sosial, baik mikro, meso, maupun makro, saya membacanya ini terlalu kaku. Saya melihatnya terkait dengan konteks, mikro tidak selalu harus keluarga, meso tidak harus komunitas atau makro harus masyarakat. Tetapi kita masuk ke dalam keluarga-keluarga itu, kemudian dapat melihat kebutuhan. Dalam beberapa hal, saya melihat pendekatan-pendekatan antara mikro, meso dan makro, itu adalah pendekatan, tapi realitas ketika masuk ke dalam ke masyarakat, kita melakukan pengembangan termasuk instrumen-instrumennya.

Saya memiliki pengalaman, ketika kita masuk ke dalam masyarakat, yang harus dilakukan adalah mendeteksi terkait apa kebutuhan dan level-level intervensinya.

Dr. Edy Siswoyo, M.Si.

Terima kasih Ibu Erna, kalau *background* saya sebenarnya bukan pekerjaan sosial, tapi sosiologi, jadi kalau mengadakan intervensi sosial tentu kalau memakai pendekatan-pendekatan yang lazim oleh para pekerja sosial, dipinjam-pinjam saja. Namun kami memakai satu pendekatan karena beruntung juga, karena kami berada pada wilayah, komunitas seperti itu yang mungkin tidak cocok dengan komunitas di lain tempat.

Kami pinjam teorinya Antony Giddens adanya *key person*, yaitu orang yang bisa berkomunikasi dari bawah sampai keatas dan itu biasanya kita bisa temukan satu atau dua orang, melalui Pak Handoko, sehingga dia bisa menjadi narasumber saya sekaligus juga dia menjadi obyek eksperimen saya. Dia juga menjadi perantara saya ke gubernur dan bisa kemana-mana. Itulah peran dia dalam perubahan sosial, saya juga tidak tahu apakah itu juga salah satu bentuk instrumen pekerjaan sosial atau tidak, ada tokoh kunci.

Persoalannya, tokoh kunci itu tidak ada, misalkan kalau di Flores, sampai kapan petani itu, mampu menyampaikan aspirasinya ke pemerinah, kalau tidak ada orang yang bisa menyampaikan, kalau bukan praktisi tidak bisa, jadi *key person*, pentingnya disitu dan kita harus membangun, menciptakan itu, kita sudah mempunyai pengalaman itu.

Tapi beruntung di sini sudah ada tokoh seperti itu, dia juga sebagai aktor, dia juga bisa aktor intelektualnya, dia juga bisa berkomunikasi, dia juga bisa mengartikulasi kemauan masyarakat, dia juga bisa berkomunikasi ke atas, dia bisa satu orang. Dia bukan pemimpin formal, hanya orang biasa, orang etnik, tapi dia pelaku dan saya tidak tahu pendekatan apa itu, efektif bisa dipakai. Itulah jawaban kami dari pengalaman.

Prof. Dr. Robert MZ Lawang

Memang ini kita harus lebih banyak berdiskusi dan jawaban yang saya berikan ini juga mungkin hanya bersifat tentatif atau awal-awalnya saja. Memang penekanan kurikulum di Kesejahteraan Sosial itu sangat sulit. Sulitnya itu, pertama, KN (kurikulum nasional) itu sudah diputuskan harus begini-begini dan KN itu berdasarkan pada kesepakatan antara semua Jurusan Kesejahteraan Sosial atau Departemen Kesejahteraan Sosial yang ada di seluruh Indonesia, dan itu nanti ada hubungannya dengan sertifikasi atau, apa namanya, kalau institusi,

sertifikasi dengan akreditasi. Jadi hakekatnya seperti itu, ikut mempengaruhi dan menjadi konseling bagi perguruan tinggi yang sedang berkembang apa lagi jumlahnya ujiannya sangat banyak sekali, mau berkembang menjadi apa. Kalau orang itu kuliah harus banyak dihipit dengan banyak kewajibannya, jadi itu masalahnya.

Tapi itu mungkin diskusi kami dengan Bapak Prof. Tjan Basaruddin dari Universitas Indonesia 2 minggu yang lalu tentang kurikulum, mungkin juga kita bisa semacam uji coba, jadi kami ingin diskusi juga supaya STISIP Widuri itu kembali ke pekerjaan sosial bukan akademik. Ketika kita di bagian akademik, ada bagian vokasi, D1, D2, D3, D4, sarjana dan pasca sarjana atau doktor, jadi tepat pada jalur itu. Jokowi itu tidak cari orang pintar, dia cari orang yang konvensional seperti itu, tetapi ketika Prof Tjan tanya kepada saya, apakah ada satu Jurusan Kesejahteraan Sosial yang menjadi contoh, saya bilang contoh itu susah caranya, belum ada contohnya, karena semua orientasinya jelas, hanya gelar. Bahwa akademik itu kuat sekali. *Nah* kita bisa mulai, kalau mulai berani sebetulnya UI harus lebih berani dari STISIP Widuri, karena UI itu mempunyai *standing position* dan *bargaining*-nya cukup tinggi.

Jadi umpamanya, contoh satunya, John itu mempunyai keahlian didalam bidang *biotechnology energy*, dan pengetahuan itu bisa dijadikan sebagai modal dia dalam meningkatkan kesejahteraan sosial. Kemudian saya beri dia, umpamanya kerangka dari Michael Woolcock dan Deepa Narayan, saya pikir kerangka itu bagus, semua mahasiswa harus tahu itu dan bisa rencana itu buat pemerintah, buat komunitas dan dicarinya apa yang dibutuhkan supaya modernisasi desa itu dapat berjalan. Ini salah satu basis praktikum yang bisa berangkat dari satu teori saja dan bisa mencakup yang lainnya, serta bisa masuk sistem intervensi.

Maksud saya begini, mahasiswa S2 yang masuk, harus jelas mau menjadi apa, maka perlu mata kuliah ini, mata kuliah ini, jangan terlalu banyak, sedikit tapi didalami dan sekarang banyak mata kuliah tapi dia tidak tahu sama sekali. Jadi kalau ada umpamanya mahasiswa yang mau membangun masyarakat desa di tempat saya bekerja, dia harus tahu pendekatan dari Woolcock, dia harus tahu apa itu dengan sumber daya lokal, jadi semua mata kuliah yang terkait dengan arah peningkatan kesejahteraan masyarakat desa di suatu tempat. Dia harus tahu konsep. Ada yang dapat dari kuliah dan ada yang cukup dari internet.

Saya belajar makro-mikro dari internet, semuanya dari internet, asal kita memberikan kebebasan kepada mahasiswa bahwa akses internet itu salah satu kunci dari metode pendekatan baru. Konsep kelas itu sudah tidak ada, yang ada program saya, *in order to take knowledge on this program I take this..take this..take this*, kemudian kita tidak perlu ke kelas, lihat cuma laporan saja. Jadi mungkin kita berpikirkannya ke arah yang sama.

UI harusnya sudah bisa memulai dan maksud saya coba disesuaikan. Beberapa mahasiswa telepon saya "Pak, saya buat ini, buat ini", ada malah yang mau bikin khusus, khusus pertanian dan saya mau asuh dia, kamu harus tahu tentang ini, kamu harus tahu tentang sistem pertanian, sehingga kerja dia menjadi lengkap untuk satu program. Jadi kata program dalam program studi itu harus di refungsinasi, sekarang kita itu terlalu sentralistis, itu saja dari pemerintah, sementara pemerintahnya sendiri, tidak lebih pintar dari saya. Itu yang pertama.

Mengenai UU Desa, dia anak dari yang namanya Undang-Undang No. 32 tahun 2004, kalo saya tidak salah, dari undang-undang itulah munculah ada UU Desa, ada UU pemilu, UU Pemerintahan Daerah, dipecah menjadi beberapa undang-undang. UU yang dulu itu tahun 1999, itu terlalu panjang dan kemudian direvisi tahun 2004, sekarang masih perlu revisi lagi. UU Desa itu, UU Pemerintahan Desa, tetapi mengenai pembangunan desa tidak banyak bicara. Misalkan bicara 1 milyar untuk desa, di UU tidak ada. Jadi perlu ada pemberdayaan

aparatus desa, bagaimana dia bisa memanfaatkan UU Desa itu untuk kemauannya dan didalam kurikulum kita harus tahu didalamnya, dan saya tahu Kesejahteraan Sosial itu ada UU tentang Kesejahteraan Anak, UU Perlindungan Anak, tetapi kita tidak hanya cukup bicara tentang undang-undang itu saja.

Jadi maksud saya itu begini, kita sebagai lembaga ilmu pengetahuan harus menggunakan kampus untuk macam-macam kegiatan, biarkan mahasiswa tahu, kamu mau jadi ini, jadi ini dan dia akan merasakan sendiri dan kurikulum seperti itu saya kira di Indonesia bisa maju.

Kalo saya optimistis betul, bahwa desa ke depan bisa maju kalau kita menolong mahasiswa, itu tadi, apa yang harus diperbuat supaya kampung itu harus maju dan saya senang ilmu pengetahuan itu tidak bisa hanya didapat misalnya dari 9 mata kuliah. Ilmu pengetahuan itu luas sekali, otak kita harus diisi sebanyak-banyaknya ilmu, supaya kita punya *understanding* yang bagus. Jadi kalo saya bicara tentang pertanian itu, saya bisa bicara tentang *bio energy*, saya bisa bicara tentang intrik-intrik dari *ethnic culture* yang belum tentu bisa dibicarakan oleh orang IPB, karena sifatnya itu tadi, bicaranya padi dan manusia, padi tanpa manusia tidak bisa. Jadi menurut saya harus ada diskusi lebih lanjut ke depan, mungkin UI yang bisa memprakarsai.

SESI II

Moderator: Drs. Fordolin Hasugian, M.Si.

Pembicara I: Flores Mayaut, S.Sos

“Praktik Pekerjaan Sosial dalam Penanganan Masalah Psikososial Keluarga di LK3 STISIP Widuri”

Permasalahan keluarga cenderung terus meningkat baik secara kuantitas maupun kualitas, baik di dalam maupun di luar rumah tangga. Kedua, semua ini berpengaruh terhadap kejiwaan atau psikologis, serta kemampuan berelasi sosial anggota keluarga. LK3 khusus menangani masalah-masalah psikososial antar anggota keluarga maupun antar pendukungannya. Sebagai bagian dari upaya membantu menemukan solusi permasalahan dalam keluarga, khususnya masalah psikososial, untuk menangani kasus dalam keluarga, kita harus tahu dulu akar permasalahannya. Semuanya bertujuan dalam rangka peningkatan taraf kesejahteraan keluarga.

Kita juga perlu tahu, gejala masalah psikososial. Pertama, gejala yang terkait dengan perasaan (afeksi); menghayati berbagai emosi negatif. Kedua, gejala yang terkait dengan aspek kognisi sangat sulit mengambil keputusan meskipun untuk hal-hal yang sederhana. Ketiga, gejala yang terkait dengan tindakan atau perilaku (kognasi), menampilkan perubahan perilaku, misalnya menjadi pemarah, agresif.

Keempat, gejala yang terkait dengan aspek fisik; merasa tidak fit, lesu dan tidak sehat. Kelima, gejala yang terkait dengan hubungan sosial; mudah tersinggung, marah dan tidak dapat mengendalikan diri sendiri, kasar, dan banyak berkonflik. Menyendiri, menolak hubungan sosial.

Strategi pelayanannya, dalam pekerjaan sosial ada banyak strategi; melalui wawancara mendalam, pengamatan langsung, kita juga melakukan kunjungan rumah karena untuk mengetahui kita perlu masuk ke dalam lingkungan rumah. Kemudian pelibatan masalah klien, keluarga dan tetangga jika dibutuhkan.

Lantas bagaimana pelaksanaan praktik pekerjaan sosial? Ada banyak, antara lain, pendekatan awal meliputi *engagement* (kontak awal), *intake* (penerimaan) dan *contract* (kontrak). Pengungkapan dan pemahaman masalah, penyusunan rencana masalah, penanganan masalah, monitoring dan evaluasi dan terminasi. Memang banyak definisi-definisi ini, tetapi semuanya sama.

Untuk menyelesaikan permasalahan diatas, ada beberapa peran yang dapat dilakukan:

1. *Problem Solver*: pekerja sosial membantu klien mencari jalan keluar permasalahannya sehingga ditemukan beberapa alternatif pemecahannya.
2. *Motivator*: pekerja sosial membantu klien memberikan dorongan agar timbul kesadarannya dalam menghadapi permasalahan sosial serta segera melaksanakan niatnya untuk mencari alternatif pemecahannya.
3. *Broker*: pekerja sosial berperan menjadi penghubung klien dengan sistem-sistem sumber.

Pembicara II: Dra.MM. Sri Dwiyantari, M.Si

“Pemberdayaan Keluarga Melalui Pemanfaatan Potensi Lingkungan Keluarga”

Contoh kasus yang saya bawakan ini sangat mikro sekali. Kita akan melihat, apakah akan berpengaruh keluarga dengan komunitas. Jadi dalam pengalaman ini , dimana pemberdayaan yang dilakukan oleh keluarga kemudian diberdayakan kepada komunitasnya. *Person problem*-nya, istri dari keluarga ini sering pusing, kesal dengan keluarga saya dan kemudian sering *cash bon*. Pekerjaannya sebagai pembantu rumah tangga. Kemudian dilakukan *assessment*, dan dari hasilnya didapatkan beberapa data. Terkait ukuran kemiskinan yang saya tahu \$50/ tahun, tetapi ada ukuran yang lainnya jika berdasarkan standar-standar tersebut, keluarga ini masuk dalam standar sangat miskin.

Faktor ekonomi yang mempengaruhi situasi sosial di keluarga ini. Kemudian, ada beberapa hal yang dilakukan oleh pekerja sosial ada beberapa intervensi yang dilakukan. Potensi yang ditemukan, ketika saya berkunjung ke rumahnya, memiliki lahan kosong yang ditanami oleh papaya grandel, dan kemudian dijual daunnya. Klien kemudian diberikan motivasi, dan menyatakan bersedia untuk mengupayakan bunga papaya tersebut.

Kemudian, klien mau memasak dan mengajak ibu-ibu untuk demo masak. Saya memberikan motivasi siapa yang mau melanjutkan memasak. Saya bilang, “Ibu-ibu jangan khawatir saya telah mengunjungi Ny Mn yang memiliki kantin. Sebelumnya, saya juga sudah melakukan survei ke pasar modern di BSD, disana mau membeli bunga papaya tersebut Rp.13.000/kg.”

Yang paling memungkinkan terkoneksi Om-Ny Mn kepada WKRI Cab. St. Monika BSD. Saya baru melakukan terminasi beberapa bulan yang lalu, dan mereka sudah mandiri. Meski tidak besar, hasilnya adalah penghasilannya rutin. Saya juga menyiapkan buku kas secara sederhana sebagai media belajar dan kontrol perkembangan. Kemudian klien mencatat secara mandiri dan lengkap. Saya membantu bagaimana dia dapat berfungsi.

Berikutnya, apa yang dilakukan oleh keluarga ini ditiru para tetangganya. Pertama, kepada tetangga dan juga keluarga-keluarganya. Kedua, terjadi proses belajar untuk berelasi sosial. Ada saling ketergantungan

antara Om dengan Ny Mn. Ketika Om tidak memberikan, maka Ny Mn tidak memasak. Begitu juga ketika Ny Mn tidak memasak, maka Om tidak tahu mau kemana menjualnya.

Implikasi dari pengalaman pemberdayaan, proses penularan aktivitas keluarga yang terberdaya kepada keluarga-keluarga di masyarakat setempat dapat dikembangkan sebagai model pengembangan masyarakat setempat. Dalam proses ini pekerja sosial lalu menguatkannya. Melalui pengmabangan yang berbasis lingkungan ini, keluarga jadi mencintai tanaman dan menghargai lingkungan.

Pembicara III: Hastin Turstisari, M.Si

“Intervensi Pekerja Sosial Terhadap Anak-Anak Jalan Kategori Rentan yang Putus Sekolah di Wilayah Pusat Grosir Cililitan (PGC)”

Menarik sekali berbicara tentang keilmuan pekerjaan sosial, tidak ada fungsinya jika tidak dipraktikkan. Pekerja Sosial itu apa *sih*? Bahwa pekerja sosial bekerja, untuk membantu klien agar mereka mampu menyelesaikan permasalahannya.

Dalam tesis saya yang lalu pertanyaannya, kenapa anak jalanan tidak selalu sekolah? Tujuan penelitian saya intervensi pekerja sosial dan membangun *movement*. Pemilihan subyek penelitian adalah anak jalanan kategori rentan dalam suatu rumah singgah, yaitu rumah singgah Akur Kurnia, ada yang paling menarik dari anak jalanan yang saya temui, bahwa ada persoalan dimana anak tersebut tidak diterima oleh pihak sekolah, karena mereka adalah anak jalanan. Kemudian, hal itu yang menjadi perhatian saya, dan kemudian mengarahkan kepada PKBM yang memiliki sistem yang dapat menggunakan baju bebas.

Dalam prosesnya, saya merapat kepada Satpol PP, karena anak-anak itu tidak bisa lagi berkeliaran. Saya juga merapat kepada teman-teman Pekerja sosial di rumah singgah. Kemudian saya melakukan advokasi; ada sebuah kasus dimana anak tersebut ditolak di sekolah negeri karena berlabelkan anak jalanan. Saya lalu masukkan lagi ke sekolah yang sama, dan anak tersebut diterima dan saat ini sudah kelas 6. Pada prosesnya, anak sudah diterima dan tidak ada lagi label anak jalanan, dimana mereka belajar bersama, bermain bersama.

Saya selalu bertanya, ‘Cita-citamu apa?’. “Rencana masa depanmu apa?” Kemudian, ada model yang mereka kagumi, yang memberikan mereka motivasi dan semangat. Saya biasanya mengajak mereka belajar sambil bermain.

Seringkali program yg diberikan kepada anak jalanan bersifat konservatif. Kemudian kita berdialog, orang tua maunya anak menjadi apa? Dari proses itulah, kami melakukan *home visit*, berdialog dan membuat mereka merasa penting untuk melakukan perubahan. Dalam pengamatan saya, bapak-ibu yang mengamen, bisa mendapatkan Rp. 125.000 sehari. Pada program yang diberikan, orang tua juga diberikan konseling, dan pengetahuan tentang pengasuhan.

Saya menyadari keterbatasan waktu dan tenaga, saya lalu melibatkan pihak luar. Saya mengajak beberapa lembaga dan pihak lainnya untuk memberikan kontribusi. Saya mendapatkan dua donatur tetap yang selalu siap kapanpun. Program yang kita terima adalah bantuan untuk pendidikan, sedangkan bantuan yang lainnya tidak, karena sudah banyak yang melakukannya.

Hasilnya anak menjadi pembimbing dan artis/ duta musik di sekolah. Pada perkembangannya, sekolah tersebut menjadi *role model*. Para orang tua saling bertukar pandangan dan mulai peduli. Akhirnya, para orang

tua memahami dan mengurangi waktu anak-anaknya di jalanan, yang tadinya bisa 5 jam lebih menjadi 2 jam, sehingga tidak langsung menarik mereka dari jalan, melainkan secara perlahan.

Pembicara IV: Erna Dinata, PhD

“Peran Praktikum dalam Pengembangan Ilmu Kesejahteraan Sosial di Indonesia”

Selamat siang semuanya, semoga masih bertahan, saya sangat senang sekali, pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih atas undangan ini. Merupakan suatu kehormatan buat saya datang kemari dan saya juga berterima kasih kepada Pak Robert dan Pak Edy yang menghubungi dan tahu saya maju mundur untuk mengisi acara ini karena saya merasa bahwa saya baru datang dari studi saya dan saya masih mencoba untuk belajar konteks Indonesia dan mencoba belajar juga melihat bagaimana kurikulum pekerjaan sosial di Indonesia. Jadi ada keresahan atau kekhawatiran juga dalam mencoba untuk memahami itu.

Saya senang sekali dengan istilah yang tadi Pak Robert sampaikan, jadi bermula dari konsep saya kira itu tepat. Itu menggambarkan bahwa saya sangat *concern* sekali dengan peran praktikum dalam kurikulum pekerjaan sosial. Saya ingin sekali berdiskusi dengan berbagai ibu bapak sekalian dan saya senang sekali dengan rekan-rekan adik-adik yang datang siang ini, yang masih bertahan dan saya berharap bisa memiliki kebanggaan sebagai pekerja sosial karena memang tantangan kita masih banyak, tantangan sebagai pekerja sosial dan tantangan di dalam akademik itu sendiri maupun di luar sana yang masih harus kita hadapi dengan identitas kita sebagai pekerja sosial yang mempunyai wawasan yang cukup luas.

Tadi kita dengar panel dari pagi sampai siang ini bagaimana nuansa kekayaan konsep yang sering kita sebut makro, meso, dan mikro. Namun sebelum saya masuk, mungkin saya harapkan pertemuan ini bisa berlanjut karena bagaimana pun juga sekecil apapun upaya kita nanti pada akhirnya kita lebih bisa mempunyai gambaran seperti apa praktikum di dalam kurikulum pekerjaan sosial dan apa peranannya untuk pengembangan Ilmu Kesejahteraan Sosial itu sendiri.

Saya ingin sedikit memberikan gambaran dari mana saya berasal karena saya merasa bahwa nanti apa yang saya sampaikan akan dipengaruhi *background* saya. Saya ingat sekali waktu kita belajar pemikiran dari para sosiolog ataupun pemikir lain, sangat penting sekali mempelajari latar belakangnya. Konteks dan praktik itu penting, kalau kita melakukan intervensi, konteks permasalahan-permasalahan dan praktik sangat penting. Saya berkuliah S1 di UI kemudian melanjutkan S2 dan S3 di *The University of Chicago*. Disana itu sekolah pekerja sosialnya termasuk salah satu yang disebut “*professional school*”. Di Amerika, sistem pekerja sosialnya sudah sangat berkembang dalam arti banyak dari tingkat level pekerja sosial itu, yg terendah adalah S2. Mereka disebutnya “*professional school*” sama dengan “*law school*”, sekolah hukum, sama dengan *public policy*. Sama juga dengan kedokteran, “*medical school*”. Jadi “*social school*” itu salah satu *professional school* dari beberapa sekolah profesi. Tapi mereka juga ada sekolah-sekolah di level S1 di beberapa perguruan tinggi yang lebih kepada konteks yang mereka katakan “*major*” atau “*minor*”.

Saya ingin sedikit menyampaikan konteks saya di S2,S3 itu di *The University of Chicago* mempunyai kekhususan sejarah. Hal ini juga saya pikir untuk rekan-rekan dan adik-adik semua penting juga memahami pada sekolah-sekolah pekerja sosial di Amerika sangat beragam. Pada umumnya di sana mengambil nama

social work, tetapi ada beberapa sekolah yang menggunakan *social welfare* seperti sekolah saya menggunakan *school of social service administration*. Jadi memang mempunyai sejarah yang kuat tentang pengembangan pekerja sosial yang dimulai abad ke 18 di mana sekelompok orang melihat pembentukan kelompok-kelompok yang membantu imigran untuk memenuhi kebutuhannya saat itu. Jadi memang sudah berangkat dari faktor faktor yang sangat struktural.

Jadi di sini kalau kita ingin berpijak, adik-adik kedepan melihat konteks tiap sekolah. Jangan cepat menilai, tapi secara kritis menilai kenapa sekolah ini bentuknya seperti ini, kenapa UI seperti ini, kenapa Widuri seperti ini, tentu ada sejarah yang membentuk itu. Saya pikir itu perlu dipahami dan saya harapkan tidak terjebak pada pembagian dualistik antara kesejahteraan sosial dan pekerjaan sosial, karena kedua hal itu tidak bisa dipisahkan. Kesejahteraan sosial itu tidak mempunyai gambaran bermakna tanpa berpijak pada sejarah panjang pekerjaan sosial.

Mungkin hal itu saya masuk dengan persentasinya Ibu Hastin, karena pada umumnya, *dual core* dari sejarah pekerja sosial itu adalah *convection* dan *protection*. Dan juga kalau dilihat bagaimana sejarah itu memperlihatkan suatu pergeseran dengan berkembangnya profesi pekerjaan sosial itu. Jangan sampai nanti kita sebagai pekerja sosial hanya memikirkan fungsi-fungsi yang rutin, terjebak tapi tanpa melihat kembali, apa *sih* nuansa permasalahan?

Tentu kita sebagai profesi punya satu sistem etika profesional, kemudian metode- metode yang lebih jelas, dan sebagainya. Jadi ada satu sistem *core of knowledge* yang mungkin adik-adik sering dengar di kuliah segitiga *knowledge, skill, values*. Tapi saya pikir selain *knowledge, skill* harus diasah melalui praktik, ada poin penting yang Pak Edi sampaikan tentang *function* itu tapi berkaitan dengan *values* tadi. Kenapa saya katakan ini penting, dan ini sering dilupakan dalam kurikulum pekerjaan sosial karena kalau kita lihat kembali sejarah yang panjang memanipulasi daripada *values* oleh kelompok-kelompok kepentingan di dalam masyarakat kita itu dan masih berlangsung sampai sekarang. Jadi kalau kita lihat sejarah dari abad ke 16 tentang bantuan kepada orang-orang yang miskin, kemudian pada akhirnya terjadi apa dalam sejarah adalah pengkategorian antara *deserving and undeserving poor*.

Kalau ada waktu cek bukunya Yeheskel Hasenfeld yang judulnya “*The Moral Contruction of Poverty*”, bagaimana isu-isu masalah sosial bisa dimanupulasi oleh nilai-nilai tertentu. Ini dalam sejarahnya sampai sekarang di Amerika masih diperdebatkan karena sangat luas sekali dan di dalam masyarakat kita saya juga melihat cukup penting, karena mereka yang *deserving* itu misalnya anak-anak yatim piatu, ibu-ibu yang *single mother*. pada perkembangannya yang dianggap *undeserving* itu, yaitu orang-orang miskin yang sehat, disitu mulai ada manipulasi. Bahkan sekarang ibu-ibu yang *single mother* di Amerika sebagai kelompok *undeserving*, karena mereka diberikan *moral-judgment*, “Oh ini hamil di luar nikah”, “Ini tidak ada bapaknya”, dan sebagainya. Jadi nilai-nilai yang ditranslasikan ke dalam program-program pelayanan sosial itu perlu diperdebatkan di dalam sekolah pekerjaan sosial.

Dan saya pikir itu tugas kita semua. Mulai dari sesi pertama tadi sampai sesi sekarang saya melihat contoh yang konkret yang Ibu Hastin sampaikan adalah proses destigmatasi. Sejarah pekerjaan sosial memperlihatkan ketika kita tidak mempunyai kejelasan keberpihakan kedalam pengembangan kebijakan sosial, dana program program yang kita kembangkan itu akan menjadi satu yang *function*. Hanya meng-serve kepentingan tertentu atau satu struktur tertentu tanpa ada satu visi, satu *values* yang betul-betul

ditranslasikan ke dalam kebijakan tersebut. Kebijakan tersebut bisa melakukan stigmatisasi, misalnya stigmatisasi itu dimulai dari pendefinisian kelompok yang bermasalah sampai ada konsekuensi pengembangan kebijakan seperti apa.

Hal ini tugas kita semua, saya pikir dengan banyaknya pendekatan buku tentang eksklusi-sosial bisa dilihat dari 3 ranah, mikro makro atau meso itu sangat penting sekali. Kita perlu mengikuti juga tentang perkembangan sistem ekonomi dimana sistem ekonomi berada itu memengaruhi perkembangan program-program penanggulangan kemiskinan. Dari buku yang baru terbit yang berjudul *The Capital* dari seorang profesor di Perancis yang melakukan analisa data dari abad keenam belas semakin memperlihatkan bahwa ketidaksetaraan kesenjangan kekayaan itu bukan suatu kebetulan, tapi suatu efek dari sistem kapitalisme. Akhirnya, disarankan peran penting negara.

Tadi Pak Robert memperlihatkan 4 pendekatan yang memberikan inspirasi. Peran negara ini dikatakan, *progressive tax system*, jadi sistem pajak yang sifatnya progresif. Mereka yang *income*-nya lebih besar *tax*-nya lebih besar, itu masih diperdebatkan luar biasa.

Tapi semakin disadari kalo adik-adik mengikuti perkembangan di dunia, yang dimulai bagaimana orang-orang dari kelas menengah ke bawah mulai bangkit, tak hanya di Amerika tapi banyak kawasan global yang memprotes kesenjangan ekonomi. Jadi diperlihatkan bagaimana gaji eksekutif itu naik tidak seimbang dengan kenaikan gaji buruh dan akumulasi ketika rating kapitalnya itu lebih tinggi dari pertumbuhan ekonominya. Akumulasi kekayaan menjadi begitu utama. Itu yang saya tidak ingin terlalu panjang membicarakan ini, tapi saya ingin mengatakan bahwa ketika kita bicara tentang pemberdayaan keluarga, konteks kemiskinan itu tidak lepas dari pemahaman kita bagaimana melihat translasi dari satu sistem ekonomi, nilai apa dibalik sistem ekonomi itu? Apa konsekuensinya terhadap pembentukan kebijakan sosial dan program-program kemiskinan? Siapa yang di eksklusifkan dari program itu? Apa justifikasinya? Proses stigmatisasi apa atau diskriminasi apa yang sedang berlangsung dengan adanya program-program tertentu?

Saya melihat di sini sebagai pekerja sosial kita punya banyak peranan, tadi Pak Edy juga bilang adanya orang yang bisa menghubungkan dari atas sampai ke bawah. Adik-adik sering mungkin ceramah *multy role* dari pekerja sosial. *Nah*, sesi kedua ini memperlihatkan sangat jelas cukup ada peran advokasi, peran mediator dan berbagai peran yang bisa ditranslasikan dalam berbagai level intervensi. Saya melihat ada upaya untuk melihat secara kritis. Tapi kalau kita dengar contohnya dari ketiga kasus ini, mungkin Mbak Hastin yang jelas bagaimana ada upaya-upaya stigmatisasi yang sebetulnya menyumbang pada penguatan pendekatan dari pekerja sosial.

Ketika saya kembali (dari sekolah di Amerika), saya melihat permasalahan di Indonesia dan saya tidak mau terbawa pada satu fenomena di mana saya hanya mengikuti pada apa yang dikatakan dunia akademik. Saya agak berontak juga waktu pulang kemari dan saya agak lelah psikis karena saya merasa di akademis ini kita tidak melihat bahwa kita adalah "*human source organization*" (HSO). Kita adalah suatu bentuk HSO yang ada di dalam lingkungan, yang perlu mengajak lingkungan itu untuk berdialog, untuk berinteraksi di situ kita bisa "*survive*". Ada lingkungan yang institusional dan lingkungan yang teknikal, yang kita butuhkan untuk "*resources*", tapi ada juga yang melegitimasi kita. Apakah kita mentranslasikan itu ke dalam pendekatan-pendekatan yang kita gunakan?

Nanti adik-adik bisa membaca buku Hasenfeld. Jadi saya pikir penting sekali bahkan seringkali dilupakan, bahkan di kurikulum kesejahteraan sosial S2 itu, bahan-bahan itu tidak dimasukkan. Saya agak kaget karena ada perubahan cukup luar biasa. Dari awal ada praktikum, sekarang tidak ada karena salah pahamnya ketika orang melihat yang meso itu, tentang analisa organisasi. Apa yang tadi pak Robert gambarkan merupakan fenomena yang luar biasa. Yang kita pelajari, pertemuan antara akademis dengan praktis.

Pendekatan-pendekatan itu bisa kita lihat bagaimana praktik itu diterapkan. Disitulah perkembangan konsep-konsep pekerja sosial sekarang. Nanti adik-adik bisa lihat tentang "*evidence-best practice*". bagaimana praktik-praktik itu mentranslasikan hasil penelitian dalam praktik, jadi praktiknya tidak stagnan. Tapi praktiknya penuh dengan transformasi hasil-hasil yang terbaru. Kalo kita pengen maju, kita perlu memahami konteks yang berkembang sekarang.

Satu hal yang ingin saya katakan sekarang kaki saya di luar dunia akademik, ada di dua bidang. Karena saya teringat dua bidang ini berteriak, "Kita butuh pekerja sosial!". Tapi tidak ada respon dari pekerja sosialnya itu sendiri. Jadi yang pertama itu adalah kerjasama dengan kelompok organisasi di Indonesia, yaitu kelompok pengungkapan kebenaran, KKPK, mereka yang bekerja dengan korban yang mengalami pelanggaran HAM (hak asasi manusia). Gabungan dari berbagai korban pelanggaran HAM dari tahun 1965, peristiwa Tanjung Priok, penculikan aktivis dan berbagai peristiwa di Indonesia. Mereka bekerjasama dengan LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban), Komnas HAM, dan Komnas Perempuan membantu pelayanan sosial untuk korban-korban ini karena proses stigmatisasinya luar biasa.

Konteks-konteks politik ini penting sekali dalam pemahaman, pendekatan-pendekatan, pemecahan masalah dalam kesejahteraan sosial. Sekarang kaki saya itu, satu di sana untuk melihat fenomena yang ada, yang satunya lagi kelompok multi profesi dan lintas sektoral masalah kesehatan. Hal ini juga satu proses pencerahan yang luar biasa ketika saya membawa ke ruang kelas, berdiskusi dengan mahasiswa tentang kesehatan mental. Mahasiswa di UI itu ada yang tercengang bahwa melihat seorang skizofrenia bisa menjadi seorang professor atau seorang skizofrenia bisa berfungsi secara profesional menjadi seorang yang sukses. Itu sangat menggoyahkan gambar konsep keberfungsian sosial kita. Di dunia akademik bahkan di UI juga ada tenaga-tenaga senior yang melihat sakit mental itu orang gila. Jadi ada stigma yang luar biasa dan kita sebagai pekerja sosial harus melihat konteks-konteks apa ketika kita memahami konsep kesehatan mental.

Saya pernah putarkan enam kasus *mental health* oleh seorang *medical anthropology*, di situ kita harus bekerja sama dalam memahami permasalahan. Ketika saya memutar film tentang *mental health* dan bagaimana kesehatan mental dari keluarga-keluarga yang mengalami gangguan yang tidak bisa mengontrol gerakannya, itu dimasukkan ke dalam gangguan dari kerasukan (*black magic*), roh-roh jahat dan sebagainya. Jadi saya ingin mengatakan disini, konteks dari pemisahan antara pekerja sosial, kesejahteraan sosial, makro, meso, mikro coba kita hindari, karena saya pikir itu tidak lagi harus diperdebatkan, karena ada masalah-masalah yang konkrit.

Saya mendapatkan kewenangan untuk merapikan sistem kurikulum di UI. Saat ini saya mencoba membangun aliansi, bisa mengembangkan sistem praktikum *online* dalam arti untuk membantu kita melihat kekurangan SDM kita untuk mensupervisi mahasiswa, karena salah satu tantangan kita di UI adalah kita tidak punya supervisor di sekolah yang memang terlatih dengan berbagai macam *setting* yang sangat banyak itu, yang diminati oleh mahasiswa. Mungkin bisa memberikan secara umum, tapi seringkali sulit dan saya pikir

pada akhirnya di sekolah-sekolah yang sudah berkembang program pekeja sosialnya itu tidak lagi semua staf pengajar sebagai *supervisor*, tapi ada direktur yang bekerja yang nantinya akan mengurus semua binaan-binaan dan lembaga-lembaga sosial dan hanya beberapa namanya *field placement* yang betul-betul yang mempunyai *background* yang cukup terlatih dalam hal itu.

Dalam kondisi ini saya sebetulnya sedang bekerjasama dengan *The University of Island* yang sebetulnya saya pikir modelnya cukup merepotkan untuk kita adopsi. Jadi yang mereka lakukan adalah mereka mempunyai sistem database mahasiswa, mahasiswa bisa mengisi langsung sistem di komputer. Kalau di UI ada sistem yang langsung mengisi sistem perkuliahan ada programnya. Yang ingin saya katakan adalah menggabungkan satu *database* pada akhirnya enam model yang akan membimbing secara berkala apa yang harus dipelajari oleh mahasiswa di lapangan. Model itu *online*, mahasiswa itu bisa *log in*, bisa melihat. Saya sebagai supervisor juga bisa *log in* dan bisa melihat kegiatan mahasiswa, kemudian supervisor di lapangan juga bisa melihat perkembangan enam mode itu.

Dari model ini kita tidak bisa melihat perkembangan praktikum sebagai linier tetapi sebagai proses yang lebih spiral. Praktikum-praktikum sebelumnya itu sepertinya ada target antara pertama kali masuk sampai ujian tengah semester itu harus begini, dari ujian tengah semester sampai ujian akhir harus begini. Proses belajar yang kita ketahui tidak seperti itu. Dengan model itu sebetulnya akan membantu kita lebih mudah untuk melihat konsep-konsep yang wajib yang perlu kita ikuti dari awal sampai akhir sebagai satu keutuhan.

Saya sedang mendalami beberapa model praktikum dari beberapa kurikulum yang mempunyai sejarah yang berbeda, satu yang namanya sekolah *social welfare, school of social work and human resources*, satu lagi *social administration*. Mereka mempunyai sejarah yang berbeda, ada *core* yang harus dilalui dalam praktikum, dan ada penekanan yang berbeda.

Saya pikir perlu kita sadari di antara para pekerja sosial bahwa tidak perlu memaksakan kita itu harus sama satu sama lain. Ketika saya kembali saya dipilih sebagai sekjen di IPPSI dan sangat menarik melihat kurikulum waktu itu di Bengkulu dan Yogyakarta, dan pada saat itu sangat penting adanya dialog karena kita melihat dengan kondisi SDM kita dan sejarah kita, apa minimal kompetensi yang mesti kita capai? Bagaimana mentransformasikannya?

Saya pikir akan beragam tiap sekolah. Secara garis besar harus ada *agency manager* yang berhubungan dengan lembaga-lembaga tempat praktikum dan ada *trust supervisor*, ada orang yang dipercaya untuk membantu mahasiswa, melihat perkembangan mahasiswa, tapi ada orang yang memang menangani langsung praktikum yang mungkin lebih banyak berinteraksi dengan mahasiswa. 6 modul yang ingin saya gunakan, masuk ke dalam uraian ke 6 area ini, di dalam 6 area ini kita akan melihat area-area pekerja sosial, ini sangat umum tapi di modul sangat detail sekali, mencakup dari mulai yang makro sampai bagaimana memahami perkembangan *interpersonal relationship*. Dalam tiap modul kita akan bisa melihat, mahasiswa akan bisa memasukkan, menggambarkan di mana kamu sekarang, kemana kamu sekarang.

Di dalam modul itu akan ada pertanyaan-pertanyaan untuk membantu mahasiswa dalam *me-review* itu. Sistem seperti ini bisa kita pikirkan bersama karena membantu juga keseragaman, tapi dalam arti dalam mencoba untuk mentransfer pengetahuan, mensupervisi praktik dan juga memberikan kesempatan pemahaman nilai-nilai ketika mahasiswa mendapatkan dilema.

Satu *database* yang sedang saya kembangkan adalah lembaga praktikum mahasiswa. Tidak ada dokumentasi lembaga tempat praktikum yang membantu kita dalam perencanaan. Contohnya, *cluster* lembaga-lembaga yang menangani anak, itu sangat beragam sekali kalau kita lihat dari mulai anak jalanan sampai masalah yang lain. Kalau kita tidak mempunyai dokumentasi dan *mapping* tentang lembaga-lembaga ini, terkait dengan praktikum, bagaimana kita bisa mengandalkan mereka? Bagaimana kita bisa membuat perencanaan? Mengambil di sisi mana yang harus kita lebih jalankan?

Kurikulum harus membantu mahasiswa untuk melihat permasalahan. Kalau kita punya *mapping* lembaga-lembaga, kita bisa *me-mapping cluster area*. Kalau kita bisa *me-mapping cluster area*, pada akhirnya kita bisa masukkan ke dalam kurikulum kita.

Saya tidak melihat ini sesuatu yang terpisah antara kurikulum dengan praktikum. Saya lebih suka istilah "*field education*" daripada praktikum atau "*field placement*", karena "*field education*" memperlihatkan satu sistem pendidikan itu sendiri. Dengan *mapping* itu kita mungkin bisa membuat satu program yang sebetulnya kita bisa bekerja sama dengan lembaga-lembaga sosial, membangun *database* supaya kita mempunyai gambaran tentang nama lembaga, bidang apa, apa dibalik kepedulian lembaga-lembaga itu. Hal itu yang saya pikir perlu *mapping*, ini perlu ada kerjasama dari sekolah-sekolah pekerja sosial, kita saling berbagi informasi.

Soal kompetensi, ada 10 kompetensi dari semua sekolah pekerjaan sosial baik dalam kuliah maupun dalam praktikum. Kompetensi ini dari "*social work and education*" jatuhnya dari institusi akademik dan profesional, satu sampai sepuluh. Satu sampai sembilannya itu sebetulnya berkaitan dengan karakter, nilai nilai (*values*), masalah *human right*, maupun *social justice*. Yang sepuluh baru bicara *engagement*, *assessment*, dan sebagainya yang ada pada konsep pekerja sosial.

Pada akhirnya kita di sini ditantang dengan kompetensi yang seperti ini, tapi bukan sekadar menerima kompetensi negara-negara yang sudah maju dan saya ingin mengajak tidak terjebak pada proses intervensi yang kita perdebatkan selama ini. Tapi kita juga ingin melihat bagaimana satu sampai sembilan ini dimasukkan ke dalam kurikulum. Jadi pada akhirnya inti kurikulum dari pekerjaan sosial ada *core* praktikum. Tapi ada juga yang sangat penting, adanya *cluster-cluster* pengembangan yang berkaitan dengan metode, teori, pendekatan, kuliah penelitian, pemahaman ke dalam tentang permasalahan. Hal itu saya lihat masih kurang, saya pikir perlu dikembangkan lebih jauh tentang *cluster-cluster* di dalam kurikulum.

TANYA JAWAB:

Drs. Nelson H. Parapat, M.Si:

Beberapa waktu belakangan ini saya cukup aktif, bisa dikatakan melakukan penelitian yang tadinya *iseng-iseng*. Tadinya saya mengantarkan istri saya yang bekerja di NGO di bagian pencegahan HIV/ AIDS dan dia koordinatornya untuk wilayah Jakarta Barat di Kecamatan Penjaringan. Saya kebetulan menjemput istri pulang, karena masyarakat kalau mengadakan pertemuan harus malam.

Saya tertarik mau melakukan semacam penelitian tentang komunikasi keluarga. Kenapa saya tertarik, ketika ada kunjungan keluar, istri saya melakukan kunjungan ke rumah yang anaknya kena HIV/ AIDS. Ia punya anak 4, salah satunya kena HIV/AIDS. Ada anaknya yang wanita pulang malam. Si bapak, orang tua korban ini, bertanya, "*Lho, pulang bawa apa?*". Karena pertanyaan ini, saya tanyakan ke istri saya, "*Apa maksudnya?*". Istri

saya bilang, di sini kalau pulang malam tidak bawa apa apa, tidak bawa duit, tidak ada gunanya anak itu. Itu bukan satu-dua keluarga. Rupanya saya lihat, kenapa pula komunikasinya seperti itu, ternyata di komunitas itu, sudah menjadi satu hal biasa jika mempunyai anak perempuan yang cukup cantik itu menjadi PSK terselubung dan punya level, sampai maaf kata, ketika rapat DPR di Hotel Mulia, itu mereka menyuplai beberapa puluh wanita dari situ. Jadi di tingkat kebijakan pun, orang-orang yang merumuskan kebijakan itu adalah pengguna.

Oleh karena itu, intervensi klinis itu tidak bisa hanya semata mata ada di klinis. Mungkin perlu ada kebijakan yang dibuat oleh DPR, yang ada selama ini hanya polesan saja, belum serius. Itu kesulitan yang terjadi, ini baru dari komunikasi keluarga dan saya akhirnya mencoba terjun lagi, para orang tua di sana ternyata punya semacam jaringan dalam “menjual anaknya” kepada para bos. Yang saya lihat dari pekerja sosial mungkin intervensi yang cukup lengkap, selain intervensi mikro klinis, juga dibarengi dengan intervensi yang meso dan makro, khususnya di lapangan. Jadi dari komunikasi ternyata berkaitan dengan disiplin lain. Pertanyaan saya, apakah dalam kurikulum ini, kemampuan melakukan intervensi secara intervensi klinis didukung dengan intervensi meso bisa diramu sekaligus di dalam kurikulum kita?

Dr. Prudensius Maring, MA:

Mirip dengan Pak Nelson. Saya pikir saya setuju dengan yang terakhir, kita perlu mengambil jalan tengah, jangan tergesa-gesa masuk ke profesional, praktik atau akademik, karena saya pikir harus dibuat seperti itu. Saya seringkali mengalami persoalan juga ketika, misalnya, berdiskusi dengan mahasiswa, itu kalau kita tergesa-gesa masuk ke hal yang praktis dan disitu ada problem karena saya mengalami ketika saya merasa teori itu penting setelah mengalami itu semua. Saya memakan semua teori itu. Dibandingkan ketika saya berhadapan dengan mahasiswa, saya segera mengajak mereka untuk masuk pada tataran praktis, praktik, kadang mahasiswa kita mulai dengan hal-hal yang praktis.

Yang kedua, saya sepakat bahwa memang diskusi kita itu masuk pada persoalan pada masalah titik mulai intervensi. Acuannya itu pada masalah, jadi sekat-sekat mikro, meso atau makro itu jangan terlalu menjadi persoalan, menjadi faktor pembatas buat kita. Itu poin yang saya rasa penting. Karena ketika kita tidak terlalu secara tegas membuat batas-batas itu, sebetulnya namanya pekerjaan sosial itu akan bisa merangkum ini, semua bidang disiplin ilmu.

Terkait praktik, saya sepakat seorang pekerja sosial tidak harus mengatakan hanya mau bekerja pada level mikro, meso, atau makro saja, karena itu sangat bergantung dari persoalan yang terjadi, lalu kita harus respon. Ketika kita masuk level mikro, apa titik masuk kita, ruang yang kita sentuh? Hal ini akan bersentuhan dengan berbagai macam persoalan, sumber masalah yang ada pada level mikro, meso, atau makro. Kalau, misalnya, persoalan yang dihadapi oleh orang atau kelompok intervensi, hal itu berkaitan dengan persoalan kehilangan identitas, semangat hidup, atau disorientasi nilai itu saya anggap persoalan pada level mikro, bisa diselesaikan dalam lingkaran itu. Tapi kalau persoalan itu berkaitan dengan hubungan sumber daya, jaringan, misalnya, soal uang, seperti yang dilakukan oleh Ibu Hastin, itu sebenarnya masuk pada tataran meso dan Pak Nelson tadi pada level kebijakan.

Ada banyak persoalan yang terjadi di level mikro, orang per orang atau klien. Itu sebetulnya bersentuhan dengan persoalan-persoalan besar, jejaring-jejaring, termasuk soal kebijakan. Jadi berarti tuntutananya, seorang pekerja sosial harus bisa masuk pada level itu, dan soal praktik saya pikir perlu ada

pendefinisian tegas soal praktik, karena setelah saya berdiskusi dengan kawan-kawan, kalau praktik itu berarti masuk pada level mikro, bertemu dengan klien melakukan intervensi disitu atau bahwa kita harus mendefinisikan praktik itu harus masuk pada tiga level itu.

Masuk pada persoalan mobilisasi sumber daya atau berkaitan dengan advokasi kebijakan, kalau praktik itu diserahkan kepada mahasiswa, mahasiswa yang mencari tempat praktik dan segala macam, hal ini akan berhadapan dengan persoalan tersebut. Kalau kita hendak mengembangkan kurikulum yang sempurna maka di tingkat institusi harus menggunakan advokasi. Advokasi itu tidak bisa dibatasi waktu dan jika kita sudah masuk ke dalam advokasi, persoalan itu harus tuntas. Diskusi ini akan sangat bagus jika dibuat lokakarya khusus.

Jawaban:

Hastin Turstisari, M.Si:

Saya tertarik dengan pertanyaan Bapak Nelson. Saya lama di Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) dan melakukan program yang sama, penanggulangan HIV/AIDS. Saya termasuk yang beruntung karena bisa tiga tahun di lokalisasi Saritem di Bandung tahun 2000-2003, sehingga beberapa pengalaman pendampingan saya menjadi tulisan yang menarik di beberapa jurnal. Saya ingat sekali ketika orang mempunyai ketertarikan, karena melihat bahwa PSK itu jadi bahan *entertainment*, tapi tidak linier bagaimana seorang pengambil keputusan kebijakan negeri ini juga pengonsumsi, sama sekali tidak ada hubungannya, karena itu memang antara *hobby*, ada kemauan, itu selesai.

Namun kemudian saya teringat saat saya punya program itu didanai oleh UNFBA. Kita punya program mengajak teman-teman PSK untuk mengenali resiko pekerjaannya, jadi tidak bertujuan semata-mata mancabut dari profesinya, karena itu tadi pekerja sosial itu bukan dewa dan bukan dewi. Jadi kita kenalkan dulu resikonya, kalau tidak mau beresiko dengan pekerjaan itu, gunakan kondom. Memang dari banyak sudut, dari sudut agama, kita tidak mau berdebat itu, karena kita dalam konteks mengurangi resiko. Kita ingin PSK berdaya, punya negosiasi terhadap kliennya, dia sehat dan bisa memilih pekerjaan mana yang pas, yang resikonya paling rendah.

Saya teringat betul kita mengajarkan memakai kondom itu bukan sesuatu yang tawar-menawar, kita mengajarkan mereka bahwa PSK yang memakai kondom itu sesuatu hal, seperti memakan permen dengan bungkusnya. Kita harus *standing* 3 bulan mengajari mereka menggunakan kondom tanpa tangan, jadi menarik ada satu momen, ada delegasi dari salah satu anggota DPR, kita kenalkan sama mucikarinya. Hal ini menjadi kontraproduktif ketika Kemensos membuat panti, menggrebek dan menangkap mereka, terus memberikan keterampilan menjahit dan sebagainya dan dilihat dari perspektif lain bahwa nilai anak adalah memiliki nilai ekonomis.

Drs. Nelson Parapat, M.Si. (penjelasan tambahan):

Di komunitas itu anak memang memiliki nilai ekonomis. Ternyata mau menyelesaikan permasalahan HIV/AIDS dari anak itu tidak cukup karena ketika di komunitas itu nilai anak adalah seperti itu, yang harus

diintervensi adalah keluarga di komunitas itu. Hal ini yang saya bilang, ketika di keluarga selesai, sementara lingkungannya tidak mendukung maka akan kembali lagi seperti itu.

Hastin Turstisari, M.Si:

Saya punya pengalaman seperti itu, buat mereka kematian itu urusan Yang Di Atas dan dengan cara apapun bias. Itulah pemikiran mereka dan perlu adanya revolusi mental.

Dra.MM. Sri Dwiyantari, M.Si :

Sedikit yang ingin saya sampaikan mengenai mikro, meso, dan makro yang disampaikan Pak Pruden. Di lapangan saya cukup lama, di pengembangan masyarakat di daerah Ambarawa, ketika ada masalah-masalah keluarga, lebih-lebih tentang masalah gizi, kekurangan gizi pada anak-anak balita dan kita memang bergerak pada level keluarga, tetapi kita ada di tataran tingkat meso, desa. Kita memang tidak bisa bergerak dengan keluarga saja, tapi bergerak juga di level tingkat desa, di kecamatan sampai tingkat pusat dan perspektifnya adalah di level kebijakan makro. Saat itu gubernur Jawa Tengah Bapak Suparjo Rustam dan Ibu Suparjo Rustam cukup aktif sekali di bidang PKK. Ketika itu di tingkatan pusat memang keluarga terpadu itu sedang digalakkan kembali di masyarakat Indonesia yang kekurangan gizi. Jadi memang kita bergerak di mikro tetapi tetap di level desa dan kecamatan kita ada. Memang, perspektif mikro, meso, dan makro tidak bisa lepas.

Flores Mayaut, S.Sos:

Saya terpikir begini. Kalo kita bicara mikro, ya kita bicara individu, tetapi apa yang telah disampaikan oleh Ibu Hastin dan Ibu Dwi, kita tidak bisa mengkotak-kotakkan antara mikro, meso dan makro. Kalau kita mengadopsi perspektifnya *situation*, kita tidak bisa lepas dari lingkungannya, dimana manusia itu ada. Jadi masalah individu kita juga lihat masalah lingkungannya. Faktor lingkungan mungkin bisa kita masukan meso, bisa mikro. Itu pendapat saya.

Erna Dinata, PhD:

Saya sedikit menambahkan, saya pikir poinnya sama. Kalau di kurikulum dimana saya menyelesaikan S2 saya, tahun pertama mendapatkan nilai praktek dan mendapatkan porsi utama, adapun kuliah teori di kelas itu porsi menengah. Waktu kita praktikum pada tahun pertama, kita tidak bisa memilih karena sudah ditentukan oleh lembaga. Tahun pertama itu memang tidak banyak pilihan, mereka ingin kita juga punya pengalaman praktis.

Waktu itu saya ditempatkan di *Migrant Center Asia* untuk perempuan-perempuan Asia yang mengalami depresi dalam keluarganya. Walaupun saya harus meng-*interview* mereka dan melakukan pertemuan kelompok, tapi juga terlibat dalam advokasi dan mengembangkan *legal resources* karena mereka banyak yang tidak bisa bahasa Inggris, tidak punya *legal document* dan sebagainya. Jadi itu memang sangat tidak bisa lepas dari permasalahan individu, tapi dalam tahun pertama kita sudah dibentuk oleh kuliah praktis, *policy*, dan penelitian.

Kemudian pada tahun kedua lebih kompleks. Pada tahun kedua kita bebas, tapi kita harus melalui proses *interview*, jadi seperti orang yang mau melamar pekerjaan, karena di sana mereka sangat kompetitif sekali.

Pada tahun kedua saya malah dibayar dari praktikum di tempat anak-anak yang mengalami gangguan perilaku agresif. Hal itu dalam konteks klinis, tapi kalau dilihat sejarah penanganan anak-anak itu, itu luar biasa sekali, perdebatan *political economy*, kenapa anak-anak itu pindah ke tempat itu dan pada akhirnya tempat itu ditutup. Mahasiswa harus lebih kritis dalam memahami pendekatan-pendekatan yang sudah mapan, pendekatan teknis atau pendekatan pada tingkat yang lebih luas. Jadi saya pikir kombinasinya dalam kurikulum itu penting sekali, karena kalau di departemen saya itu ada konsentrasi klinis, ada yang konsentrasi *social administration*, tapi mereka semua harus mengambil kuliah *policy*, kuliah sosial-ekonomi, administrasi organisasi, teori-teori organisasi, materi materi HSO dari para pakar pekerja sosial seperti Hasenfeld, dan sebagainya, yaitu orang-orang yang sudah mengembangkan konsep pelayanan sosial. Itu salah satu contoh mengambil disiplin lain dan meramu. Hal ini merupakan tantangan kita bersama untuk mencoba menggabungkan ke dalam kurikulum.

Moderator:

Jadi saya bertanya tentang tampilan kita keluar, seperti yang Pak Nelson tadi katakan, kita itu *kan* seolah-olah praktik hanya di mikro, sesungguhnya tidak. Kenapa saya katakan tidak, sebetulnya praktik di kita mikro waktunya terbatas apalagi mungkin bapak-ibu tahu kalau di UI *kan* tidak masalah, sedangkan mahasiswa kita *kan* kerja, jadi kita tidak mungkin bisa, misalnya menuntut harus praktikum. Persoalan kita di situ. Soal pekerjaan sosial, kita harus akui tidak semata-mata *direct* (langsung) tapi juga ada *indirect* (tidak langsung). Susahnya di kita, di Indonesia tidak ada kerjasama di antara semua itu, siapa yang koordinasi, misalnya, masalah-masalah HIV AIDS, kerjasama dengan pemerintah tidak? Dengan LSM tidak? Seolah-olah semuanya kerja sendiri-sendiri, akhirnya berjuang sendiri. Tapi secara teori, saya yakin Widuri itu mengajarkan mikro, meso, dan makro, hanya saja persoalan teknis sebetulnya, kenapa tidak ada yang di meso dan makro mahasiswanya, karena sore semua kuliahnya.

Erna Dinata, PhD (Tambahan) :

Saya pikir, dengan sekolah pekerjaan sosial yang sedang berkembang sekarang juga, mau namanya kesejahteraan sosial (kesos) maupun pekerjaan sosial (peksos), saya lebih mengutamakan substansi. Walaupun saya setuju memang ada pengaruh besar di Indonesia, karena di luar itu sudah tidak diributkan lagi, di sini masih ada kesan, saya kesos, saya bukan kesos, karena itu tadi tentang pendekatan-pendekatan yang ada di kurikulum, satu hal yang sedang saya mulai dengan IPPSI adalah saya ingin beranjak dari perdebatan peksos-kesos.

Saya ingin merangkul IPPSI dengan mulai bicara permasalahan, jadi saya buat beberapa *list*, misalnya, tentang sosialisasi UU Kesehatan Jiwa (Keswa) dan bagaimana meningkatkan peran pekerja sosial dalam membangun sistem pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan BPJS dan sebagainya. Jadi saya pikir kita tidak punya lagi energi hanya untuk meributkan hal seperti itu, tapi kita lihat, apa sumbangan pekerja sosial pada masalah-masalah *abuse*, pengembangan secara sistem pada tingkat pemerintah daerah. Potensi yang luar biasa antara pendidikan dan profesi dalam pengembangan itu, sama juga dengan sistem pengembangan pelayanan kesehatan. Jadi salah satu agenda yang saya mau lakukan adalah mulai bicara pada isu permasalahan.

1. KESIMPULAN

Pada hakekatnya ada tiga domain dalam pembangunan, yaitu: domain ekonomi, domain sosial, dan domain ekologi. Integrasi ketiga domain disebut paradigma pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Pembangunan berkelanjutan dapat disebut pro kesejahteraan, yakni pertumbuhan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat seluruhnya. Pembangunan juga pro keadilan sosial, yakni keadilan dan kesetaraan akses terhadap sumber daya alam dan pelayanan publik, serta menghormati kebhinekaan masyarakat. Kemudian, pembangunan berkelanjutan disebut pro lingkungan hidup yang mengutamakan keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup. Dengan pembangunan berkelanjutan diharapkan terjamin secara baik kehidupan masa kini dan generasi yang akan datang. Namun, pada praktiknya, pembangunan yang lebih mengejar pertumbuhan ekonomi menyebabkan berbagai masalah ekologi dan kesejahteraan sosial.

Berkaitan dengan itu, STISIP Widuri menginginkan penataan kembali struktur sosial, ekonomi, dan politik berbasis ekologi dan kesejahteraan sosial yang memberi lebih banyak lagi ruang partisipasi dari mereka yang terpinggirkan dalam suatu proses pembangunan.

Kampus adalah institusi yang sangat strategis dan menentukan, bukan saja sebagai pencipta tenaga kerja terdidik, tetapi sebagai pusat penyadaran dan transformasi sosial. Kampus berperan dalam pembangunan, peradaban dan hidup matinya sebuah bangsa. Kemajuan kampus dapat dilihat dari pencapaian tiga unsur: *service excellence-layanan bermutu*, reputasi dan pengaruh. Layanan mutu dan reputasi belum cukup karena sebuah lembaga akademik harus membuktikan bahwa dirinya 'berpengaruh'. Perguruan tinggi yang berpengaruh adalah perguruan tinggi yang mampu menjadi tumpuan bagi kebijakan, referensi opini akademik dan sandaran pada kepentingan strategis. Kita para ilmuwan (sosial) harus mampu memberikan jawaban, formula dan kerangka kerja jangka pendek, menengah dan panjang bagi pemecahan masalah kemiskinan, keterbelakangan, ketidakadilan dan ketimpangan sosial yang menjadi persoalan mendasar bagi Indonesia.

Sekat-sekat mikro, meso atau makro itu jangan terlalu menjadi persoalan, menjadi faktor pembatas. Acuan itu terletak pada masalah yang menjadi titik mulai intervensi. Terkait praktik, seorang pekerja sosial, misalnya, tidak harus mengatakan hanya mau bekerja pada level mikro, meso, atau makro saja, karena itu sangat bergantung dari persoalan yang terjadi, lalu direspon. Hal ini akan bersentuhan dengan berbagai macam persoalan, sumber masalah yang ada pada level mikro, meso, atau makro. Kalau, misalnya, persoalan yang dihadapi oleh orang atau kelompok intervensi berkaitan dengan persoalan kehilangan identitas, semangat hidup, atau disorientasi nilai, hal tersebut merupakan persoalan pada level mikro, bisa diselesaikan dalam lingkaran itu. Tapi kalau persoalannya berkaitan dengan hubungan sumber daya, jaringan, soal uang, itu masuk pada tataran meso dan jika level kebijakan berada pada level makro.

Dalam persoalan involusi perkotaan dan strategi sosial-ekonomi masyarakat terkena banjir secara berulang di Bantaran Sungai Ciliwung terlihat masyarakat melalui peran aparat dan tokoh-tokoh masyarakat memang mampu mendorong kelompok-kelompok yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat melalui

aktivitas dan konstruksi struktur yang “lebih besar-luas” dengan menegaskan pentingnya agenda bersama yang lebih luas. Namun, organisasi sosial yang dibangun belum diarahkan untuk meningkatkan produktivitas masyarakat, sebaliknya diarahkan untuk pengamanan terhadap kondisi darurat yang dihadapi masyarakat dalam situasi banjir rutin yang terjadi secara berulang.

Strategi sosial yang dijalankan masyarakat bantaran Ciliwung dipengaruhi rutinitas banjir yang datang secara berulang dalam jangka waktu yang lama. Pola adaptasi berciri involutif terlihat dalam strategi sosial masyarakat bantaran Ciliwung. Pola involutif ini yang mempengaruhi dan menghambat keputusan masyarakat untuk melakukan terobosan dan perubahan termasuk dalam hal agenda normalisasi dan penataan pemukiman warga bantaran Ciliwung. Program layanan sosial pemerintah terjebak dalam skema layanan sosial karitatif, darurat, dan belum dijalankan secara strategis dan berkelanjutan. Kondisi ini di satu sisi menghambat layanan sosial dan pada sisi lain melahirkan keraguan masyarakat terhadap program pemerintah dalam rangka penataan bantaran sungai Ciliwung.

Dalam pemberdayaan masyarakat, peran *lay persons* perlu diperhatikan. *Lay persons* adalah orang-orang awam setempat yang memiliki peran penting karena memiliki kapasitas kepoloporan yang dapat memodifikasi proses-proses sosial yang untuk perubahan sosial.

Selanjutnya, asumsi tentang pembangunan desa intinya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Perspektif Modernisasi Ekologik (PME) merupakan pendekatan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat desa secara berkesinambungan (*sustainable*), yakni *sufficiency*, *efficiency*, dan *consistency*. Sintesis antara PME dan Kapital Sosial (KS) memiliki kekuatan eksplanatoris yang solid untuk penyusunan kebijakan sosial ekonomi politik yang berkesinambungan, dapat dilihat dari *communitarian view* (kekuatan masyarakat untuk menjaga lingkungan hidup); *network view* -kekuatan bersama secara regional atau nasional untuk menjaga lingkungan dan memanfaatkannya secara bertanggungjawab; *institutional view* (peran negara dan CSO untuk mengembangkan kebijakan yang berorientasi pemeliharaan dan pemanfaatan lingkungan hidup secara melembaga); dan *synergy view* (peran semua warga dalam mempertahankan dan menjaga kehidupan bumi untuk memberi kita kehidupan).

Kelemahan ekonomi keluarga (kemiskinan) dapat menjadi faktor munculnya masalah psikososial anggota keluarga. Maka diperlukan upaya pemberdayaan keluarga. Pemberdayaan keluarga menggunakan metode *social case work* dapat meningkatkan keberdayaan keluarga. Dalam hal ini dengan memanfaatkan potensi lingkungan keluarga tersebut, misalnya pemanfaatan lahan kosong sekitar rumah dan pemanfaatan tanaman liar papaya gantung yang akhirnya terjadi “*income generating*” keluarga dan sarana peningkatan membangun relasi sosial.

Peran kelembagaan konsultasi kesejahteraan keluarga diperlukan untuk penguatan ketahanan keluarga. Namun keberadaan lembaga tersebut memiliki tantangan tersendiri. Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) STISIP Widuri dalam pelaksanaan pelayanan juga menemukan kecenderungan klien yang bertahan pada zona nyamannya, sehingga butuh waktu yang cukup lama dalam pelayanan yang diberikan. Merubah kebiasaan atau sifat yang dimiliki klien membutuhkan proses panjang, sehingga intensitas kehadiran pekerja sosial cukup tinggi untuk mendampingi klien.

Ketidakmampuan kaum marjinal tidak hanya karena faktor ekonomi melainkan juga persoalan sosial-budaya yang melingkupinya. Dalam penelitian terhadap anak-anak jalanan kategori rentan yang putus sekolah

di wilayah Pusat Grosir Cililitan (PGC), Jakarta Timur ditemukan kenyataan bahwa ketidakmampuan anak-anak untuk melanjutkan sekolah, bukan dari ketidakmampuan ekonomi, melainkan dari mentalitas orang tua, pengaruh lingkungan tempat tinggal, tempat bermain dan juga kurangnya *role model* anak jalanan untuk mencapai cita-cita melalui jenjang pendidikan.

Pelaksanaan intervensi pekerja sosial tidak akan dapat maksimal dilakukan jika tidak melibatkan orang tua dan anak dalam upaya pengambilan keputusan untuk melanjutkan sekolah. Peran orang tua yang berkomitmen mendukung anak jalanan untuk melanjutkan sekolah perlu diperkuat secara terus menerus sebagai pondasi dasar untuk merubah mentalitas orang tua terhadap anak dalam melihat pendidikan adalah investasi masa depan anak.

Di sini diperlukan penyusunan kurikulum pendidikan pekerja sosial yang membantu mahasiswa untuk melihat permasalahan. Kita perlu menyadari bahwa di antara para pekerja sosial tidak perlu memaksakan diri harus sama satu sama lain.

Kita bukan sekadar menerima kompetensi negara-negara yang sudah maju. Dari 10 kompetensi di semua sekolah pekerjaan sosial baik dalam kuliah maupun dalam praktikum, satu sampai sembilannya itu sebetulnya berkaitan dengan karakter, nilai nilai (*values*), masalah *human right*, maupun *social justice*. Yang kesepuluh baru bicara *engagement*, *assessment*, dan sebagainya yang ada pada konsep pekerja sosial. Kita harus melihat dengan kondisi sumber daya manusia dan sejarah kita, apa minimal kompetensi yang mesti kita capai dan bagaimana mentransformasikannya.

2. SARAN

Saran yang mengemuka dalam seminar ini adalah sebagai berikut:

- a. Program intervensi sosial untuk melakukan rekayasa sosial harus memperhitungkan dan mengakomodasi dinamika sosial serta strategi sosial-ekonomi yang dijalankan anggota masyarakat. Belajar dari hasil studi di masyarakat bantaran sungai Ciliwung, program intervensi sosial dan penataan pemukiman masyarakat marjinal harus berorientasi memperkuat strategi sosial ekonomi masyarakat terutama untuk memelihara keberlanjutan sumber mata pencaharian.
- b. Dalam intervensi sosial, terutama di lingkungan komunitas yang bertaraf ekonomi dengan etika subsisten, akademisi maupun praktisi profesional perlu melibatkan *lay persons* yang berperan sebagai pelopor pembaruan dan perubahan sosial.
- c. Perlunya pemberdayaan keluarga melalui pemanfaatan potensi lingkungan keluarga menjadi salah satu model pemberdayaan yang komprehensif dalam perspektif pembangunan sosial dan pembangunan lingkungan.
- d. Dalam upaya pengembangan program melanjutkan sekolah bagi anak-anak kaum marjinal, pelibatan orangtua/ keluarga dalam teman-teman perlu diterapkan sebagai bagian intervensi yang tidak dapat terpisahkan. Selain itu pelibatan sekolah rujukan (guru kelas dan kepala sekolah) menjadi penting dilakukan untuk memastikan penerimaan sekolah dan pemenuhan hak anak kaum marjinal dalam mendapatkan pendidikan tanpa diskriminasi. Pelaksanaan intervensi pekerja sosial tidak akan dapat maksimal dilakukan jika tidak melibatkan orang tua dan anak dalam upaya pengambilan keputusan untuk

melanjutkan sekolah. Peran orang tua yang berkomitmen mendukung anak jalanan untuk melanjutkan sekolah perlu diperkuat secara terus menerus sebagai fondasi dasar untuk merubah mentalitas orang tua terhadap anak dalam melihat pendidikan adalah investasi masa depan anak.

- e. Dalam pendidikan pekerja sosial, antara kurikulum dengan praktikum tidak boleh dipisahkan. Berkaitan dengan itu, inti kurikulum dari pekerjaan sosial ada *core* praktikum, dan juga yang sangat penting, adanya *cluster-cluster* pengembangan di dalam kurikulum yang berkaitan dengan metode, teori, pendekatan, kuliah penelitian, pemahaman ke dalam tentang permasalahan.
- f. Diperlukan *mapping* lembaga-lembaga untuk *me-mapping cluster area*. Dengan *mapping* itu dapat dibuat satu program yang bekerja sama dengan lembaga-lembaga sosial, membangun *database* supaya mempunyai gambaran tentang nama lembaga, bidang apa, serta apa dibalik kepedulian lembaga-lembaga itu.

Susunan Panitia Seminar Nasional
“Peran STISIP Widuri dalam Pemberdayaan Masyarakat”

Pelindung:

Ny Leonie R. Prawiro (Ketua Yayasan Pendidikan Pekerja Sosial Dian Agape)

Penasihat:

Prof Dr. Robert Lawang (Ketua STISIP Widuri)

Tim Perumus:

- Dr. Edy Siswoyo, M.Si.
- Dr. Prudensius Maring, MA
- Dr. Retor AW Kaligis, M.Si.

Organizing Committee:

Ketua: Dr. Retor AW Kaligis, M.Si.

- Acara : Maykel Ifan, Taufik Syaera
- Perlengkapan : Flores Mayaut, S.Sos., Wartaya
- Konsumsi : Rumingtyas Oca
- Penerima Tamu : Berlian Tampubolon dan Mhs S1 STISIP Widuri
- Dokumentasi : Wartaya
- Umum : Seno, Rusdi

Prosiding : Dr. Retor AW Kaligis, M.Si.

FOTO-FOTO KEGIATAN



Guru Besar Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP UI, Prof. Dr. Bambang Shergi Laksmono, M.Sc. sebagai *keynote speaker* sedang memaparkan materi dengan didampingi Ketua STISIP Widuri, Prof. Dr. Robert MZ Lawang

Sesi I dengan pembicara (dari kanan ke kiri): Prof. Dr. Robert MZ Lawang, Dr. Edy Siswoyo, M.Si. Dr. Ir. Prudensius Maring, MA, dan moderator Drs. Nelson H. Parapat, M.Si.





Sesi II dengan pembicara (dari kanan ke kiri) Flores Mayaut, S.Sos., Dra. MS Dwiyantari, M.Si., Hastin Trustisari, M.Si., Erna Dinata, P.hD, dan moderator Drs. Fordolin Hasugian, M.Si.



Suasana para peserta di ruang seminar.



Pemberian penghargaan dari ketua panitia, Dr. Retor AW Kaligis, M.Si. kepada Erna Dinata, P.h.D. (Sekjen IPPSI yang juga Dosen Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP UI)



Foto bersama panitia dan peserta